PROFETIK

MEMERAS RAKYAT

NEOLIBERALISME DAN TATANAN GLOBAL

Kata Pengantar oleh Robert W. McChesney

Noam Chomsky

MEMERAS RAKYAT

NEOLIBERALISME DAN TATANAN GLOBAL

MEMERAS RAKYAT

NEOLIBERALISME DAN TATANAN GLOBAL

Noam Chomsky

Pengantar oleh Robert W. McChesney

Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global

Diterjemahkan dari Profit Over People:
Neoliberalism and Global Order
Originally published by Seven Stories Press, New York, U.S.A., 2003
Copyright © Noam Chomsky 1999

Alih Bahasa: Ni'am Sa'diyah
Penyunting: Nurul Agustina
Desain Sampul: Studio Komet
Tata Letak: Khansa Kreatif
Hak cipta edisi Bahasa Indonesia pada Penerbit Profetik
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
Cetakan 1, 2005

Penerbit Profetik
Anggota IKAPI
Komplek Golden Truli Blok E 47
Jl. RS. Fatmawati No. 15 Jakarta 12420
Telp (021) 7697490 Fax (021) 7508945
Email: profetik@ekuator.web.id

ISBN 979-3573-06-5

Didistribusikan oleh:
Mizan Media Utama
Jl. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 146 RT 05 RW 02
Ujungberung Bandung 40294
Telp. (022) 7815500 Fax (022) 7802288
Email: mizanmu@bdg.centrin.net.id

Daftar Isi

Pengantar oleh Robert W. McChesney		vii
Bab I.	Neoliberalisme dan Tatanan Global	1
Bab II.	Persetujuan tanpa Kesepakatan: Rezim atas Pemikiran Publik	29
Bab III.	Keinginan atas Pasar Bebas	55
Bab IV.	Demokrasi Pasar dalam Tatanan Neoliberal: Antara Doktrin dan Kenyataan	83
Bab V.	Perlawanan Zapatista	119
Bab VI.	"Senjata Pemungkas"	139
Bab VII.	"Gerombolan *Vigilante*"	161
Indeks		173

Pengantar

Oleh Robert W. McChesney

Neoliberalisme adalah penjabaran paradigma ekonomi pada zaman kita. Ia mengacu pada kebijakan dan proses di mana sekelompok kecil pihak swasta yang saling terkait diizinkan untuk mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial dalam rangka memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Sejak pertama kali dikaitkan dengan pemerintahan Reagan dan Thatcher sekitar dua dekade lalu, neoliberalisme telah menjadi kecenderungan dominan ekonomi politik global yang diadopsi oleh partai-partai politik utama, baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Partai-partai ini dan kebijakan yang mereka keluarkan mengawal kepentingan sekelompok investor sangat kaya dan kurang dari seribu perusahaan besar.

Terlepas dari keberadaan beberapa akademisi dan anggota komunitas bisnis, istilah neoliberalisme umumnya tidak dikenal dan tidak digunakan oleh masyarakat luas, termasuk di Amerika Serikat. Sebaliknya, di sana, kiprah neoliberal disamakan dengan pasar bebas yang mendorong tumbuhnya perusahaan swasta dan keragaman pilihan konsumen, menghargai tanggungjawab pribadi dan inisiatif perusahaan, meruntuhkan pemerintahan yang tidak kompeten, birokratis, dan parasit, yang tidak akan

pernah melakukan sesuatu dengan baik sekalipun dalam sistem yang dirancang baik – yang jarang terjadi. Upaya kehumasan yang didanai perusahaan turut memberikan aura nyaris kudus bagi istilah dan gagasan ini. Sebagai hasilnya klaim yang diajukan oleh pendukung neoliberalisme hampir tidak perlu dibela dan bahkan menjadi pembenaran bagi segala hal. Mulai dari penurunan pajak untuk orang kaya, undang-undang lingkungan hidup yang dibuat secara serampangan, hingga penghapusan program pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sudah barang tentu setiap bentuk kegiatan yang mungkin mengganggu dominasi perusahaan atas masyarakat otomatis layak dicurigai karena akan mengganggu pelaksanaan pasar bebas. Padahal pasar bebas diyakini sebagai satu-satunya sistem penyedia barang dan jasa yang rasional, adil, dan demokratis. Puncaknya, para pendukung neoliberalisme akan menampilkan diri sebagai pemberi layanan terbaik bagi orang miskin, lingkungan, dan semua pihak sebagaimana mereka telah melayani kepentingan sekelompok kecil orang kaya.

Dampak ekonomis dari kebijakan-kebijakan seperti ini serupa di mana pun dan persis seperti yang dibayangkan: semakin dalamnya jurang sosial dan ekonomi, semakin tertinggalnya negara-negara dan orang-orang termiskin, kerusakan lingkungan yang kian membahayakan, ekonomi dunia yang tidak stabil, serta, di sisi lain, semakin mudahnya sekelompok orang kaya mendapatkan uang dengan cara-cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dihadapkan dengan fakta-fakta ini, pendukung tatanan neoliberal akan mengatakan bahwa selalu ada kemungkinan kenyamanan hidup yang dirasakan segelintir orang menetes ke masyarakat banyak. Syaratnya: kebijakan neoliberal yang dituduh memperburuk kesenjangan dan kerusakan tersebut tidak diganggu gugat!

Kelompok neoliberal tidak dapat dan tidak menawarkan pembelaan empiris bagi dunia yang mereka ciptakan. Sebaliknya, mereka menawarkan—tepatnya menuntut—keimanan total terhadap pasar yang tidak diatur, yang dibangun di atas teori-

teori abad ke-19 dan hanya sedikit terkait dengan dunia nyata. Kartu truf para pembela neoliberalisme adalah tidak adanya alternatif lain. Masyarakat komunis, masyarakat penganut demokrasi sosial, dan bahkan masyarakat di negara yang menerapkan prinsip negara kesejahteraan seperti Amerika Serikat, seperti diklaim oleh para neoliberalis, telah gagal, sehingga mereka menerima neoliberalisme sebagai satu-satunya pilihan. Sistem ini mungkin tidak sempurna, namun inilah satu-satunya sistem ekonomi yang tersedia.

Sebelumnya, pada abad ke-18, beberapa kritikus menyebut fasisme sebagai "kapitalisme tanpa sarung tangan", yang berarti bahwa fasisme merupakan kapitalisme murni tanpa hak-hak dan organisasi demokratis. Dalam kenyataannya kita mengetahui bahwa fasisme jauh lebih rumit dari itu. Neoliberalisme-lah yang sebenarnya adalah "kapitalisme tanpa sarung tangan." Era neoliberalisme adalah era ketika kekuatan bisnis tumbuh semakin kuat dan agresif, serta menghadapi lebih sedikit oposisi yang terorganisir dari sebelumnya. Dalam situasi politik seperti ini mereka mencoba menyusun kekuatan di setiap medan dan, sebagai hasilnya, makin mempersulit upaya melawan kekuatan bisnis. Kekuatan-kekuatan non-pasar, non-komersial, dan demokrasi pun menjadi kian sulit untuk bertahan.

Tepat ketika neoliberalisme menekan kekuatan non-pasar-lah kita bisa melihat ia bukan hanya suatu sistem ekonomi namun juga sistem politik dan budaya. Di sinilah tampak perbedaannya yang sangat jelas dengan fasisme, yakni serangan tajam atas demokrasi formal dan gerakan sosial yang sengaja dimobilisasi dan didasarkan pada rasisme dan nasionalisme. Neoliberalisme berjalan sempurna dalam sistem demokrasi elektoral resmi, dan ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi, akses, dan forum publik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dikatakan oleh guru neoliberal, Milton Friedman, dalam bukunya *Capitalism and Freedom*, karena meraih keuntungan adalah inti demokrasi, maka semua pemerintahan yang menerapkan kebijakan antipasar berarti antidemokrasi, tak

peduli betapa pun banyaknya dukungan populer yang mampu mereka raih. Oleh karena itu langkah terbaik adalah membatasi peran pemerintah hanya pada perlindungan kepemilikan swasta dan pengawasan kontrak, serta membatasi debat politik hanya pada isu-isu minor. (Permasalahan sebenarnya pada sumber produksi, distribusi, serta organisasi sosial harus ditentukan oleh kekuatan pasar).

Dengan model pemahaman tertentu atas demokrasi, neoliberalis seperti Friedman tidak menyesali kudeta militer atas pemerintahan Allende di Chile yang dipilih secara demokratis pada tahun 1973, karena Allende dianggap mencampuri kendali bisnis yang ada dalam masyarakat Chile. Setelah lima belas tahun masa diktator yang brutal dan kejam—semuanya dilakukan atas nama pasar bebas yang demokratis—demokrasi formal dimunculkan kembali pada tahun 1989 dengan kawalan konstitusi yang menjadikannya jauh lebih sulit—jika toh dimungkinkan—bagi warga negara untuk menentang dominasi bisnis-militer masyarakat Chile. Dan inilah inti dari demokrasi neoliberal: perdebatan remeh-temeh atas-isu minor oleh partai yang pada dasarnya sama-sama mengejar kebijakan pro-bisnis di luar perbedaan formal dan debat kampanye. Demokrasi diperbolehkan sepanjang kendali bisnis dikecualikan dari diskusi atau perubahan. Dengan kata lain, selama itu bukan demokrasi.

Oleh karena itu sistem neoliberal memiliki konsekuensi sampingan yang penting, yaitu warga negara yang terdepolitisasi yang ditandai dengan apatisme dan sinisme. Jika demokrasi elektoral hanya berdampak kecil pada kehidupan sosial, maka tidak masuk akal untuk mencurahkan perhatian terhadap hal ini. Di AS, tempat lahirnya demokrasi neoliberal, tingkat partisipasi publik dalam pemilihan anggota kongres tahun 1998 tercatat sebagai yang terendah, dengan hanya sekitar sepertiga dari pemilih yang berhak yang pergi ke tempat pemungutan suara. Sekalipun kadang-kadang hal ini memunculkan keprihatinan dari partai yang berkuasa seperti Partai Demokrat yang berusaha menarik suara orang-orang yang tersisih, kedatangan sekelompok

kecil pemilih cenderung diterima dan didorong oleh calon-calon kekuatan sebagai sesuatu yang baik karena non-pemilih, seperti bisa diduga, kebanyakan ditemukan di antara kelas miskin dan bekerja. Kebijakan yang dengan cepat mampu meningkatkan minat dan partisipasi pemilih terhambat sebelum mencapai arena publik. Sebagai contoh, di AS dua partai utama yang didominasi bisnis, dengan dukungan kelompok perusahaan menolak untuk mengubah undang-undang yang memungkinkan terbentuknya partai politik baru (yang boleh jadi menarik minat pihak non-bisnis) dan membuatnya efektif. Sekalipun jelas ada ketidakpuasan terhadap Partai Republik dan Demokrat, politik elektoral tetap menjadi pilihan, di mana gagasan mengenai kompetisi dan pilihan bebas hanya sedikit berarti. Dalam beberapa hal, bentuk debat dan pilihan dalam pemilihan neoliberal cenderung lebih mirip dengan pemilihan di negara komunis dengan sistem satu partai daripada demokrasi tulen.

Semua ini hampir tidak menunjukkan implikasi jahat neoliberalisme terhadap budaya politik yang menjadikan kepentingan masyarakat sipil sebagai pusat. Di satu sisi, ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kebijakan neoliberal menghancurkan segala upaya untuk merealisasikan kesetaraan hukum yang diperlukan demi menjaga kredibilitas demokrasi. Perusahaan-perusahaan besar menguasai sumber daya untuk memengaruhi media dan mengatur proses politik untuk melayani mereka. Dalam politik elektoral AS, misalnya, seperempat dari 1% orang terkaya Amerika memberikan 80% dari total kontribusi politik perorangan dan perusahaan hanya membayar pekerja dengan margin sepuluh banding satu. Di bawah neoliberalisme semua hal ini masuk akal, karena pemilihan dianggap mencerminkan prinsip-prinsip pasar, dan kontribusi disamakan dengan investasi. Sebagai hasilnya, situasi ini makin membuat sistem politik elektoral tidak sesuai dengan kepentingan sebagian besar warga. Sementara, pada saat yang sama, sistem politik ini mengukuhkan berbagai peraturan menyangkut perusahaan yang memang tidak pernah dipertanyakan selama ini.

Di sisi lain, agar efektif, demokrasi menuntut agar orang merasakan hubungan dengan sesama warga kelompoknya. Hubungan ini menjelma dalam berbagai organisasi dan lembaga non-pasar. Budaya politik yang kuat memerlukan kelompok komunitas, perpustakaan, sekolah umum, organisasi antartetangga, koperasi, tempat pertemuan publik, perkumpulan sukarelawan, dan persatuan dagang yang menyediakan jalan bagi warga negara untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan warga lainnya. Demokrasi neoliberal, dengan gagasan pasar *über alles*-nya, menjadikan semua ini sebagai tujuan mutlaknya. Alih-alih menciptakan masyarakat sipil, mereka mencetak konsumen. Dan, alih-alih membangun komunitas, mereka membangun pusat perbelanjaan. Hasil akhirnya adalah masyarakat terpecah, yang terbentuk dari individu yang terpisah satu sama lain, tidak memiliki acuan moral, dan tidak memiliki kekuatan sosial.

Kesimpulannya, neoliberalisme adalah musuh pertama dan utama dari demokrasi partisipatif yang sejati. Bukan hanya untuk AS namun juga untuk seluruh planet dan untuk masa depan manusia.

Karena itu, adalah tepat menyebutkan bahwa bahwa Noam Chomsky adalah sosok intelektual utama di dunia dalam perjuangan menegakkan demokrasi dan melawan neoliberalisme. Pada tahun '60-an, Chomsky dikenal sebagai penentang utama Perang Vietnam di AS. Mungkin dia juga pantas disebut sebagai analis paling tajam dari kebijakan luar negeri AS yang memperlemah demokrasi, menindas hak asasi manusia, dan hanya membawa kepentingan segelintir konglomerat. Pada tahun '70-an, Chomsky bersama *co-author*-nya Edward S. Herman memulai riset mereka mengenai bagaimana media massa AS melayani kepentingan elit dan melemahkan kapasitas warga masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka dalam arti sebenarnya dalam ranah demokrasi. Buku mereka pada tahun 1988, *Manufacturing Consent*, menjadi acuan awal bagi setiap penelitian serius mengenai kinerja media massa.

Selama tahun-tahun itu, Chomsky, yang bisa disebut sebagai seorang anarkis atau untuk lebih tepatnya sosialis libertarian, adalah oposan dan kritikus yang vokal, berprinsip, dan konsisten terhadap politik dan partai berpaham Komunisme dan Leninisme. Dia mengajarkan pada banyak orang, termasuk saya, bahwa demokrasi adalah pijakan yang mutlak diperlukan dan diperjuangkan bagi semua masyarakat pascakapitalis. Pada saat yang sama dia menunjukkan absurditas dalam penyamaan kapitalisme dengan demokrasi, serta dalam gagasan bahwa masyarakat kapitalis, bagaimanapun makmurnya, akan membuka akses terhadap informasi atau pengambilan keputusan yang seluas-luasnya. Saya meragukan ada penulis, mungkin selain George Orwell, yang mampu menyamai Chomsky dalam membongkar secara sistematis kemunafikan penguasa dan ideolog komunis dan kapitalis ketika masing-masing mengklaim bahwa merekalah satu-satunya bentuk demokrasi murni yang cocok bagi prinsip kemanusiaan.

Pada tahun '90-an, seluruh karya politis Chomsky—dari anti-imperialisme dan analisis media kritis hingga tulisan mengenai demokrasi dan gerakan buruh—dijalin dalam karya mengenai demokrasi dan ancaman neoliberalisme. Chomsky telah melakukan banyak hal untuk menyegarkan kembali pemahaman mengenai persyaratan sosial yang dibutuhkan untuk demokrasi, sejak jaman Yunani Kuno hingga para pemikir utama dalam revolusi demokratis abad ke-17 dan ke-18. Seperti yang dijelaskannya, tidaklah mungkin untuk menjadi pembela demokrasi partisipatif dan secara bersamaan membela kapitalisme atau sistem lainnya yang membagi masyarakat berdasarkan kelas. Sambil menjelaskan aspek sejarah dari perjuangan untuk menegakkan demokrasi, Chomsky juga menjabarkan bahwa neoliberalisme bukan merupakan gagasan yang sama sekali baru. Itu hanyalah versi terbaru dari perjuangan segelintir orang kaya yang ingin membatasi hingga ke titik minimal hak politis dan kekuatan sipil dari masyarakat luas.

Chomsky juga bisa disebut sebagai kritikus utama atas mitos pasar "bebas" alami, yang selama ini terus-menerus mengumandangkan himne ke dalam benak kita tentang ekonomi yang kompetitif, rasional, efisien, dan adil. Seperti disebutkan Chomsky, pasar sebenarnya nyaris tidak pernah kompetitif. Kebanyakan perekonomian didominasi oleh perusahaan raksasa yang memiliki kontrol amat besar terhadap pasar dan, oleh karena itu, hanya menghadapi perlawanan tak berarti dari buku-buku teks ekonomi dan ceramah para politikus. Lebih jauh, perusahaan sebenarnya adalah organisasi totaliter yang efektif dan beroperasi dalam jalur non demokratis. Perekonomian yang dibangun dengan berpusat di sekitar lembaga-lembaga tersebut benar-benar menguji kemampuan kita dalam membangun masyarakat yang demokratis.

Mitos pasar bebas juga menyebutkan bahwa pemerintah adalah lembaga yang tidak efektif dan harus dibatasi agar tidak mengusik ciri "*laissez faire*" yang alami dari pasar. Sebenarnya, sebagaimana yang ditekankan Chomsky, pemerintah adalah pusat dari sistem kapitalis modern. Mereka dengan sangat murah hati memberi subsidi bagi perusahaan dan bekerja giat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan di berbagai bidang. Perusahaan tersebut, yang menikmati keuntungan dari ideologi neoliberal, seringkali bersikap munafik: mereka menginginkan dan mengharapkan pemerintah menyalurkan pajak mereka dan melindungi pasar mereka dari kompetisi, namun mereka juga ingin memastikan bahwa pemerintah tidak akan membebani mereka dengan pajak atau mendukung pihak-pihak non-bisnis, terutama kelompok pekerja dan kaum miskin. Pemerintah tumbuh lebih besar dari sebelumnya, namun di bawah neoliberalisme mereka tidak lagi bisa berpura-pura peduli dengan menangani kepentingan non-bisnis.

Tidak ada lagi tempat di mana sentralitas pemerintahan dan pembuatan keputusan yang lebih nyata daripada kemunculan perekonomian pasar global. Para ideolog pro-bisnis mengatakan bahwa ekspansi pasar bebas secara alamiah akan melintasi

perbatasan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Globalisasi adalah buah dari pemerintahan yang kuat, terutama di AS, yang menyorongkan dengan paksa perjanjian perdagangan dan kesepakatan demi mempermudah perusahaan dan konglomerat mereka mendominasi perekonomian negara-negara di seluruh dunia tanpa diikuti kewajiban apa pun terhadap penduduk di negara-negara lain tersebut. Proses ini paling jelas tampak dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) di awal '90-an dan sekarang melalui persetujuan rahasia yang dilakukan atas nama Multilateral Agreement on Investment (MAI).

Sesungguhnya ketidakmampuan untuk berdiskusi dan berdebat secara jujur dan terbuka mengenai neoliberalisme adalah ciri yang paling mencolok dari neoliberalisme itu sendiri. Kritik Chomsky mengenai tatanan neoliberal tidak terbatas pada analisis utama yang mempertontonkan kekuatan empiris dan komitmen neoliberal terhadap nilai-nilai demokrasi. Di buku ini analisis Chomsky terhadap sistem doktrin yang diterapkan dalam demokrasi a la kapitalis menemukan relevansinya. Perusahaan media massa, industri kehumasan, kaum ideolog yang berlatar belakang akademik, serta budaya ilmiah yang sengaja dibangun jelas memainkan peran penting dalam membangun "ilusi yang dibutuhkan" agar situasi yang tidak mengenakkan ini tampak rasional, menguntungkan, dibutuhkan dan bahkan didambakan. Sebagaimana ditunjukkan secara samar oleh Chomsky, ini bukanlah konspirasi resmi dari kepentingan-kepentingan yang kuat. Dan memang tidak mesti begitu. Melalui berbagai rupa mekanisme institusional, beragam sinyal dikirim kepada kaum intelektual, para narasumber dan wartawan, untuk mengisyaratkan bahwa *status quo* adalah pilihan terbaik, dan bahwa tidak ada gunanya mempersoalkan mereka yang mendapat keuntungan dari situasi statis tersebut. Karya Chomsky ibarat seruan langsung ke telinga aktivis demokrasi untuk memperbaiki sistem media yang ada sehingga lebih terbuka kepada perspektif dan tuntutan bernada antikorporat dan antineoliberalisme. Karya

Chomsky sekaligus adalah tantangan bagi kaum intelektual, atau setidaknya mereka yang mengaku memiliki komitmen terhadap penegakan demokrasi, untuk secara cermat berkaca dan merenungkan untuk kepentingan siapa, dan demi nilai-nilai yang mana, mereka bekerja selama ini.

Deskripsi Chomsky mengenai neoliberalisme/perusahaan yang begitu dalam menguasai ekonomi, politik, jurnalisme dan kebudayaan kita terasa sangat kuat dan meyakinkan, sehingga beberapa pembaca mungkin merasa terganggu. Dalam era politik yang telah sedemikian jauh kehilangan acuan moral, beberapa orang mungkin tergoda mengambil sikap lebih jauh dengan menyimpulkan bahwa kita tengah terjebak dalam proses kemunduran. Sayangnya lagi, nilai-nilai kemanusiaan yang ada ternyata gagal menciptakan atmosfer yang lebih manusiawi, egaliter, dan juga tatanan sosial yang demokratis.

Kontribusi terbesar Chomsky agaknya adalah penekanannya atas dorongan ke arah demokrasi yang sangat mendasar pada masyarakat dunia, serta potensi revolusioner yang secara implisit terdapat dalam dorongan tersebut. Bukti terbaik dari hal ini adalah arah yang diambil oleh korporat untuk mencegah munculnya demokrasi politik yang sejati. Para penguasa di dunia diam-diam sebetulnya mengerti bahwa sistem yang mereka terapkan hanya menjawab kepentingan segelintir orang, bukan sebagian besar rakyat, dan bahwa pihak yang disebut belakangan ini tidak boleh dibiarkan mempertanyakan atau mengganti peraturan yang ada. Bahkan dalam demokrasi yang pincang sekalipun para anggota korporat tak henti-hentinya bekerja untuk memastikan bahwa isu-isu penting seperti MAI tidak akan diperdebatkan secara terbuka. Masyarakat bisnis juga bahkan bersedia membayar mahal aparat kehumasan untuk meyakinkan publik Amerika bahwa sistem yang ada sekarang adalah yang terbaik di dunia. Saat untuk mengkhawatirkan adanya peluang perubahan sosial ke arah yang lebih baik, menurut logika ini, adalah ketika komunitas bisnis mulai mengabaikan humas, membeli suara dalam pemilihan umum, mengizinkan penerbitan

media representatif, dan dengan gampangnya menerapkan demokrasi yang benar-benar partisipatoris karena mereka tidak lagi mengkhawatirkan kekuatan masyarakat banyak. Namun sejauh ini tampaknya tidak ada alasan untuk mengira bahwa saat itu akan benar-benar tiba.

Pesan terpenting neoliberalisme adalah bahwa tidak ada alternatif bagi *status quo*, dan bahwa kemanusiaan telah mencapai tingkatan tertinggi. Chomsky mencatat bahwa di masa lalu ada beberapa periode yang dirancang sebagai "akhir sejarah". Sebagai contoh, pada tahun '20-an dan '50-an, golongan elit AS mengklaim bahwa sistem yang ada sudah berjalan dan ketenangan yang meliputi masyarakat mencerminkan kepuasan publik terhadap *status quo*. Tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi tak lama setelahnya menampakkan kekeliruan dari kepercayaan itu. Saya menduga bahwa segera saat kekuatan demokratis membukukan kemenangan yang terukur, darah akan kembali mengaliri nadi dan pembicaraan tentang tidak adanya lagi harapan akan perubahan akan bernasib sama dengan fantasi kaum elit yang pernah ada mengenai aturan kejayaan yang dipuja selama satu milenium.

Gagasan bahwa tidak akan ada alternatif superior bagi *status quo* ternyata kini lebih imajinatif dari sebelumnya, dalam era ketika teknologi berkembang secara sangat mengesankan untuk memperbaiki kondisi manusia. Benar bahwa tidak pernah jelas bagaimana menetapkan suatu tatanan pascakapitalis yang bisa bekerja, bebas, dan manusiawi. Gagasan itu bernuansa utopis. Namun setiap kemajuan dalam sejarah, mulai dari penghapusan perbudakan dan penetapan demokrasi untuk mengakhiri kolonialisme formal, harusnya menjadi pelajaran bahwa suatu hal dianggap mustahil hanya karena itu belum pernah dilakukan. Dan sebagaimana ditunjukkan secara implisit oleh Chomsky, aktivitas politik yang terorganisir bertanggung jawab atas bentuk demokrasi yang kita nikmati sekarang, termasuk atas hak pilih, hak-hak perempuan, perserikatan dagang, hak sipil, dan atas kebebasan yang kita nikmati. Bahkan jika gagasan masyarakat

pascakapitalis tampaknya mustahil, kita tahu bahwa aktivitas politis manusia dapat membuat dunia yang kita huni jauh lebih manusiawi. Sampai di titik ini barangkali kita juga akan berpikir untuk membangun sebuah sistem ekonomi politik yang dilandaskan pada prinsip kerja sama, kesetaraan, penguasaan diri, dan kebebasan individual.

Hingga kini perjuangan untuk perubahan sosial bukanlah isu hipotetis. Tatanan neoliberal yang ada saat ini telah memicu krisis politik dan ekonomi dalam skala besar mulai dari Asia Timur hingga Eropa Timur dan Amerika Latin. Kualitas hidup di negara-negara maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika Utara ternyata rapuh dan masyarakatnya tidak bisa disebut teratur. Keresahan sosial yang luar biasa ini menjadi peringatan untuk tahun-tahun dan bahkan dekade mendatang. Ada setumpuk keraguan mengenai akibat dari keresahan semacam ini, dan hanya terdapat sedikit alasan untuk mengira bahwa semua ini akan secara otomatis mengarah pada jalan keluar yang demokratis dan manusiawi. Hal itu akan ditentukan oleh bagaimana kita, manusia, mengorganisir, merespon, dan bertindak. Seperti yang dikatakan Chomsky, jika Anda bertindak seolah-olah tidak ada kemungkinan perubahan ke arah yang lebih baik, Anda akan mendapati bahwa memang tidak ada perubahan menuju kebaikan. Pilihannya terserah pada kita, pada Anda.

Robert W. McChesney
Madison, Wisconsin
Oktober 1998

BAB I
Neoliberalisme dan Tatanan Global

Saya ingin membahas topik-topik yang tercantum dalam judul: neoliberalisme dan tatanan global. Kedua hal ini memiliki arti penting bagi kemanusiaan namun tidak dipahami dengan baik. Untuk memahaminya dengan baik, kita akan mulai dengan memisahkan doktrin dari kenyataan. Kita seringkali mendapati perbedaan yang besar.

Istilah "neoliberalisme" mengesankan suatu sistem prinsip-prinsip yang baru dan sekaligus didasarkan pada gagasan liberal klasik: Adam Smith dianggap sebagai tokoh panutan. Sistem doktrin ini juga dikenal sebagai "Konsensus Washington," yang menyarankan sesuatu mengenai tatanan global. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa gagasan mengenai tatanan global cukup akurat, namun tidak yang lainnya. Doktrin-doktrin tersebut tidak baru dan asumsi dasarnya jauh dari pemikiran yang menggerakkan tradisi liberal sejak Abad Pencerahan.

Konsensus Washington

Konsensus neoliberal Washington adalah suatu rangkaian prinsip-prinsip berorientasi pasar yang dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat bersama lembaga keuangan internasional yang berkuasa. Karena itu konsensus tersebut

bersifat dominan ketika diterapkan dengan berbagai cara pada masyarakat yang rapuh, seringkali dalam bentuk program perubahan struktural yang mengikat. Singkatnya, prinsip dasarnya adalah: liberalisasi perdagangan dan keuangan, biarkan pasar menentukan harga ("dapatkan harga yang tepat"), akhiri inflasi ("stabilitas makroekonomi"), dan privatisasi. Pemerintah seharusnya "keluar dari arena"—demikian juga masyarakat—sejauh pemerintah bersikap demokratis, sekalipun hal ini jarang dikemukakan. Keputusan mereka yang menetapkan "konsensus" ini berdampak besar pada tatanan global. Beberapa analis mengambil posisi yang lebih kuat. Pers internasional menyebut lembaga-lembaga ini sebagai "pemerintah dunia *de facto*" pada "masa penjajahan baru."

Lepas dari akurat atau tidak, penjelasan ini mengingatkan kita bahwa lembaga pemerintahan bukanlah agen independen melainkan refleksi pembagian kekuatan pada masyarakat yang lebih besar. Hal ini sudah menjadi kebenaran sejak masa Adam Smith, yang menunjukkan bahwa "arsitek utama" kebijakan di Inggris adalah "kaum pedagang dan pengusaha". Mereka menggunakan kekuasaan negara untuk menjamin kepentingan mereka sendiri, betapa pun memilukan dampaknya bagi pihak lain termasuk masyarakat Inggris. Yang menjadi kepedulian Smith adalah "kesejahteraan bangsa," namun dia mengerti bahwa "kepentingan nasional" sebenarnya adalah mimpi di siang bolong: dalam suatu "bangsa" ada banyak kepentingan yang sangat bertentangan sehingga untuk memahami kebijakan dan dampaknya kita harus bertanya di mana kekuatan berada dan bagaimana ia dijalankan. Inilah yang disebut sebagai analisis kelas.

"Arsitek utama Konsensus Washington" yang neoliberal adalah tokoh-tokoh ekonomi swasta terutama perusahaan raksasa yang mengendalikan sebagian besar ekonomi internasional dan memiliki pengaruh untuk membentuk kebijakan, pemikiran, dan pendapat. Amerika Serikat memiliki peran khusus dalam sistem neoliberalisme untuk alasan yang jelas. Meminjam kata-kata

sejarahwan diplomasi, Gerald Haines, yang juga sejarahwan senior CIA, "Setelah Perang Dunia II Amerika Serikat berasumsi bahwa mereka, terlepas dari kepentingan pribadi, bertanggungjawab atas kesejahteraan sistem kapitalis dunia." Haines memfokuskan pada apa yang disebutnya "Amerikanisasi Brasil," namun hanya sebagai kasus khusus. Pendapatnya cukup akurat.

Amerika Serikat telah menjadi penumpuk ekonomi dunia jauh sebelum Perang Dunia II, dan selama perang mereka menjadi semakin kuat sementara lawan-lawannya semakin lemah. Perekonomian yang dikendalikan negara selama perang akhirnya mampu mengatasi Depresi Besar. Setelah perang berakhir Amerika Serikat menguasai setengah kekayaan dunia dan menjadi kekuatan adidaya tanpa preseden sebelumnya. Dengan sendirinya, arsitek utama kebijakan bermaksud menggunakan kekuatan ini untuk merancang suatu sistem global demi kepentingan mereka.

Dokumen tingkat tinggi menyebutkan "rezim nasionalis" dan "radikal", terutama di Amerika Latin, sebagai ancaman utama bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Rezim-rezim ini bertanggungjawab atas munculnya tuntutan massa yang menghendaki "peningkatan segera standar hidup yang selama ini rendah di masyarakat" dan pemenuhan kebutuhan domestik. Kecenderungan ini menghambat tumbuhnya "iklim politik dan ekonomi yang kondusif bagi investasi swasta" yang menjanjikan keuntungan bagi negara dan "perlindungan terhadap bahan mentah milik kami"—milik kami, sekalipun berada di tempat lain. Untuk alasan tersebut, George Kennan, ahli perencanaan berpengaruh, menyarankan agar kita "berhenti membicarakan hal-hal yang tidak jelas dan tidak nyata seperti hak asasi manusia, peningkatan standar hidup dan demokratisasi" dan, sebaliknya, "langsung bertindak dengan menggunakan konsep kekuatan yang jelas," serta tidak membiarkan diri "dihambat dengan slogan-slogan idealis" mengenai "altruisme dan keuntungan bagi seluruh masyarakat dunia"—sekalipun slogan-slogan tersebut diakui bagus dan bahkan wajib ada dalam wacana publik.

Saya mengutip catatan rahasia, yang sekarang secara garis besar diketahui secara luas di masyarakat luas atau komunitas intelektual.

"Nasionalisme radikal" dalam dirinya sendiri tidak dapat ditoleransi. Selain itu, dalam arti luas ia juga merupakan "ancaman terhadap stabilitas"—suatu istilah yang diberi makna khusus. Saat Washington bersiap-siap menjatuhkan pemerintahan Guatemala yang pertama kali terpilih secara demokratis pada 1954, staf Departemen Luar Negeri mengingatkan bahwa Guatemala telah "menjadi ancaman yang kian berbahaya bagi stabilitas Honduras dan El Salvador. Reformasi agrarianya merupakan senjata propaganda yang kuat; program sosial besar-besaran yang bertujuan membantu pekerja dan petani dalam perlawanan terhadap kelas atas dan perusahaan asing terkemuka sangat mempengaruhi penduduk negara tetangganya di Amerika Tengah yang memiliki kondisi serupa." "Stabilitas" di sini jelas berarti keamanan bagi "kelas atas dan perusahaan asing besar" yang kesejahteraannya harus dilindungi.

Ancaman terhadap "kelangsungan sistem kapitalis dunia" menjadi pembenaran bagi teror dan tindakan subversif demi menjaga "stabilitas." Salah satu tugas utama CIA adalah ambil bagian dalam upaya besar-besaran melemahkan demokrasi di Italia pada tahun 1948, saat lembaga ini khawatir pemilihan umum akan berlangsung dengan cara yang salah; intervensi militer secara langsung direncanakan jika tindakan subversi ternyata gagal. Upaya ini digambarkan sebagai langkah untuk "menstabilkan Italia." Bahkan juga dimungkinkan untuk melakukan "destabilisasi" dalam upaya meraih "stabilitas." Karena itulah editor jurnal semi-pemerintah, *Foreign Affairs*, menyebutkan bahwa Washington harus "mendestabilisasi pemerintahan Marxis di Chile yang terpilih" karena "kita bertekad menegakkan stabilitas." Dengan pendidikan yang tepat, seseorang dapat mengatasi kontradiksi yang muncul.

Rezim nasionalis yang membahayakan "stabilitas" kadang-kadang digambarkan sebagai "nila setitik" yang dapat "merusak

susu sebelanga," atau "virus" yang dapat "menginfeksi" orang lain. Italia pada tahun 1948 adalah satu contoh. Dua puluh lima tahun kemudian Henry Kissinger menggambarkan Chile sebagai "virus" yang dapat mengirimkan pesan yang salah mengenai kemungkinan arah perubahan sosial, menginfeksi hingga Italia yang tidak kunjung "stabil" bertahun-tahun setelah program-program penting dijalankan CIA untuk mengusik demokrasi Italia. Virus tersebut harus dihancurkan dan yang lain dilindungi dari infeksi: untuk kedua tugas ini, kekerasan seringkali merupakan cara paling efektif, sekalipun menyisakan jejak pembunuhan, teror, penyiksaan, dan kehancuran yang mengerikan.

Dalam rencana rahasia pascaperang, setiap bagian dunia diberi tugas tertentu. "Fungsi utama" Asia Tenggara adalah menyediakan bahan mentah untuk kekuatan industri. Afrika "dieksploitasi" oleh Eropa bagi pemulihan dirinya sendiri. Demikian seterusnya terjadi di seluruh penjuru dunia.

Di Amerika Latin, Washington berharap mampu menerapkan Doktrin Monroe, namun lagi-lagi dalam pengertian tertentu. Presiden Wilson yang terkenal karena idealisme dan prinsip moralnya yang tinggi, diam-diam setuju bahwa "dalam mengadvokasikan Doktrin Monroe, Amerika Serikat seyogyanya tetap mempertahankan kepentingannya." Kepentingan Amerika Latin hanya bersifat "insidental" dan tidak menjadi kepedulian AS. Dia tahu bahwa "ini mungkin berdasarkan pada egoisme semata," namun menyatakan bahwa doktrin tersebut "tidak memiliki motif lain yang lebih tinggi atau lebih besar." Amerika Serikat mencoba menyingkirkan saingan tradisionalnya, Inggris dan Prancis, serta membentuk suatu aliansi regional di bawah kendalinya yang terpisah dari sistem yang ada, di mana pengaturan semacam itu tidak akan diizinkan.

"Fungsi" Amerika Latin dijelaskan dalam suatu konferensi regional pada bulan Februari 1945 ketika Washington mengusulkan "Piagam Ekonomi Amerika" yang akan menghapuskan nasionalisme ekonomi "dalam segala bentuknya."

Para ahli perencanaan pembangunan di Washington paham bahwa tidak akan mudah untuk menerapkan prinsip ini. Dokumen Departemen Luar Negeri mengingatkan bahwa Amerika Latin menuntut "kebijakan yang dirancang untuk memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih luas dan meningkatkan standar hidup penduduk" dan "percaya bahwa penerima pertama dari pembangunan sumber daya negara seharusnya adalah warga negara." Gagasan ini tidak dapat diterima: "penerima pertama keuntungan" sumber daya negara adalah para investor AS, sementara Amerika Latin seharusnya membantu tanpa perlu menuntut hal-hal tak masuk akal seperti kesejahteraan umum dan "pembangunan industri yang berlebihan" yang akan bertentangan dengan kepentingan AS.

Posisi Amerika Serikat tetap bertahan, sekalipun bukannya tanpa masalah dalam tahun-tahun berikutnya, seperti ditunjukkan oleh hal-hal yang tidak perlu saya bahas di sini.

Ketika Eropa dan Jepang pulih dari kehancuran perang, tatanan dunia beralih menjadi pola tiga kutub. Amerika Serikat melanjutkan peran dominannya meskipun tantangan baru muncul, termasuk kompetisi antara Eropa dan Asia Timur di Amerika Selatan. Perubahan terpenting terjadi 25 tahun lalu saat Pemerintahan Nixon menghancurkan sistem ekonomi global pascaperang di mana Amerika Serikat memainkan peran sebagai bankir dunia, suatu peran yang tidak dapat lagi dipertahankan. Tindakan unilateral ini (tentu saja bekerjasama dengan kekuatan lain) mengakibatkan terjadinya pelarian modal secara besar-besaran. Yang sampai saat ini masih mengejutkan adalah perubahan dalam komposisi aliran modal. Pada tahun 1971, 90% transaksi keuangan internasional terkait dengan ekonomi riil—perdagangan atau investasi jangka panjang—dan hanya 10% bersifat spekulatif. Pada tahun 1990 persentase ini terbalik, dan pada tahun 1995 sekitar 95%-nya bersifat spekulatif dengan nilai harian melebihi jumlah simpanan mata uang asing tujuh industri terbesar, yakni lebih dari satu miliar dolar per hari serta

merupakan investasi jangka pendek: sekitar 80% antara seminggu atau kurang.

Para ekonom terkemuka sekitar dua puluh tahun lalu telah mengingatkan bahwa proses ini akan mengarah pada pertumbuhan rendah dan perekonomian yang ditopang oleh pendapatan rendah. Mereka juga menyarankan ukuran yang cukup sederhana untuk mencegah risiko ini. Namun arsitek utama Konsensus Washington memilih dampak yang dapat diprediksi, termasuk keuntungan yang sangat tinggi. Dampak ini diperbesar dengan peningkatan tajam (jangka pendek) pada harga minyak dan revolusi telekomunikasi. Keduanya terkait dengan sektor terbesar perekonomian AS, yang akan saya bahas kemudian.

Negara "Komunis" berada di luar sistem global ini. Pada tahun '70-an, Cina ditarik kembali ke dalam sistem ini. Perekonomian Soviet mulai mengalami kemandekan pada tahun '60-an dan seluruh strukturnya yang besar-namun-bobrok runtuh dua puluh tahun kemudian. Wilayah ini secara keseluruhan kembali ke status sebelumnya. Daerah-daerah yang pernah menjadi bagian Barat kembali bergabung, sementara sebagian besar wilayah lainnya kembali pada sektor jasa seperti sebelumnya, umumnya di bawah mantan birokrat Komunis dan asosiasi lokal perusahaan asing, serta sindikat-sindikat kejahatan. Pola ini umum dijumpai di dunia ketiga, demikian pula keluaran-keluarannya. Di Rusia sendiri, investigasi UNICEF pada tahun 1993 memperkirakan terjadi setengah juta kematian tambahan per tahun sebagai hasil "reformasi" neoliberal yang secara umum didukungnya. Penentu kebijakan sosial Rusia baru-baru ini memperkirakan bahwa 25% populasi berada di bawah tingkat kehidupan yang layak, sementara kalangan penguasa baru meraih kemakmuran luar biasa. Lagi-lagi ini adalah cermin umum ketergantungan terhadap Barat.

Yang juga umum dijumpai adalah dampak kekerasan berskala besar yang dilakukan untuk memastikan "keberlangsungan

sistem kapitalis dunia." Konferensi Jesuit di San[illegible] baru ini menunjukkan bahwa sekian [illegible] memperlemah harapan masyarakat. [illegible] berpikir mengenai "alternatif dari mereka yang [illegible] menggambarkan hal tersebut sebagai [illegible] kebebasan dan demokrasi.

Ini adalah beberapa gambaran kasar [illegible] Konsensus Washington dipaksakan kehadirannya.

Yang Baru dari Neoliberalisme

Sekarang mari kita lihat lebih dekat [illegible] neoliberalisme. Awal yang bagus untuk [illegible] terbitan terbaru dari Royal Institute of [illegible] London yang memuat hasil survei mengenai [illegible] kebijakan pembangunan. Salah satunya [illegible] ekonomi pembangunan. Sang penulis, Paul [illegible], adalah tokoh terkemuka di bidang ini. Dia memiliki [illegible] yang secara langsung menjawab pertanyaan [illegible].

Pertama, pengetahuan mengenai ekonomi pembangunan sangatlah terbatas. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, dua pertiga pertumbuhan pendapatan per kapita [illegible] penyebabnya. Demikian juga kisah keberhasilan Asia [illegible] sejalan dengan "teori umum mengenai kurva-kurva pertumbuhan." Krugman merekomendasikan "kerendahatian" dalam perumusan kebijakan dan kehati-hatian dalam menerapkan "generalisasi berlebihan."

Poin keduanya adalah bahwa kesimpulan [illegible] memiliki dasar kuat terus-menerus disodorkan dan [illegible] landasan doktrinal bagi perumusan kebijakan. Konsensus Washington adalah salah satu contoh kasus.

Poin ketiga, "kebijaksanaan konvensional" [illegible]. Secara teratur ia beralih ke bentuk yang lain. [illegible] menjadi sama sekali berlawanan pada tahap [illegible] perkembangannya—sekalipun para pendukungnya [illegible] percaya diri ketika menerapkan teori yang [illegible].

Poin keempat, ketika ditinjau kembali, secara umum disepakati bahwa kebijakan ekonomi pembangunan tidak "memenuhi tujuan yang ditetapkan" dan didasarkan pada "gagasan buruk."

Jerakhir, Krugman menyatakan adalah lumrah untuk "diperdebatkan bahwa gagasan buruk berkembang untuk membela kepentingan kelompok yang kuat. Tak diragukan lagi bahwa hal itu terjadi."

Bahwa itu terjadi telah menjadi suatu hal yang jelas, setidaknya sejak Adam Smith. Dan ini berlangsung dengan lain istansi yang mengesankan bahkan di negara-negara kaya, seksipun dunia ketiga tetap menyajikan catatan paling buruk.

Inilah inti permasalahannya. "Gagasan buruk" mungkin tidak memenuhi "tujuan yang ditetapkan", namun biasanya ia menjadi gagasan yang sangat *bagus* bagi penggagas utamanya. Ada banyak eksperimen dalam ekonomi pembangunan di era modern ini dengan kepastian yang sulit diabaikan. Salah satunya adalah bahwa perencana cenderung melakukan dengan sangat baik, sementara subjek eksperimen seringkali menjadi pihak yang dirugikan.

Eksperimen besar pertama terjadi dua ratus tahun lalu ketika penguasa Inggris di India membentuk "Kolonisasi Permanen" yang dirancang untuk melakukan hal-hal menakjubkan. Hasilnya ditinjau oleh komisi pemerintah empat puluh tahun kemudian yang menyimpulkan bahwa "kolonisasi dirancang dengan perhatian besar dan perencanaan matang, yang sayangnya menyebabkan kelas bawah mengalami tekanan mengerikan." Kepedihan yang diakibatkan "sulit dicari padanannya dalam sejarah perdagangan," sebagaimana "tulang para penenun kapas telah memutihkan ladang-ladang India."

Namun eksperimen tersebut nyaris tidak dicatat sebagai kegagalan. Gubernur Jenderal Inggris mendapati bahwa "Kolonisasi Permanen," meskipun merupakan kesalahan ditinjau dari berbagai sudut pandang terpenting—tetap memiliki

sisi positif. Setidaknya hal tersebut telah menciptakan kelas tuan tanah kaya yang sangat mendukung berlanjutnya pendudukan Inggris dan memiliki kekuasaan menyeluruh atas banyak orang." Keuntungan lain adalah bahwa investor Inggris meraih kekayaan luar biasa. India juga menutup 40% defisit perdagangan Inggris dengan menyediakan pasar yang terlindungi bagi barang ekspornya, pekerja kontrak khusus untuk Inggris, mengganti populasi budak sebelumnya, dan opium yang merupakan ekspor utama Inggris ke Cina. Perdagangan opium berlangsung di Cina dengan tekanan, bukan sebagai pelaksanaan "pasar bebas" karena prinsip-prinsip pasar yang selama ini diagungkan, diabaikan begitu saja ketika opium dilarang di Inggris.

Singkatnya, eksperimen besar pertama tersebut adalah suatu "gagasan buruk" bagi subjeknya, namun tidak bagi para perencana dan elit lokal yang terkait. Pola ini berlanjut hingga sekarang: menempatkan keuntungan di atas manusia. Konsistensi catatan ini tidak kurang mengesankannya dibanding retorika yang mengelu-elukan—dan sekaligus menyembunyikan fakta sesungguhnya—demokrasi dan kapitalisme sebagai suatu "keajaiban ekonomi". Brasil, misalnya. Dalam sejarah Amerikanisasi Brasil yang sangat dibangga-banggakan, seperti telah saya sebutkan, Gerald Haines menulis bahwa sejak tahun 1945 Amerika Serikat memanfaatkan Brasil sebagai "arena uji coba metode ilmiah modern untuk pembangunan industri yang benar-benar berdasarkan kapitalisme." Eksperimen itu dijalankan dengan "niat terbaik." Investor asing diuntungkan, dan para perencana pembangunan pun "benar-benar percaya" bahwa warga Brasil juga akan diuntungkan. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana yang disebut belakangan ini diuntungkan saat Brasil menjadi "Amerika Latin kesayangan bagi komunitas bisnis internasional" di bawah kepemimpinan militer, meminjam kata-kata pers bisnis, saat Bank Dunia melaporkan bahwa dua pertiga populasi tidak mendapat cukup makanan yang diperlukan untuk aktivitas fisik normal.

Dalam tulisannya tahun 1989, Haines menggambarkan: "Kebijakan Amerika a la Brasil" sebagai "keberhasilan luar biasa," dan "kisah sukses Amerika sebenarnya." Tahun 1989 adalah "tahun keemasan" dalam pandangan dunia bisnis, dengan keuntungan berlipat tiga dibanding 1988, ketika ongkos industri yang saat itu sudah terendah di dunia, turun lagi sekitar 20%. Laporan PBB mengenai Pembangunan Manusia menempatkan Brasil setelah Albania. Saat bencana mulai menghantam kelompok kaya, "metode ilmiah modern untuk pembangunan yang benar-benar dilandaskan pada kapitalisme" (Haines) sekonyong-konyong menjadi bukti keburukan statisme dan sosialisme—transisi cepat lainnya terjadi saat diperlukan.

Untuk menghargai pencapaian ini, harus diingat bahwa Brasil telah lama dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, dengan keunggulan luar biasa, termasuk setengah abad dominasi dan tuntunan oleh Amerika Serikat yang diniatkan baik namun lagi-lagi ternyata hanya menguntungkan segelintir orang dan meninggalkan mayoritas orang dalam kesengsaraan.

Contoh terbaru adalah Meksiko. Negara ini dipuji-puji sebagai pelaksana terbaik Konsensus Washington dan dijadikan model bagi negara lain. Saat upah jatuh, angka kemiskinan meningkat nyaris sama cepatnya dengan jumlah miliuner, modal asing mengalir masuk (sebagian besar bersifat spekulatif dan mengeksploitasi buruh murah yang dikontrol dengan "demokrasi" brutal). Hal yang juga umum terjadi adalah keruntuhan "rumah kartu" (*penerj.*, suatu rancangan yang bergantung pada faktor-faktor tidak stabil yang tidak dapat dikontrol oleh perencananya) pada bulan Desember 1994. Hari ini, setengah dari populasi tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal, sementara orang yang mengontrol pasaran jagung berada dalam daftar miliuner Meksiko, kategori yang dihormati di negara itu.

Perubahan dalam tatanan global juga telah memungkinkan penerapan sebuah versi Konsensus Washington di AS sendiri.

Bagi kebanyakan penduduk AS, pendapatan mereka tetap atau bahkan berkurang selama lima belas tahun terakhir. Demikian juga dengan kondisi dan jaminan kerja. Hal ini berlanjut terus selama pemulihan ekonomi, suatu fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesenjangan membumbung tinggi selama tujuh puluh tahun, jauh melebihi negara industri lain. Amerika Serikat memiliki tingkat kemiskinan anak-anak tertinggi di antara masyarakat industri lain, diikuti oleh negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Catatan ini berlanjut persis seperti daftar masalah yang umum dikenal oleh dunia ketiga. Sementara pers bisnis kesulitan untuk mencari istilah yang tepat untuk menjelaskan pertumbuhan keuntungan yang "memesona" dan "luar biasa " sekalipun diketahui orang-orang kaya pun menghadapi banyak masalah: Kepala berita di *Business Week* menyebutkan "*Masalahnya Sekarang: Apa yang Harus Dilakukan dengan Uang Tunai Tersebut?*" sebagai "pertumbuhan keuntungan" yang "melampaui peti penyimpanan perusahaan Amerika" dan pembagian keuntungan menyebar.

Laba tumbuh "spektakuler" sepanjang pertengahan 1996 dengan pertumbuhan keuntungan yang "mencolok" bagi perusahaan-perusahaan terbesar dunia, sekalipun, seperti diam-diam ditambahkan oleh perusahaan terkemuka, ada "satu wilayah yang tidak banyak dikembangkan oleh perusahaan global, yaitu gaji." Pengecualian ini dilakukan juga oleh perusahaan yang "mengalami tahun sangat baik" dan meraih "keuntungan besar" ketika mengurangi jumlah karyawan tetap dan menggaji pekerja paro waktu tanpa tunjangan atau jaminan apa pun, dan bertingkah laku tepat seperti yang diharapkan dalam kondisi, meminjam istilah pers, "penaklukan modal terhadap pekerja yang telah berlangsung selama lima belas tahun."

Bagaimana Negara Membangun

Catatan sejarah memperlihatkan pelajaran penting. Selama abad ke-18, perbedaan antara dunia pertama dan ketiga jauh lebih kecil dibanding sekarang. Dua pertanyaan yang jelas muncul:

1. Negara mana yang maju, dan mana yang tidak?
2. Dapatkah kita mengidentifikasi beberapa faktor penggerak?

Jawaban atas pertanyaan pertama cukup jelas. Di luar Eropa Barat, dua wilayah utama yang tumbuh: Amerika Serikat dan Jepang—yang merupakan dua wilayah yang lepas dari kolonisasi Eropa. Koloni Jepang adalah kasus lain: meskipun Jepang dahulu merupakan kekuatan kolonial yang brutal, ia tidak merampok koloninya namun membangun mereka, pada tingkat yang sama dengannya.

Bagaimana dengan Eropa Timur? Dalam abad ke-15, Eropa mulai terbagi, wilayah Barat maju sementara wilayah Timur menjadi pelayannya, tetap menjadi dunia ketiga. Pembagian ini semakin tajam hingga awal abad ini saat Rusia melepaskan diri dari sistem. Terlepas dari kekejaman Stalin yang luar biasa dan kehancuran besar-besaran yang disebabkan oleh perang, sistem Soviet mengalami proses industrialisasi yang signifikan. Inilah "dunia kedua, bukan bagian atau pernah menjadi bagian dari dunia ketiga"—hingga 1989.

Kita tahu bahwa hingga tahun 60-an, para pemimpin Barat khawatir pertumbuhan ekonomi Rusia akan menggerakkan "nasionalisme radikal" di tempat lain, sementara yang lainnya mungkin akan sangat menderita akibat serangan penyakit yang menginfeksi Rusia pada tahun 1917, yakni pada saat mereka menolak untuk "melengkapi perekonomian industri di Barat." Demikian dijabarkan oleh sebuah kelompok studi bergengsi mengenai problematika Komunisme pada tahun 1955. Dengan demikian invasi Barat pada tahun 1918 merupakan sebuah tindakan defensif untuk melindungi "kelangsungan sistem kapitalis dunia" yang terusik oleh perubahan sosial yang terjadi di wilayah pendukung. Dan tentu saja ini dijelaskan dalam bahasa ilmiah yang disegani.

Logika perang dingin mengingatkan pada kasus Granada atau Guatemala, meskipun skalanya sangat berbeda sehingga konflik

dapat berakhir dengan sendirinya. Tidaklah mengejutkan bahwa dengan kemenangan pihak lawan yang lebih kuat, pola tradisional muncul kembali. Juga mestinya tidak mengejutkan jika anggaran Pentagon yang tetap sama seperti dalam era perang dingin kini meningkat, padahal kebijakan luar negeri Washington nyaris tidak berubah. Lebih banyak fakta tersedia untuk membantu kita memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai tatanan global.

Kembali ke pertanyaan negara mana yang mengalami kemajuan, setidaknya ada satu kesimpulan yang cukup jelas: pembangunan tergantung pada kemerdekaan dari "eksperimen" yang didasarkan pada "gagasan buruk", yang merupakan gagasan sangat bagus bagi para perancang dan rekan-rekannya. Memang tidak ada jaminan keberhasilan, tapi tampaknya ini adalah syarat yang diperlukan.

Mari kembali ke pertanyaan kedua: Bagaimanakah Eropa dan mereka yang lepas dari kendalinya berhasil dalam pembangunan? Sebagian jawabannya juga jelas: dengan secara radikal menghancurkan doktrin pasar bebas yang selama ini diterima. Kesimpulan ini berlaku dari Inggris sampai wilayah pertumbuhan Asia Timur hari ini, tentunya termasuk Amerika Serikat, pemimpin proteksionisme sejak awal.

Sejarah ekonomi di mana pun mengakui intervensi pemerintah memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dampaknya selalu diremehkan karena fokus yang terlalu sempit. Untuk menyebut satu contoh penting adalah revolusi industri yang bergantung pada kapas murah, terutama dari Amerika Serikat. Komoditi ini dijaga tetap murah dan selalu tersedia bukan karena pengaruh pasar, melainkan pemusnahan warga pribumi dan perbudakan. Tentu saja ada banyak produsen kapas yang lain. Salah satu yang terkemuka adalah India. Kapas India mengalir ke Inggris, sementara industri tekstil India yang maju dihancurkan oleh proteksi dan tekanan Inggris. Kasus lainnya adalah Mesir, yang membangun pada saat yang sama dengan Amerika Serikat namun dihentikan oleh tekanan Inggris dengan alasan yang cukup eksplisit, yakni bahwa Inggris Raya

tidak akan menoleransi pembangunan independen di wilayah itu. Sebaliknya, New England berhasil mengikuti kebijakan negara induknya. Mereka menghadang tekstil Inggris yang lebih murah dengan menerapkan tarif sangat tinggi sebagaimana yang dilakukan Inggris pada India. Tanpa tindakan semacam itu, setengah dari industri tekstil yang sedang berkembang di New England akan hancur, demikian diperkirakan oleh sejarahwan ekonomi, dengan dampak berskala besar pada pertumbuhan industri secara umum.

Contoh kontemporer adalah energi, di mana nyawa perekonomian industri maju bergantung. "Masa Keemasan" pembangunan pascaperang yang bergantung pada minyak murah dan melimpah tetap dipertahankan dengan tekanan atau pendekatan kekuasaan. Demikian seterusnya. Sebagian besar anggaran Pentagon ditujukan untuk menjaga harga minyak di Timur Tengah dalam rentang yang layak menurut Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan energinya. Saya hanya mengetahui satu studi teknis mengenai topik ini: studi ini menyimpulkan bahwa pengeluaran Pentagon untuk mensubsidi 30% harga pasaran minyak menunjukkan "pandangan terbaru bahwa bahan bakar fosil murah adalah benar-benar suatu isapan jempol", demikian disimpulkan oleh penulis. Perkiraan efisiensi perdagangan, serta kesimpulan mengenai pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi, kurang valid jika kita mengabaikan begitu banyak biaya tersembunyi.

Sekelompok ekonom Jepang terkemuka baru-baru ini menerbitkan beberapa volume berisi ulasan mengenai program pembangunan ekonomi Jepang sejak Perang Dunia II. Mereka menunjukkan bagaimana Jepang menolak doktrin neoliberal yang diajarkan oleh penasehat mereka dari AS dan, sebagai gantinya, justru memilih suatu bentuk kebijakan industri yang memberi kekuasaan besar pada negara. Mekanisme pasar berangsur-angsur diperkenalkan oleh birokrasi negara dan konglomerat finansial-industri sebagai prospek bagi peningkatan perdagangan. Penolakan atas prinsip ekonomi ortodoks

merupakan suatu prakondisi bagi terciptanya "keajaiban Jepang," demikian disimpulkan oleh para ekonom tersebut. Keberhasilan tersebut menggerakkan Jepang, atas basis sumber daya, Jepang menjadi pemimpin dunia di bidang perekonomian manufaktur pada dekade '90-an dan sumber investasi asing terkemuka di dunia. Di samping itu Jepang adalah pemilik setengah cadangan dana dunia dan membiayai defisit AS.

Akan halnya bekas jajahan Jepang, sebuah studi ilmiah mengenai misi bantuan AS di Taiwan mendapati bahwa penasehat AS dan para perencana Cina mengabaikan prinsip-prinsip "ekonomi Anglo-Amerika" dan mengembangkan "strategi yang terpusat pada negara," yang bergantung pada "partisipasi aktif pemerintah dalam aktivitas ekonomi di suatu wilayah luas, rencana yang cermat dan pengawasan atas pelaksanaannya." Pada saat yang sama, pemerintah AS "mengiklankan Taiwan sebagai kisah sukses perusahaan swasta."

Di Korea Selatan, "negara pengusaha" berjalan dengan cara berbeda namun tidak lepas dari tuntunan. Saat ini keanggotaan Korea Selatan ke Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development / OECD), klub orang-orang kaya, tertunda akibat keengganannya bergantung pada kebijakan berorientasi pasar seperti mengizinkan pengambilalihan oleh perusahaan asing dan pergerakan modal secara bebas. Ini mirip dengan mentor Jepangnya yang tidak mengizinkan penanaman modal di luar negeri hingga perekonomiannya sendiri mapan.

Dalam terbitan bulan *Research Observer* dari Bank Dunia (Agustus 1996), pimpinan Dewan Penasehat Ekonomi Clinton Joseph Stiglitz, menarik "pelajaran berharga dari Keajaiban Asia Timur," di antaranya "pemerintah adalah penanggung jawab utama atas pertumbuhan ekonomi," meninggalkan "kepercayaan" bahwa pasarlah yang paling tahu apa yang terbaik, dan melakukan intervensi untuk mempercepat alih teknologi, kesetaraan relatif, pendidikan, dan kesehatan, seiring pertumbuhan

dan koordinasi industri. Laporan Pembangunan Manusia PBB tahun 1996 menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam "menyebarkan keterampilan dan memenuhi kebutuhan sosial dasar" sebagai suatu "batu loncatan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan." Doktrin neoliberal, apa pun yang dipikirkan orang tentangnya, menggerogoti pendidikan dan kesehatan, menambah kesenjangan, dan menurunkan pendapatan pekerja; yang kebanyakan tidak dibicarakan secara serius.

Setahun kemudian, setelah perekonomian Asia dihantam secara keras oleh krisis keuangan dan kegagalan pasar, Stiglitz—kini ekonom paling terkemuka di Bank Dunia—kembali menyatakan kesimpulannya (Pembahasan Utama, edisi terbaru, Konferensi Tahunan Bank Dunia Mengenai Pembangunan Ekonomi tahun 1997, Bank Dunia 1998, Wider Annual Lectures 2, 1998). Dia menulis: "Krisis yang terjadi di Asia Timur bukanlah suatu bukti kesalahan dari keajaiban Asia Timur," tulisnya. "Fakta terpenting tetap berlanjut: tidak ada wilayah lain di dunia yang pernah meraih pencapaian begitu dramatis dan menyaksikan begitu banyak orang yang keluar dari kemiskinan dalam waktu singkat." "Pencapaian luar biasa" ini ditandai dengan tumbuhnya pendapatan per kapita hingga sebesar sepuluh kali lipat di Korea Selatan dalam kurun tiga dekade, suatu keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan "partisipasi luar biasa dari pemerintah " dalam menyalahi Konsensus Washington, namun hasilnya menyamai pembangunan ekonomi di AS dan Eropa, tambahnya dengan tepat. "Lepas dari bukti penyimpangan keajaiban Asia Timur," dia menyimpulkan, "guncangan keuangan yang serius" di Asia "sebagian mungkin disebabkan oleh ditinggalkannya strategi-strategi yang selama ini telah bekerja dengan baik di negara-negara ini, termasuk pasar keuangan yang tertata baik". Dengan kata lain, ditinggalkannya strategi yang mengantar pada kesuksesan sebagai respon terhadap tekanan Barat yang sangat kuat. Pakar lain juga mengungkapkan pandangan serupa, bahkan seringkali dengan nada lebih keras.

Perbedaan Asia Timur dengan Amerika Latin cukup jelas. Amerika Latin memiliki catatan kesenjangan terburuk di dunia, sedangkan catatan Asia Timur kebanyakan justru termasuk terbaik. Hal yang sama berlaku untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Impor ke Amerika Latin kebanyakan ditujukan untuk konsumsi orang kaya; sementara di Asia Timur ditujukan untuk investasi produktif. Pelarian modal dari Amerika Latin telah mencapai tingkat debit yang membahayakan; di Asia Timur hal ini dikontrol dengan ketat hingga saat ini. Di Amerika Latin, orang kaya dikecualikan dari kewajiban sosial, termasuk pajak. Masalah Amerika Latin bukanlah "populisme," sebagaimana yang dinyatakan oleh ekonom Brasil, Bressser Pereira, melainkan "penaklukan negara oleh orang kaya." Sementara yang terjadi di Asia Timur sangatlah berbeda.

Perekonomian Amerika Latin juga lebih terbuka bagi penanaman modal asing. Sejak tahun '50-an, seperti dilaporkan analis PBB untuk perdagangan dan pembangunan (UNCTAD), perusahaan multinasional asing telah "menguasai jauh lebih besar saham industri" di Amerika Latin daripada di Asia Timur yang diwarnai cerita sukses. Bahkan Bank Dunia mengakui bahwa investasi asing dan privatisasi yang dicurahkannya "cenderung menggantikan aliran modal" di Amerika Latin, mengalihkan kontrol dan menyalurkan keuntungan ke luar negeri. Bank Dunia juga menyadari bahwa harga-harga di Jepang, Korea, dan Taiwan lebih banyak berbeda dengan harga pasar dibandingkan dengan di India, Brasil, Meksiko, Venezuela, dan negara lain yang diketahui melakukan intervensi. Ini terjadi saat Cina, pemerintahan yang paling banyak melakukan intervensi dan penyimpangan harga, menjadi favorit Bank Dunia dan merupakan negara pengutang yang paling cepat berkembang. Contoh lain, studi-studi yang dilakukan Bank Dunia mengenai Chile telah melewatkan fakta bahwa perusahaan tembaga yang dinasionalisasi adalah sumber utama penerimaan ekspor Chile.

Tampaknya keterbukaan terhadap perekonomian internasional secara signifikan telah membebani Amerika Latin, ditambah dengan kegagalannya dalam mengontrol modal dan orang kaya, bukan hanya tenaga kerja dan orang miskin. Tentu saja ada kalangan di masyarakat yang mendapat keuntungan, seperti dalam era kolonial. Karena itu tidaklah mengejutkan jika mereka begitu mengabdi kepada "agama" ini dan kepada para investor asing.

Peran manajemen dan inisiatif negara dalam keberhasilan ekonomi seharusnya tidak lagi dianggap sebagai hal yang aneh. Sebuah pertanyaan yang terkait adalah bagaimana dunia ketiga menjadi seperti sekarang ini. Isu ini dibicarakan oleh sejarahwan ekonomi terkemuka, Paul Bairoch. Dalam sebuah studi penting yang dilakukannya baru-baru ini, dia menyebut bahwa "tidak diragukan bahwa liberalisme ekonomi yang dipaksakan pada dunia ketiga di abad ke-19 adalah faktor penting yang menjelaskan lambatnya proses industrialisasinya." Selain itu, sebuah kasus yang sangat gamblang di India memperlihatkan bagaimana "proses de-industrialisasi" telah mengubah bengkel kerja industri dan pusat perdagangan dunia berubah menjadi masyarakat agrikultur yang sangat miskin, mengalami penurunan sangat tajam dalam pendapatan, konsumsi pangan dan bahan-bahan kebutuhan sederhana lainnya. Bairoch mengamati bahwa "India hanya korban pertama dalam sebuah daftar yang sangat panjang." Termasuk di dalam daftar tersebut adalah "negara dunia ketiga yang independen secara politis, [yang] dipaksa membuka pasar mereka untuk produk-produk Barat." Pada saat yang sama, masyarakat Barat melindungi diri mereka dari peraturan pasar, dan menjadi maju karenanya.

Bentuk-bentuk Doktrin Neoliberal

Semua penjelasan di atas membawa kita ke ciri penting lainnya dalam sejarah modern. Doktrin pasar bebas muncul dalam dua jenis. Yang pertama adalah doktrin resmi yang diterapkan pada mereka yang tidak berdaya. Doktrin kedua adalah apa yang bisa kita sebut sebagai "doktrin pasar bebas yang

sebenarnya": disiplin pasar baik bagimu, tapi tidak untukku, kecuali untuk keuntungan sesaat. "Doktrin yang sebenarnya" ini berlaku sejak abad ke-17, ketika Inggris Raya tumbuh sebagai negara Eropa paling maju, dengan peningkatan tajam dari pajak dan administrasi publik yang efisien untuk mengatur aktivitas fiskal dan militer dalam negeri, dan menjadi "pelaku tunggal terbesar dalam perekonomian" dan ekspansi globalnya, seperti disebutkan oleh sejarahwan Inggris, John Brewer.

Inggris akhirnya beralih ke internasionalisme liberal—pada tahun 1846, setelah selama 150 tahun proteksionisme, kekerasan, dan kekuasaan negara telah menempatkannya jauh di atas pesaing lain. Namun peralihan ke pasar membutuhkan sejumlah syarat penting. Empat puluh persen tekstil Inggris dijual ke India yang menjadi koloni mereka, demikian juga umumnya dengan ekspor Inggris lainnya. Baja Inggris dihalangi masuk ke pasar AS dengan tarif sangat tinggi, sehingga memungkinkan Amerika Serikat membangun industri bajanya sendiri. Namun India dan koloni lainnya tetap terbuka, dan tetap demikian ketika baja Inggris terlempar dari pasar internasional. India adalah contoh yang baik; ia menghasilkan besi sama banyaknya dengan Eropa pada akhir abad ke-18, dan insinyur-insinyur Inggris mempelajari lebih jauh mengenai teknik pembuatan baja dari India pada tahun 1820 untuk mencoba menjembatani "kesenjangan teknologi." Bombay menghasilkan lokomotif pada level yang kompetitif saat *booming* jalur kereta api dimulai. Namun doktrin pasar bebas menghancurkan sektor industri India ini sebagaimana ia menghancurkan tekstil, pembuatan kapal, dan industri lain yang maju menurut standar ketika itu. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Jepang berhasil melepaskan diri dari kendali Eropa dan mampu mengadopsi model Inggris dalam hal mencampuri pasar.

Ketika kompetisi Jepang terbukti kian sulit dihadapi, Inggris kemudian membatalkan permainan: kerajaan itu sepenuhnya tertutup bagi ekspor Jepang, yang kemudian memicu Perang Dunia II. Kalangan manufaktur India pun meminta perlindungan pada saat yang sama—untuk melawan Inggris, bukan Jepang.

Namun tidak ada keistimewaan semacam itu di bawah doktrin pasar bebas.

Dengan melepaskan versi *laissez faire*-nya yang terbatas pada tahun '30-an, pemerintah Inggris berpaling ke intervensi lebih langsung pada perekonomian domestik. Dalam beberapa tahun produksi mesin meningkat lima kali lipat, seiring perkembangan dalam bidang kimia, baja, penerbangan, dan sejumlah besar industri baru, "gelombang baru yang belum pernah dikenal pada revolusi industri," menurut analis ekonomi Will Hutton. Industri yang dikontrol negara memungkinkan Inggris untuk melampaui produksi Jerman selama perang, bahkan mulai menyaingi AS yang kemudian mengalami ekspansi ekonomi yang dramatis ketika manajer perusahaan mengambil alih kendali perekonomian yang selama perang dipegang oleh negara.

Seabad setelah Inggris beralih ke bentuk internasionalisme liberal, Amerika Serikat mengikuti langkah yang sama. Setelah 150 tahun proteksi dan kekerasan, Amerika Serikat menjadi negara terkaya dan terkuat di dunia dan, seperti Inggris sebelum ini, mulai merasakan manfaat dari "lapangan permainan," di mana mereka dapat menghancurkan setiap pesaing. Namun seperti halnya Inggris, Amerika Serikat menghadapi masalah krusial.

Salah satunya adalah Washington memanfaatkan kekuatannya untuk mencegah pembangunan independen di berbagai tempat, sebagaimana yang telah dilakukan Inggris. Di Amerika Latin, Mesir, Asia Selatan, dan tempat-tempat lain, pembangunan seharusnya diarahkan untuk menjadi "pelengkap," bukan "kompetitor." Juga terjadi campur tangan besar-besaran dalam perdagangan. Sebagai contoh, bantuan Marshall Plan dikaitkan dengan pembelian hasil-hasil pertanian AS. Ini menjelaskan mengapa porsi AS dalam perdagangan palawija dunia meningkat dari kurang dari 10% sebelum perang menjadi lebih dari 50% pada tahun 1950, sementara ekspor Argentina berkurang hingga dua pertiganya. Bantuan Pangan untuk Perdamaian dari AS juga digunakan untuk mensubsidi agribisnis AS, pengapalan, dan untuk menghalangi produsen asing.

Langkah-langkah ini antara lain diambil untuk mencegah pembangunan independen. Penghancuran industri gandum Kolombia dilaksanakan dengan cara-cara seperti ini sehingga mendorong pertumbuhan industri obat bius. Industri haram ini belakangan mengalami percepatan, terutama di wilayah Andean, karena kebijakan neoliberal yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir. Industri tekstil Kenya runtuh pada tahun 1994 ketika Pemerintahan Clinton menetapkan kuota, menghalangi jalur untuk pembangunan yang selama ini ditempuh oleh setiap negara industri, sementara "para reformis Afrika" diingatkan bahwa mereka harus lebih serius dalam memperbaiki kondisi yang diperlukan bagi pelaksanaan bisnis dan "mengunci reformasi pasar bebas" dengan kebijakan perdagangan dan investasi yang memenuhi persyaratan investor Barat.

Itu tadi hanya beberapa keping contoh.

Ada hal lain yang lebih penting sebagai titik tolak untuk menghindari pasar bebas. Salah satu teori dasar perdagangan bebas adalah bahwa subsidi masyarakat tidak diperbolehkan. Namun setelah Perang Dunia II, pemimpin bisnis AS memperkirakan perekonomian akan kembali mengalami depresi jika tidak ada campur tangan pemerintah. Mereka juga bersikeras bahwa industri canggih—terutama pesawat terbang, sekalipun ini berlaku umum—"tidak dapat bertahan dengan baik dalam perekonomian 'pasar' yang murni, kompetitif, tanpa subsidi dan 'bersaing bebas'" dan bahwa "pemerintah adalah satu-satunya penyelamat." Saya mengutip pendapat pers terkemuka, yang mengakui bahwa sistem Pentagon akan menjadi cara terbaik untuk memindahkan biaya ke masyarakat. Mereka memahami bahwa pengeluaran masyarakat mampu memainkan peran stimulatif yang sama, namun ini berbeda dari subsidi langsung bagi sektor swasta. Pengeluaran masyarakat semacam ini memiliki dampak demokratisasi dan dapat didistribusikan kembali. Anggaran militer tidak memiliki kelemahan tersebut.

Selain itu, industri tersebut juga mudah dijual. Menteri Pertahanan Udara Presiden Truman menjelaskan per-

masalahannya dengan sederhana: dia mengatakan "kita seharusnya tidak menggunakan istilah 'subsidi,' istilah yang seharusnya kita pakai adalah 'keamanan.'" Dia meyakinkan bahwa anggaran militer dapat "memenuhi kebutuhan industri pesawat terbang" sebagaimana yang disebutkannya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa pesawat terbang sipil sekarang merupakan ekspor utama negara tersebut, dan industri pariwisata yang memanfaatkan perjalanan udara menjadi sumber keuntungan terbesar bagi negara.

Karenanya cukup tepat jika Clinton memilih Boeing sebagai "model bagi perusahaan di seluruh Amerika". "Visi baru" ini disampaikannya ketika ia berbicara mengenai masa depan pasar bebas pada Pertemuan Puncak Asia Pasifik tahun 1993. Clinton pun tak lupa memuji-muji sistem ini. Contoh bagus mengenai pasar bebas adalah industri pesawat terbang sipil yang sebagian besar kini dipegang oleh dua perusahaan, Boeing-MacDonald dan Airbus, masing-masing memiliki pasar sendiri dan berhasil berkat subsidi publik skala besar. Pola yang sama terjadi dalam industri komputer dan elektronika, mekanika, bioteknologi, komunikasi, dan bahkan nyaris di semua sektor dinamis perekonomian.

Doktrin "kapitalisme pasar bebas yang sebenarnya" tidak perlu dijelaskan lagi pada pemerintahan Reagan. Mereka adalah para pakar yang mengagung-agungkan pasar di hadapan orang miskin seraya dengan bangga mengklaim pada para pelaku bisnis bahwa Reagan telah "memberi lebih banyak bantuan impor bagi industri AS dibanding para pendahulunya selama lebih dari setengah abad"—yang jauh di bawah lumayan, melampaui gabungan semua pendahulu mereka ketika "memimpin perubahan terbesar menuju proteksionisme sejak tahun '30-an," komentar *Foreign Affairs* dalam tinjauannya atas kondisi pada dekade tersebut. Tanpa hal-hal tersebut serta langkah-langkah intervensi pasar yang ekstrim lainnya, diragukan bahwa industri baja, otomotif, alat produksi, atau semikonduktor mampu bertahan menghadapi persaingan Jepang atau mampu memimpin

dalam teknologi baru dengan dampak luas pada perekonomian. Pengalaman tersebut sekali lagi menggambarkan bahwa "kebijaksanaan konvensional" sebenarnya "penuh lubang," seperti disebutkan oleh sebuah tinjauan lain mengenai tindakan Reagan dalam catatan *Foreign Affairs*. Namun kebijaksanaan konvensional memiliki keunggulan sebagai senjata ideologis untuk mendisiplinkan mereka yang tak memiliki pertahanan.

Baik Amerika Serikat maupun Jepang telah mengumumkan program besar baru pendanaan pemerintah untuk teknologi maju (masing-masing untuk penerbangan dan semikonduktor) guna mendukung sektor industri swasta dengan subsidi masyarakat.

Untuk menggambarkan "teori pasar bebas sebenarnya" dengan ukuran yang berbeda, sebuah studi ekstensif mengenai perusahaan transnasional (TNC) oleh Winfried Ruigrock dan Rob van Tulder mendapati bahwa "sebenarnya semua perusahaan terkemuka di dunia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan/atau hambatan perdagangan dalam strategi dan posisi kompetitif mereka," dan "setidaknya dua puluh perusahaan dalam *Fortune 100* tahun 1993 tidak mampu bertahan sama sekali sebagai perusahaan independen jika tidak ditolong oleh pemerintah masing-masing" dengan cara mengumumkan kerugian atau, lebih sederhana, melalui pengambilalihan oleh pemerintah ketika berada dalam masalah. Salah satunya adalah pengusaha terkemuka di distrik Gingrich yang sangat konservatif, Lockheed, yang diselamatkan dari kehancuran dengan jaminan pinjaman pemerintah yang sangat besar. Studi tersebut juga mencatat bahwa intervensi pemerintah yang lebih "merupakan peraturan yang berlaku umum daripada pengecualian selama dua abad ini telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan penyebaran berbagai inovasi produk dan proses—khususnya dalam industri pesawat terbang, elektronika, pertanian modern, teknologi material, energi, dan teknologi transportasi." Hal yang sama terjadi juga pada teknologi telekomunikasi dan informasi secara umum (Internet dan World Wide Web adalah contoh baru yang mencolok), dan pada masa sebelumnya pada industri tekstil,

baja, dan tentu saja energi. Kebijakan pemerintah "menjadi suatu dorongan besar dalam membentuk strategi dan daya saing perusahaan-perusahaan terbesar dunia." Studi-studi teknis lainnya mendukung kesimpulan ini.

Ada banyak lagi yang dapat dikatakan mengenai hal ini, namun ada satu kesimpulan yang cukup jelas: doktrin yang disepakati ini dibentuk dan dilaksanakan demi kekuatan dan keuntungan. "Eksperimen" kontemporer mengikuti pola umum ini ketika mereka mengambil bentuk "sosialisme bagi yang kaya" dalam satu sistem merkantilisme perusahaan global di mana "perdagangan" pada dasarnya berarti transaksi yang dikelola secara terpusat dalam sebuah perusahaan, lembaga raksasa berhubungan dengan pesaing mereka melalui aliansi strategis. Kesemuanya adalah tirani dalam struktur internal, dirancang untuk menggembosi pengambilan keputusan secara demokratis dan untuk melindungi para pemilik dari disiplin pasar. Sementara mereka yang miskin dan tak berdayalah yang harus diatur dalam doktrin yang ketat ini.

Mungkin kita juga bertanya seberapa "global" perekonomian sebenarnya dan seberapa banyak peluang terbuka bagi demokrasi populer untuk mengontrolnya. Dalam hal perdagangan, arus keuangan, dan ukuran-ukuran lainnya, perekonomian tidak lebih global dari awal abad ini. Lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan transnasional sangat bergantung pada subsidi publik dan pasar domestik, serta pada transaksi internasional mereka –termasuk perdagangan ilegal yang kebanyakan terjadi di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat di mana tidak ada kekhawatiran akan terjadi kudeta militer dan sejenisnya. Ada banyak hal yang yang baru dan penting, namun anggapan akan terjadi hal-hal "yang tak terkendali" tidak terlalu beralasan, bahkan jika kita tetap berpegang pada mekanisme yang sudah ada.

Apakah memang wajar jika kita berpegang pada hal-hal ini? Tidak jika kita menganggap serius doktrin-doktrin liberalisme klasik. Pandangan Adam Smith mengenai pemisahan tenaga kerja telah umum diketahui, namun tidak demikian halnya dengan

pendapatnya mengenai dampak tidak manusiawinya yang mengubah kelas pekerja menjadi objek "sebodoh dan setolol yang mungkin dialami oleh seorang manusia." Itu adalah hal yang tidak boleh dibiarkan terjadi "dalam setiap masyarakat yang maju dan beradab". Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah dorongan destruktif yang diakibatkan oleh "tangan tak terlihat." Yang juga tidak banyak diketahui adalah keyakinan Smith bahwa "peraturan pemerintah yang memihak pada para pekerja sebenarnya selalu adil dan menyetarakan" sekalipun itu tidak "memihak kepentingan para pemilik." Pandangan Smith lainnya yang tidak populer adalah seruannya akan kesetaraan pendapatan, yang merupakan inti dari pendapatnya mengenai pasar bebas.

Pemikir terkemuka lainnya mengenai hukum liberal klasik mengambil sikap lebih jauh lagi. Wilhelm von Humboldt mengutuk kesalahan pegawai sendiri: ketika ia bekerja di bawah kontrol pihak luar, "kita mungkin menghargai apa yang dia lakukan, namun kita mengingkari kemanusiaannya." Atau, seperti diungkapkan Alexis de Tocqueville, "seni berkembang, seniman memudar." Sebagai tokoh besar aliran liberal, Tocqueville sepakat dengan Smith dan Jefferson bahwa kesetaraan pendapatan merupakan ciri penting masyarakat yang bebas dan adil. Seratus enam puluh tahun lalu, dia telah mengingatkan akan bahaya "kondisi kesenjangan permanen" dan akhir bagi demokrasi jika "aristrokrasi pabrikan yang tumbuh di depan mata kita" di Amerika Serikat, "yang paling brutal yang pernah ada di dunia," tumbuh melebihi batas-batas wilayahnya—sebagaimana yang benar-benar terjadi kemudian dan melampaui mimpi terburuknya.

Saya baru sekilas mengacu pada permasalahan yang rumit dan menarik yang saya pikir melukiskan bagaimana prinsip-prinsip utama liberalisme klasik terwujud dalam bentuk modernnya, bukan dalam bentuk "kepercayaan" neoliberal, melainkan dalam gerakan independen kelas pekerja, gagasan serta praktik gerakan sosialis libertarian, seperti berkali-kali dicetuskan

juga oleh tokoh pemikir terkemuka lainnya di abad ke-20 seperti Bertrand Russell dan John Dewey.

Kita harus mengevaluasi dengan hati-hati doktrin yang mendominasi wacana intelektual dengan memperhatikan secara seksama argumen, fakta-fakta, dan pelajaran dari sejarah masa lalu dan juga masa kini. Adalah tidak masuk akal untuk menanyakan apa yang "benar" bagi negara-negara tertentu seolah mereka merupakan entitas yang memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Dan apa yang mungkin benar bagi warga Amerika Serikat, yang memiliki sejumlah keuntungan yang tidak dimiliki negara lain, bisa jadi salah bagi mereka dengan lingkup pilihan yang lebih sedikit. Tapi bagaimanapun kita dapat memperkirakan bahwa apa yang benar bagi warga dunia paling jauh hanya bersesuaian dengan garis besar pemikiran para "arsitek utama" kebijakan. Dan tidak ada alasan untuk mengizinkan mereka—dulu maupun yang akan datang—untuk membentuk masa depan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Versi artikel ini semula diterbitkan di Amerika Selatan dalam bahasa Spanyol dan Portugis tahun 1996.

BAB II
Persetujuan tanpa Kesepakatan: Kontrol atas Pemikiran Publik

Masyarakat yang cukup demokratis seharusnya didasarkan pada prinsip "permusyawaratan rakyat." Gagasan ini diterima secara luas namun ia bisa menjadi terlalu kuat atau terlalu lemah. Terlalu kuat, karena ia menyarankan bahwa rakyat harus diatur dan dikendalikan. Terlalu lemah, sebab bahkan penguasa yang paling brutal pun masih memerlukan "permusyawaratan rakyat" dan umumnya mereka mendapatkannya, tidak hanya secara paksa.

Saya tertarik pada bagaimana masyarakat yang lebih bebas dan demokratis menghadapi masalah-masalah ini. Selama bertahun-tahun, kekuatan masyarakat mencoba memperbesar porsinya dalam pengelolaan kepentingan mereka. Dalam beberapa hal mereka cukup berhasil, meski kegagalan dialami di sana sini. Sementara itu kerangka pemikiran dibangun untuk membenarkan kekebalan elit terhadap demokrasi. Mereka yang ingin memahami masa lalu dan membentuk masa depan akan memberi perhatian penuh bukan hanya pada pelaksanaannya, namun juga pada kerangka doktrin yang mendukungnya.

Permasalahan ini dimunculkan 250 tahun lalu oleh David Hume dalam karya klasiknya. Hume terusik oleh betapa "mudahnya orang banyak diatur oleh segelintir individu, dan

kepasrahan tersirat yang membuat orang menyerahkan" nasib mereka ke tangan penguasa. Inilah yang menurut Hume mengejutkan, sebab "kekuatan biasanya berada di rakyat." Jika rakyat menyadari hal tersebut, mereka akan bangkit dan menggulingkan pemimpin mereka. Maka ia pun menyimpulkan bahwa pemerintah ditegakkan di atas kontrol terhadap pemikiran—suatu prinsip yang berlaku "pada pemerintahan yang paling otoriatarian dan militeristik, namun juga yang paling bebas dan populer."

Hume jelas meremehkan keefektifan tekanan kekerasan. Versi yang lebih akurat adalah pemerintah yang lebih "bebas dan populer" justru yang makin bergantung pada kontrol opini untuk memastikan kepatuhan pada pemerintah.

Bahwa rakyat harus patuh adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memberi persetujuan, tapi tidak lebih dari itu. Dalam istilah pemikiran progresif modern, rakyat bisa menjadi "pengamat," namun bukan "partisipan," dan terpisah dari para pemimpin yang sesekali mempertontonkan kekuatan sebenarnya. Itu adalah arena politis. Masyarakat seluruhnya harus dikeluarkan dari arena ekonomi yang banyak menentukan apa yang terjadi di masyarakat. Di sini, menurut teori demokrasi yang berlaku, publik tidak boleh memiliki peran.

Asumsi ini ditentang sepanjang sejarah, namun permasalahan ini sudah muncul sejak kebangkitan demokrasi modern pertama pada abad ke-17 di Inggris. Kekacauan yang terjadi saat itu seringkali digambarkan sebagai konflik antara Raja dengan Parlemen. Namun, seperti yang sering terjadi, sebagian besar rakyat tidak ingin diatur oleh salah satu dari kekuatan yang bersaing itu, melainkan oleh "rakyat biasa seperti kita, yang mengetahui keinginan-keinginan kita." Karena itu pamflet-pamflet rakyat menyatakan, bukan oleh "ksatria dan bangsawan" yang tidak "mengerti penderitaan rakyat" dan akan "menekan kita."

Gagasan-gagasan semacam itu benar-benar mengusik "orang-orang terbaik" menurut istilah mereka sendiri, atau "orang yang bertanggungjawab" dalam istilah modern. Mereka dipersiapkan untuk memenuhi hak-hak rakyat namun dalam batasan tertentu dan berdasarkan prinsip bahwa dengan kata "rakyat," kita tidak memaksudkan gerombolan orang yang kebingungan dan tak terpelajar. Tapi bagaimanakah prinsip dasar kehidupan sosial dipadukan dengan doktrin "permusyawaratan rakyat" yang tidak mudah untuk ditaklukkan? Satu solusi untuk pertanyaan ini diusulkan oleh sejawat Hume, Frances Hutcheson, juga seorang filsuf moral terkemuka. Dia berpendapat bahwa prinsip "permusyawaratan rakyat" tidak dilanggar ketika pemerintah melaksanakan rencana yang ditolak oleh rakyat, kalau kemudian massa yang "bodoh" dan "berprasangka" akan "sangat setuju" pada apa pun yang telah dilakukan atas nama mereka. Kita bisa mengadopsi prinsip "persetujuan tanpa kesepakatan," istilah yang kemudian digunakan oleh sosiolog Franklin Henry Giddings.

Hutcheson prihatin atas kendali yang diterapkan kepada atas warga lokal; sementara Giddings prihatin atas pemaksaan tatanan di luar negeri. Dia menulis mengenai Filipina yang dibebaskan oleh tentara AS yang pada saat bersamaan juga membebaskan ribuan jiwa dari kesengsaraan—atau sebagaimana yang ditulis media, "membantai pribumi dengan cara Inggris" sehingga "makhluk-makhluk sesat" yang menentang kita setidaknya bisa "menghormati senjata kita" dan kemudian mengetahui bahwa kita mengharapkan "kemerdekaan" dan "kebahagiaan" mereka. Untuk menjelaskan semua ini dalam bahasa yang beradab, Giddings merumuskan konsepnya dengan "persetujuan tanpa kesepakatan": "Jika dalam tahun-tahun ke depan, [orang-orang yang ditaklukkan] melihat dan menerima bahwa sengketa yang terjadi adalah untuk kebaikan bersama, mungkin masuk akal jika pihak yang berkuasa diatur dengan permusyawaratan rakyat," sebagaimana orangtua mencegah anaknya berlari ke jalan besar yang ramai.

Penjelasan ini mencakup makna sebenarnya dari doktrin "permusyawaratan rakyat." Rakyat harus patuh pada pemerintah mereka dan cukuplah mereka menyetujui tanpa harus sepakat. Di negara tiran atau negara-negara asing, kekerasan dapat digunakan. Ketika sumber kekerasan dibatasi, permusyawaratan rakyat harus didapatkan dengan cara "membentuk kesepakatan" melalui opini yang progresif dan liberal.

Industri hubungan masyarakat yang besar, sejak kemunculannya di awal abad ini memang didedikasikan untuk "mengontrol pemikiran publik." Penjelasan ini diberikan sendiri oleh para pemimpin bisnis ketika mendeskripsikan tugas kehumasan. Dan mereka bertindak sesuai dengan kata-katanya, yang pasti merupakan salah satu tema sentral sejarah modern. Fakta bahwa industri hubungan masyarakat berakar dan berkantor pusat di negara yang "paling bebas" adalah hal yang bisa dipahami, tentu dengan pemahaman yang memadai mengenai pendapat Hume.

Beberapa tahun setelah tulisan Hume dan Hutcheson terbit, masalah yang ditimbulkan oleh rakyat di Inggris menyebar ke koloni yang memberontak di Amerika Utara. Para bapak bangsa mengulangi sentimen tentang "orang terbaik" a la Inggris dengan kata-kata yang nyaris sama. Salah satunya menyatakan: "Ketika saya menyebut publik, yang saya maksud hanya mereka yang rasional saja. Mereka yang tidak terdidik dan kasar tidak cocok untuk menilai model [pemerintahan], sebagaimana mereka tidak mampu untuk mengelola pemerintahan[nya]." Koleganya, Alexander Hamilton, menambahkan: "Rakyat adalah 'binatang liar' yang harus dijinakkan." Petani pemberontak dan independen harus dididik, kalau perlu dengan kekerasan, bahwa gagasan dalam pamflet-pamflet revolusioner tidak boleh ditanggapi dengan serius. Masyarakat awam tidak cocok untuk diwakili oleh orang-orang seperti mereka yang memahami penderitaan rakyat, namun oleh para bangsawan, pedagang, pengacara, dan "orang-orang yang bertanggungjawab" yang bisa dipercaya untuk melindungi hak istimewa mereka.

Doktrin yang dipercaya banyak orang ini dinyatakan dengan jelas oleh John Jay, Presiden Kongres Kontinental dan Hakim Agung Mahkamah Agung yang pertama: "Orang-orang yang memiliki negara berhak mengaturnya." Tapi ada satu masalah yang harus dijelaskan: Siapa yang memiliki negara? Pertanyaan tersebut terjawab dengan munculnya perusahaan-perusahaan swasta dan struktur yang dirancang untuk melindungi dan mendukung perusahaan, sekalipun menjadi sangat sulit untuk memaksa masyarakat tetap berperan sebagai pengamat.

Amerika Serikat tentu merupakan kasus terpenting untuk dipelajari jika kita ingin memahami dunia hari ini dan esok. Salah satu alasannya adalah kekuatannya yang tak tertandingi dan demokrasinya yang stabil. Lebih jauh lagi, Amerika Serikat nyaris merupakan contoh sempurna *tabula rasa* yang bisa ditemukan. Amerika dapat menjadi "sebahagia seperti yang diinginkannya," atau, mengutip kata-kata Thomas Paine pada tahun 1776: "ia [Amerika] adalah lembar kosong yang siap untuk ditulisi." Masyarakat pribumi disingkirkan secara besar-besaran. AS juga memiliki hanya sedikit peninggalan struktur a la Eropa, satu alasan bagi kelemahan relatif kontrak sosial dan sistem pendukungnya yang berakar di lembaga prakapitalis. Tatanan sosial politik yang dirancang dengan cermat dan cakupannya sangat luas. Dalam mempelajari sejarah sesecorang tidak dapat mengkonstruksikan pengalaman, namun Amerika Serikat hampir bisa disebut sebagai "kasus ideal" tentang demokrasi di negara kapitalis yang bisa ditemukan.

Perancang utamanya adalah seorang pemikir politik yang cerdas: James Madison, yang pandangannya diterapkan secara luas. Dalam perdebatan mengenai Konstitusi, Madison menunjukkan bahwa jika pemilihan umum di Inggris "terbuka bagi semua kelas, maka kepemilikan para tuan atas tanah akan menjadi tidak aman. Hukum agraria harus segera disusun," untuk memberikan lahan pada mereka yang tidak memilikinya. Konstitusi harus dirancang untuk mencegah ketidakadilan dan

"mengamankan kepentingan negara yang permanen" yaitu hak kepemilikan.

Di antara para pengikut Madison ada kesepakatan bahwa "Konstitusi pada dasarnya adalah suatu dokumen aristokratis yang dirancang untuk memeriksa kecenderungan demokrasi dalam satu periode," menyerahkan kekuatan pada orang-orang yang "lebih baik," dan menyingkirkan mereka yang tidak kaya, memiliki asal usul baik, atau memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kekuatan politis (Lance Banning). Tanggung jawab utama pemerintah, seperti dinyatakan Madison, adalah "melindungi minoritas kaya dari golongan mayoritas." Inilah prinsip utama sistem demokrasi sejak kemunculannya hingga hari ini.

Dalam diskusi publik, Madison berbicara mengenai hak-hak minoritas secara umum, namun cukup jelas bahwa dia menyimpan pengertian sendiri mengenai minoritas di benaknya: "minoritas kaya." Teori politik modern meneguhkan keyakinan Madison bahwa "dalam pemerintahan yang adil dan bebas, hak-hak kepemilikan dan pribadi seharusnya dijaga sungguh-sungguh." Namun dalam kasus ini juga bermanfaat untuk memandang doktrin ini dengan lebih hati-hati. Tidak ada hak *atas* barang, yang ada hanya hak *kepada* barang: yaitu hak orang-orang yang memiliki properti. Mungkin saya memiliki hak atas mobil saya, namun mobil saya tidak memiliki hak. Hak kepada barang juga berbeda dengan hak-hak lainnya di mana kepemilikan seseorang atas barang mencegah orang lain dari kepemilikan kepada barang yang sama: jika saya memiliki mobil ini, Anda tidak dapat memilikinya; namun dalam masyarakat yang adil dan bebas, kebebasan berbicara saya tidak akan membatasi kebebasan Anda. Karena itu, prinsip Madison adalah pemerintah harus melindungi hak atas rakyat secara umum, namun harus menyediakan jaminan khusus dan tambahan perlindungan bagi suatu kelompok warga, yaitu para pemilik properti.

Madison meramalkan bahwa ancaman terhadap demokrasi akan semakin parah seiring dengan berjalannya waktu karena

meningkatnya "jumlah mereka yang bekerja di bawah bayangan tuntutan hidup yang sangat keras dan diam-diam mengharapkan pemerataan berkah." Yang ditakutkan Madison adalah mereka ini bakal berpengaruh. Dia prihatin dengan "gejala peningkatan semangat" yang kian nyata dan mengingatkan tentang "bahaya yang akan terjadi" jika hak pilih memberikan "kekuatan atas properti pada beberapa orang yang tidak memiliki saham di dalamnya." Mereka yang "tidak memiliki properti, atau bahkan sekadar harapan untuk memperolehnya, tidak bisa diharapkan untuk cukup memahami hak ini," jelas Madison. Solusi yang ditawarkannya adalah tetap meletakkan kekuatan politis di tangan mereka yang "berasal dari kelompok kaya dan menjadi contoh kemakmuran negara," yakni "kelompok orang-orang yang lebih mampu", sementara masyarakat umum tetap dibiarkan terpecah dan tidak teratur.

Tentu saja, masalah "peningkatan semangat" juga muncul di luar negeri. Kita banyak belajar mengenai "teori demokrasi yang sebenarnya" dengan melihat bagaimana permasalahan ini dipahami, terutama dalam dokumen rahasia di mana para pemimpin biasanya lebih jujur dan terbuka.

Ambil Brasil, "raksasa dari Selatan," sebagai contoh penting. Pada kunjungan tahun 1960, Presiden Eisenhower meyakinkan rakyat Brasil bahwa "sistem perusahaan swasta kami yang memiliki kepedulian sosial akan menguntungkan semua orang, pemilik, dan pekerja. Dalam kebebasan, pekerja Brasil dengan gembira menunjukkan kebahagiaan hidup di bawah sistem demokratis." Duta besar menambahkan bahwa pengaruh AS telah menghancurkan "tatanan lama di Amerika Selatan" dengan membawa "gagasan-gagasan revolusioner seperti pendidikan dasar gratis, kesetaraan di muka hukum, masyarakat yang relatif tanpa kelas, pemerintahan demokratis dan bertanggungjawab, perusahaan yang bersaing secara bebas, [dan] standar kehidupan luar biasa bagi rakyat."

Namun rakyat Brasil bereaksi buruk terhadap berita baik yang dibawa oleh tutor mereka dari utara ini. Menteri Luar

Negeri AS, John Foster Dulles, menyatakan pada Dewan Keamanan Nasional bahwa kalangan elit Amerika Latin "seperti anak-anak yang tidak memiliki kapasitas untuk memerintah diri sendiri." Parahnya lagi, Amerika Serikat "luar biasa tertinggal dibanding Soviet dalam mengontrol pikiran dan emosi rakyat yang sangat awam." Dulles dan Eisenhower menyatakan keprihatinan mengenai "kemampuan Komunis untuk mengendalikan gerakan massa," yakni suatu kemampuan yang "tidak dapat kita tiru": "Rakyat miskin adalah subjek yang disukai, dan mereka selalu ingin merampok orang kaya."

Dengan kata lain, sulit untuk meyakinkan orang untuk menerima doktrin kita bahwa orang kayalah yang seharusnya merampok yang miskin, suatu masalah hubungan masyarakat yang belum dapat diatasi.

Pemerintahan Kennedy menghadapi masalah tersebut dengan mengalihkan misi militer Amerika Latin dari "pertahanan regional" menjadi "keamanan internal," suatu keputusan yang membawa konsekuensi fatal, dimulai dengan kudeta militer yang brutal dan berdarah di Brasil. Aksi militer dipandang Washington sebagai suatu "kewarasan" di Brasil dan kudeta tersebut diterima oleh Duta Besar Lincoln Gordon sebagai "kerusuhan demokratis" yang merupakan "kemenangan tunggal terpenting dalam kebebasan di pertengahan abad ke-20." Sebagai ekonom terkemuka dari Universitas Harvard, Gordon menambahkan bahwa "kemenangan kebebasan"—yaitu penggulingan demokrasi parlementer dengan kekerasan—seharusnya "menciptakan iklim yang jauh lebih baik bagi investasi swasta." Dengan demikian ia memberikan beberapa pandangan yang lebih jauh dalam memahami makna operatif dari *kebebasan* dan *demokrasi*.

Dua tahun kemudian, Menteri Pertahanan Robert McNamara mengatakan kepada para koleganya bahwa "kebijakan AS pada militer Amerika Latin secara keseluruhan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk AS." Kebijakan-kebijakan ini telah meningkatkan "kapabilitas keamanan internal"

dan memantapkan "dominasi pengaruh militer AS." Militer Amerika Latin memahami tugas-tugasnya dan dipersenjatai untuk mematuhi AS berkat program bantuan dan pelatihan militer yang diberikan pemerintahan Kennedy. Tugas-tugas ini termasuk penggulingan pemerintah sipil "ketika menurut penilaian militer tindakan para pemimpin membahayakan kesejahteraan negara." Para penasehat ahli Kennedy menjelaskan tindakan militer semacam itu diperlukan di "lingkungan budaya Amerika Latin." Dan kita yakin bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan baik, karena sekarang militer Amerika Latin telah mencapai "pemahaman dan orientasi mengenai tujuan AS." Hal itu menjamin hasil yang sesuai bagi "perjuangan revolusioner untuk meraih kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang membentuk struktur kelas yang ada saat ini" di Amerika Latin—suatu hasil yang akan melindungi "investasi swasta" dan perdagangan AS. Dengan kata lain ekonomilah yang menjadi akar "kepentingan politis AS di Amerika Latin."

Ini semua berasal dari dokumen rahasia liberalisme Kennedy. Wacana publik yang berkembang sudah barang tentu berbeda. Jika kita mengacu pada hal ini, kita hanya akan sedikit memahami makna sebenarnya dari "demokrasi" atau tentang tatanan global, baik di masa silam maupun masa depan, jika yang memegang kendali masih tangan yang sama.

Kajian yang lebih serius mengungkap lebih jelas tentang fakta-fakta dasar. Keamanan Dalam Negeri yang ditanamkan dan didukung oleh Amerika Serikat dibahas dalam buku penting karya Lars Schoultz, salah seorang pakar terkemuka mengenai Amerika Latin. Tujuan pendekatan ini, menurut Schoultz, adalah "memusnahkan sekali untuk selamanya ancaman yang membahayakan struktur sosial ekonomi yang berjalan dengan cara menghapuskan partisipasi politik mayoritas penduduk," – yang oleh Hamilton disebut "binatang liar." Pada dasarnya tujuannya sama saja dengan di dalam negeri AS, sekalipun cara-caranya berbeda.

Pola ini berlanjut sampai sekarang. Pemenang dalam lomba pelanggaran hak asasi manusia di wilayah itu adalah Kolombia, yang juga merupakan penerima utama bantuan dan pelatihan militer AS selama beberapa tahun terakhir. Dalihnya adalah "perang melawan narkotika," namun itu sebenarnya "mitos" sebagaimana dilaporkan oleh kelompok utama pembela hak asasi manusia, gereja, dan kelompok lainnya yang menyelidiki fakta mengejutkan mengenai kekejaman dan hubungan karib antara pengedar obat, para tuan tanah, militer, dan rekan paramiliter mereka. Teror pemerintah telah meremukkan organisasi demokratis dan menghancurkan satu-satunya partai politik independen melalui pembunuhan ribuan aktivis, termasuk kandidat presiden, walikota, dan lainnya. Meski demikian Kolombia dipuji sebagai suatu model demokrasi yang stabil. Lagi-lagi ini menjelaskan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata "demokrasi."

Satu contoh yang sangat jelas adalah reaksi atas pengalaman pertama Guatemala dalam berdemokrasi. Dalam kasus ini, tersedia cukup catatan rahasia sehingga kita mengetahui cukup banyak mengenai pemikiran yang mengarahkan kebijakan. Pada tahun 1952, CIA mengingatkan bahwa "kebijakan radikal dan nasionalis" dari pemerintah meraih "dukungan atau persetujuan dari hampir seluruh rakyat Guatemala." Pemerintah telah "menggerakkan kelas petani yang lembam secara politis" dan menciptakan "dukungan massa bagi rezim sekarang" melalui organisasi pekerja, reformasi agraria, dan kebijakan-kebijakan lain yang "dikaitkan dengan revolusi tahun 1944, yang "telah membangkitkan" gerakan nasional yang cukup kuat untuk membebaskan Guatemala dari kediktatoran militer, keterbelakangan sosial, dan 'kolonialisme ekonomi' yang telah menjadi pola di masa lampau." Kebijakan pemerintahan demokratis "mendorong kesetiaan dan sesuai dengan kepentingan pribadi rakyat Guatemala yang memiliki kesadaran politik." Agen rahasia Departemen Luar Negeri melaporkan bahwa kepemimpinan demokratis "bersikeras mempertahankan

sistem politik terbuka" sehingga memungkinkan Komunis untuk "memperluas wilayah kerja mereka dan secara efektif mempengaruhi berbagai sektor masyarakat." Kelemahan demokrasi ini diatasi dengan kudeta militer pada tahun 1954 dan berbagai teror, yang selalu mendapat dukungan besar-besaran dari AS.

Masalah mengamankan "persetujuan" juga muncul di lembaga-lembaga internasional. Pada awalnya, PBB merupakan alat kebijakan AS yang berharga dan benar-benar dihormati. Namun dekolonisasi membuahkan apa yang disebut "tirani mayoritas." Sejak tahun '60-an, Washington memimpin dalam penggunaan hak veto atas resolusi Dewan Keamanan (Inggris dan Prancis masing-masing di urutan kedua dan ketiga). Mereka memveto sendiri atau bersama beberapa negara sekutunya untuk menentang resolusi Majelis Umum. PBB jatuh dalam antipati dan beberapa artikel yang muncul dengan muram mulai mempertanyakan mengapa dunia "menentang Amerika Serikat"; padahal sangkaan bahwa Amerika Serikat mungkin memusuhi dunia terlalu janggal untuk ditanggapi. Hubungan AS dengan Majelis Dunia (World Court) dan lembaga internasional lainnya telah menjalani evolusi serupa. Kita akan membahas ini kemudian.

Komentar saya mengenai latar belakang Madisonian dalam konsep demokrasi tidak imbang dalam satu hal penting. Seperti Adam Smith dan pendiri liberalisme klasik lainnya, Madison pada dasarnya adalah pra-kapitalis dan sebenarnya menyimpan hasrat antikapitalis. Dia mengharapkan bahwa yang menjadi penguasa adalah "Negarawan yang tercerahkan" dan "filsuf agung" "yang kebijaksanaannya akan mengungkapkan secara sangat baik kepentingan negara mereka yang sebenarnya." Mereka akan "memperbaiki" dan "memperluas" "cakrawala publik," menjaga kepentingan negara dari "ancaman" mayoritas demokratis, namun dengan pencerahan dan kemurahan hati.

Madison segera berubah, ketika "minoritas kaya" memanfaatkan kekuatan baru mereka seperti telah diprediksi oleh

Adam Smith beberapa tahun sebelumnya. Mereka tertarik untuk mengejar apa yang disebut Smith sebagai "pendapat jahat" para pemimpin: "Semua untuk kita dan tidak ada yang tersisa untuk orang lain." Pada tahun 1792 Madison mengingatkan bahwa kemunculan negara kapitalis pembangunan berarti "mengganti kewajiban publik dengan kepentingan swasta," yang mengarah pada "dominasi nyata segelintir orang terhadap kebebasan orang banyak." Dia menyatakan "kerusakan moral yang sangat mencolok dalam sejarah" ketika kekuatan swasta "menjadi kelompok pendukung pemerintah—menjadi alat dan tiran sekaligus; disogok oleh orang kaya pendukungnya, dipuja, dan atau mendapat itu semua." Mereka melemparkan ilusi ke masyarakat yang kita sebut "politik," demikian komentar oleh John Dewey. Sebagai salah satu filsuf besar abad ke-20 dan tokoh utama liberalisme di Amerika Utara, Dewey menekankan bahwa demokrasi hanya memiliki sedikit peran ketika bisnis besar mengatur kehidupan negara melalui kontrol atas "alat produksi, pertukaran, publikasi, transportasi, dan komunikasi, yang diperkuat lagi oleh pers, agen media serta sarana publikasi dan propaganda lainnya." Lebih jauh dia mengatakan bahwa dalam masyarakat yang bebas dan demokratis, pekerja harus menjadi "penentu nasib industri mereka sendiri," bukannya alat yang disewa oleh majikan. Gagasan ini bisa dirunut kembali ke liberalisme klasik dan Abad Pencerahan dan terus-menerus muncul kembali dalam perjuangan menegakkan demokrasi di Amerika Serikat dan di tempat-tempat lain.

Ada banyak perubahan dalam dua ratus tahun terakhir, namun peringatan Madison menjadi makin sesuai dan memiliki makna baru dengan mapannya tiran swasta raksasa sejak awal abad ini dengan kekuasaannya yang luar biasa dan dijamin oleh lembaga peradilan. Teori-teori yang disusun untuk membenarkan "entitas hukum," sebagaimana disebut oleh sejarahwan resmi, didasarkan pada gagasan yang sama yang mendasari fasisme dan Bolshevisme: entitas organik memiliki hak melebihi dan atas masyarakat. Mereka menerima

"keistimewaan" luar biasa dari negara-negara yang mereka dominasi atau, dalam istilah Madison, menjadi "alat dan tiran" sekaligus. Mereka meraih kontrol kuat atas perekonomian domestik dan internasional, serta atas sistem informasi dan doktrin. Hal ini memicu keprihatinan Madison yang lain: bahwa "Pemerintah yang demokratis, tanpa informasi merata atau sarana untuk memperolehnya adalah Awal Lelucon atau Tragedi; atau malah keduanya."

Sekarang mari kita lihat lagi doktrin yang dibentuk untuk memperkuat sosok modern demokrasi politis. Edward Bernays, salah seorang tokoh terkemuka di bidang kehumasan, secara cukup akurat mengomentari hal ini dalam sebuah buku penting mengenai industri kehumasan. Dia memulai dengan pengamatan bahwa "manipulasi yang disengaja dan cerdas atas kebiasaan dan opini massa merupakan elemen penting dalam masyarakat yang demokratis." Untuk melaksanakan tugas dasar ini, "kelompok minoritas yang cerdas harus memanfaatkan propaganda secara terus menerus dan sistematis" karena hanya merekalah yang "memahami proses mental dan pola sosial massa" dan mampu "mengurai benang merah yang mengendalikan pemikiran publik." Oleh karena itu, "masyarakat kita telah sepakat untuk mengizinkan persaingan bebas diatur oleh kepemimpinan dan propaganda,"—sebuah kasus lain mengenai "persetujuan tanpa kesepakatan." Propaganda memberikan mekanisme "membentuk pemikiran massa" kepada pemimpin sehingga "mereka akan menggunakan kekuatan yang baru diraih ke arah yang diinginkan." Kepemimpinan dapat "mengendalikan pemikiran publik sama seperti militer mengendalikan tubuh prajuritnya." Proses "rekayasa persetujuan" adalah "esensi terpenting dari proses demokrasi," tulis Bernays singkat sebelum ia dianugerahi *American Psychological Association* pada tahun 1949 atas jasa-jasanya.

Pentingnya "mengendalikan pemikiran publik" semakin dipahami ketika perjuangan masyarakat berhasil memperluas modalitas demokrasi sehingga meningkatkan apa yang disebut

para elit liberal sebagai "krisis demokrasi." Ini terjadi ketika masyarakat biasanya yang pasif dan apatis berubah menjadi terorganisir dan mulai memasuki arena politik untuk mengejar keinginan dan tuntutan mereka serta, dengan demikian, mengusik stabilitas dan tatanan. Sebagaimana dijelaskan Barney, "karena hak pilih dan pembelajaran universal, kelas borjuis kini berdiri ketakutan di hadapan masyarakat umum. Karena masyarakat luas dijanjikan untuk menjadi raja," suatu kecenderungan yang untungnya dibalik—sehingga bukan dijanjikan melainkan diharapkan—menjadi metode baru untuk "membentuk pemikiran massa" yang disusun dan dapat diimplementasikan.

Sebagai tokoh liberal New Deal (*penerj.* kebijakan perekonomian Presiden Roosevelt yang diterapkan selama tahun 1933-1940) yang baik, Bernays mengasah kemampuannya di Komite Woodrow Wilson untuk Informasi Publik (Woodrow Wilson's Committee on Public Information), badan propaganda resmi AS yang pertama. Dalam tulisannya yang berjudul "Propaganda" Bernays mengatakan "keberhasilan propaganda yang luar biasa selama perang yang telah membuka mata beberapa individu cerdas dalam masyarakat mengenai pentingnya membentuk pemikiran publik." Para individu cerdas itu mungkin tidak menyadari bahwa "keberhasilan luar biasa" mereka banyak ditentukan oleh rancangan propaganda mengenai kekejaman Hun yang dikeluarkan oleh Kementerian Informasi Inggris, yang diam-diam mendefinisikan tugasnya sebagai "mengarahkan pemikiran sebagian besar warga dunia."

Semua ini berasal dari doktrin Wilson, atau yang lebih dikenal sebagai "idealisme Wilson" dalam teori politik. Pandangan Wilson sendiri menganggap bahwa orang-orang elit dengan "gagasan yang lebih maju" diperlukan untuk menjaga "stabilitas dan keadilan." "Orang-orang yang bertanggungjawab" yang terdiri dari minoritas terpelajar yang harus mengendalikan pembuatan keputusan, sebagaimana dijelaskan Walter Lippmann, veteran lain dalam komite propaganda Wilson dalam esainya yang

terkenal mengenai demokrasi. Lippmann juga merupakan sosok yang paling disegani dalam jurnalisme AS dan seorang komentator terkemuka dalam masalah publik selama lebih dari setengah abad. Lippmann menambahkan, minoritas terpelajar adalah "kelas khusus" yang bertanggungjawab dalam menetapkan kebijakan dan "pembentukan opini publik yang canggih." Mereka harus terbebas dari campur tangan masyarakat umum, yang merupakan "pihak luar yang tak terdidik dan suka ikut campur." Publik harus "didudukkan di tempat mereka," Lippmann melanjutkan: "fungsi" mereka adalah sebagai "pengamat kegiatan" bukan partisipan, kecuali pada saat pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih anggota "kelas khusus." Pemimpin harus bebas untuk bergerak dalam "perlindungan teknokrasi"—meminjam istilah baru Bank Dunia.

Dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*, Harold Laswell, salah satu pelopor ilmu politik modern, mengingatkan bahwa kalangan terpelajar harus mengetahui "ketidaktahuan dan kebodohan masyarakat" dan tidak menyerah pada "dogma demokrasi bahwa seseorang adalah penentu terbaik keinginannya." Mereka bukanlah penentu terbaik, melainkan kita. Massa harus dikontrol demi kebaikan mereka sendiri dan dalam masyarakat yang lebih demokratis, saat tidak ada kekuasaan, manajer sosial harus berpaling pada "sebuah teknik kontrol yang sama sekali baru, terutama melalui propaganda."

Perhatikan bahwa ini sebenarnya adalah doktrin Leninis. Kesamaan antara teori demokrasi progresif dengan Marxisme-Leninisme cukup mencolok, sesuatu yang telah diprediksi Bakunin jauh sebelumnya.

Dengan pemahaman cukup mengenai konsep "persetujuan," kita bisa melihat bahwa penerapan agenda bisnis dengan menundukkan masyarakat umum dilakukan "lewat persetujuan rakyat," suatu bentuk "persetujuan tanpa kesepakatan." Ini adalah deskripsi yang adil mengenai apa yang terjadi di Amerika Serikat. Seringkali terbentang jarak antara keinginan publik dengan

kebijakan publik. Dalam tahun-tahun terakhir, jarak ini kian membesar. Upaya perbandingan akan menyoroti lebih jauh pelaksanaan sistem demokrasi.

Lebih dari 80% masyarakat AS berpikir bahwa pemerintah "berlangsung demi keuntungan segelintir orang dan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk rakyat," meningkat dari 50% pada tahun-tahun sebelumnya. Lebih dari 80% masyarakat percaya bahwa sistem ekonomi "pada dasarnya tidak adil" dan para pekerja hanya memiliki sedikit peran atas apa yang berlangsung di dalam negeri. Sementara itu lebih dari 70% merasa bahwa "bisnis memegang kekuasaan terlalu besar atas terlalu banyak aspek dalam kehidupan rakyat Amerika." Dan sekitar satu dari dua puluh orang percaya bahwa perusahaan "adakalanya harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk memperbaiki kondisi pekerja dan komunitas mereka."

Posisi publik tetap dapat disebut sosial demokratis dalam beberapa hal penting, sebagaimana yang terjadi selama masa pemerintahan Reagan, dan ini bertentangan dengan sebagian besar mitos. Namun kita juga harus ingat bahwa posisi ini ada karena kurangnya gagasan untuk menggerakkan revolusi demokratis. Kalangan pekerja pada abad ke-19 di Amerika Utara tidak pernah menyerukan pemerintah agar bertindak lebih baik. Alih-alih, mereka menolak hak penguasa untuk memerintah. "Mereka yang bekerja di pabrik seharusnya menjadi pemilik," seru pers pekerja, menggemakan tujuan revolusi Amerika seperti yang dipahami oleh kalangan bawah.

Pemilihan anggota kongres tahun 1994 merupakan contoh jelas kesenjangan antara retorika dengan fakta. Peristiwa itu disebut sebagai "gempa bumi politik," suatu "kemenangan besar," "kesuksesan konservatisme" yang mencerminkan berlanjutnya "gerakan ke kanan" ketika para pemilih memberikan "mandat demokratis besar-besaran" pada golongan ultrakanan Newt Gingrich yang berjanji untuk "menyingkirkan pemerintah" dan membawa kembali hari-hari bahagia saat pasar bebas berkuasa.

Kembali ke fakta, "kemenangan besar" didapat dengan meraih sekitar setengah dari suara yang masuk, dengan sekitar 20% pemilih elektoral, yang nyaris tidak berbeda dari dua tahun sebelumnya saat partai Demokrat menang. Satu dari enam pemilih menggambarkan hasilnya sebagai "suatu pembenaran atas agenda kaum Republikan." Satu dari empat orang hanya mendengar tentang Perjanjian dengan Amerika, yang memuat agenda tersebut. Dan pada saat diberi tahu, kebanyakan warga masyarakat menentang agenda tersebut. Sekitar 60% publik menginginkan anggaran sosial ditingkatkan. Satu tahun kemudian, 80% berpendapat bahwa "pemerintah federal harus melindungi kelompok yang paling lemah di masyarakat, terutama orang miskin dan manula, dengan menjamin standar hidup minimum dan menyediakan jaminan sosial." Sebanyak 80% hingga 90% rakyat Amerika mendukung jaminan federal bagi mereka yang tidak dapat bekerja, asuransi bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, subsidi untuk obat yang diresepkan, dan perawatan di rumah jompo, yaitu level minimum perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Tiga perempat mendukung bantuan federal untuk pengasuhan anak dari ibu yang bekerja dengan pendapatan rendah. Keinginan masyarakat untuk perbaikan kondisi ini tampak mencolok dibanding serbuan propaganda yang nyaris tanpa henti untuk meyakinkan publik bahwa mereka menginginkan hal yang sama sekali berbeda.

Studi-studi terhadap opini publik menunjukkan bahwa semakin pemilih mempelajari program Partai Republik di Kongres, semakin mereka menentang partai dan program legislatifnya. Penjaga gawang revolusi, Newt Gingrich, tidak begitu populer pada saat "kejayaannya," dan makin terpuruk sesudahnya. Ia bahkan bisa disebut tokoh politik yang paling tidak populer. Salah satu aspek yang paling menggelikan dalam pemilu tahun 1996 adalah ketika rekan terdekat Gingrich berusaha keras mengingkari kaitan antara sang pemimpin dengan gagasannya sendiri. Dalam pemilihan pendahuluan (*primary*)[1] kandidat pertama yang langsung tenggelam begitu muncul adalah Phil

Gramm, calon tunggal dari Partai Republik, yang didukung dana melimpah dan mengumbar semua janji yang mungkin akan menarik hati para pemilih, dengan mengacu pada *headline* koran. Pada kenyataannya, hampir semua isu politik menghilang dengan cepat pada saat para kandidat harus menghadapi para pemilih pada bulan Januari 1996. Contoh yang paling dramatis adalah menyeimbangkan anggaran. Sepanjang tahun 1995, isu utama di dalam negeri AS adalah secepat apa pemerintah harus melakukannya, tujuh tahun atau mungkin sedikit lebih lama. Beberapa kali roda pemerintahan terpaksa lumpuh saat kontroversi ini merebak. Segera setelah pemilihan pendahuluan dimulai, pembicaraan mengenai anggaran pun menguap. *Wall Street Journal* melaporkan dengan nada terkejut bagaimana para pemilih "telah melupakan obsesi mereka mengenai penyeimbangan anggaran." Padahal, "obsesi" para pemilih sebenarnya adalah kebalikannya, sebagaimana secara rutin ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat: Penentangan mereka terhadap penyeimbangan anggaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi realistis minimal.

Tepatnya, sebagian anggota masyarakat berbagi "obsesi" dengan kedua partai politik dalam penyeimbangan anggaran. Pada bulan Agustus 1995, 5% penduduk menganggap defisit sebagai masalah negara yang paling penting, sejajar dengan masalah tunawisma. Namun di antara 5% yang terobsesi dengan anggaran secara kebetulan termasuk mereka yang memiliki kepentingan langsung. "Kalangan bisnis Amerika mengatakan: seimbangkan anggaran federal," tulis *Business Week* ketika melaporkan hasil jajak pendapat yang dilakukan di kalangan eksekutif senior. Dan ketika pebisnis angkat bicara, begitu juga kalangan politik dan media, yang memberi informasi kepada publik bahwa publiklah yang menuntut anggaran diseimbangkan dan perincian pemotongan anggaran sosial sesuai keinginan publik—dan di atas segalanya sebagaimana ditunjukkan hasil jajak pendapat. Tidak mengejutkan jika topik tersebut tiba-tiba menghilang dari

pandangan secepat para politikus harus menghadapi musuh yang sesungguhnya.

Juga tidak mengejutkan bahwa agenda penyeimbangan anggaran tersebut terus dikerjakan dengan standar ambigu, disertai pemotongan anggaran sosial yang telak dan, pada saat yang sama, peningkatan anggaran Pentagon. Keduanya ditentang keras oleh publik, namun mendapat dukungan kuat dari kalangan bisnis. Alasan peningkatan anggaran dengan mudah dapat dimengerti kalau kita memahami peran domestik Pentagon, yakni menyalurkan dana masyarakat untuk mendorong sektor industri canggih, sehingga para pendukung Newt Gingrich yang kaya, misalnya, dapat dilindungi dari kerasnya mekanisme pasar dengan lebih banyak mendapat subsidi pemerintah dibanding masyarakat di daerah pinggiran di dalam negeri (yakni di luar pemerintahan federal sendiri). Sementara itu para pemimpin revolusi konservatif menentang pemerintahan yang gemuk dan memuji individualisme yang tangguh.

Sejak awal telah jelas diketahui dari jajak pendapat bahwa kisah tentang kemenangan besar kaum konservatif adalah tidak benar. Kini kebohongan tersebut diam-diam mulai diakui. Seorang pakar jajak pendapat yang menyoroti Gingrich dari Partai Republik menjelaskan bahwa ketika ia melaporkan sebagian besar rakyat mendukung Perjanjian dengan Amerika sebenarnya hanya berarti mereka menyukai slogan yang digunakan untuk mengemasnya. Sebagai contoh, studinya menunjukkan bahwa publik menentang penghapusan sistem kesehatan dan ingin "mengamankan, melindungi, dan memperkuat"-nya "untuk generasi mendatang." Di sini penghapusan dikemas sebagai "suatu solusi yang mengamankan dan melindungi" sistem kesehatan untuk generasi mendatang. Secara umum artinya sama saja.

Semua ini sangat wajar dalam masyarakat, bahkan meskipun terjadi sampai tingkat yang tidak biasa, yaitu bisnis berjalan dengan pengeluaran besar-besaran untuk pemasaran: satu triliun

dolar per tahun, atau seperenam dari GDP, dan sebagian besar bebas pajak. Sehingga pada dasarnya rakyat membayar hak istimewa untuk menjadi sasaran manipulasi atas tingkah laku dan sikap para pebisnis.

Namun binatang buas tersebut tetap sulit dijinakkan. Berulang kali orang dibuat percaya bahwa masalah ini sudah diatasi dan "akhir sejarah" telah sampai dengan dicapainya utopia para pembesar. Salah satu momen klasik adalah ketika muncul doktrin neoliberal pada awal abad ke-19, yakni ketika David Ricardo, Thomas Malthus, dan tokoh besar ekonomi klasik lainnya mengumumkan bahwa pengetahuan baru—yang sepasti hukum Newton—telah terbukti, bahwa kita hanya membahayakan kaum miskin kalau kita mencoba menolong mereka. Mereka berpendapat bahwa hadiah terbaik yang bisa ditawarkan kepada rakyat yang menderita adalah membebaskan mereka dari impian muluk bahwa mereka memiliki hak untuk hidup. Pengetahuan baru membuktikan bahwa orang tidak memiliki hak di luar apa yang dapat mereka capai dalam bursa tenaga kerja yang tidak diatur. Tampaknya pada tahun 1830-an doktrin ini cukup luas diyakini di Inggris. Dengan berjayanya pemikiran kanan dalam industri manufaktur dan keuangan di Inggris, warga Inggris "didorong untuk mengikuti jalan utopia". Hal ini diungkapkan oleh Karl Polanyi dalam karya klasiknya *The Great Transformation* lima puluh tahun lalu. Polanyi menambahkan, ini merupakan "tindakan paling kejam dalam reformasi sosial" sepanjang sejarah yang terbukti "menghancurkan begitu banyak kehidupan." Namun masalah yang tak terduga muncul. Massa yang bodoh membuat kesimpulan bahwa jika kami tidak memiliki hak untuk hidup maka kamu tidak memiliki hak untuk memerintah. Akibatnya angkatan bersenjata Inggris harus menghadapi pemberontakan dan kekacauan. Ancaman yang makin besar datang ketika para pekerja mulai mengorganisir diri menuntut kebijakan perusahaan dan undang-undang sosial agar melindungi mereka dari eksperimen neoliberal yang brutal. Bahkan seringkali pula

tuntutannya lebih dari itu. Ilmu pengetahuan, yang untungnya fleksibel, berubah bentuk ketika opini kalangan elit berubah untuk merespon desakan masyarakat luas yang tidak terkendali. Ilmu pengetahuan juga menemukan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh kontrak sosial atau sejenisnya.

Sepanjang sisa abad tersebut, tampaknya banyak tatanan telah diperbarui, sekalipun beberapa kalangan menentangnya. Seniman terkenal, William Morris, bertindak menentang arus dengan menyatakan dirinya sebagai sosialis dalam sebuah pidatonya di Oxford. Dia mengetahui bahwa "sudah menjadi pendapat yang diterima bahwa sistem persaingan atau sistem 'Setan sebagai pemilik kata akhir' adalah sistem perekonomian terakhir yang akan dilihat dunia; inilah sistem yang paling sempurna dan tujuan telah dicapai." Namun jika sejarah benar-benar berakhir, dia melanjutkan, maka "peradaban akan mati." Ia menolak untuk mempercayai hal ini, meskipun ia menyatakan diri sebagai "orang yang paling terdidik." Dan memang, seperti ditunjukkan oleh perlawanan rakyat, Morris benar adanya.

Di Amerika Serikat, Gay Nineties seabad lalu dipuji sebagai "kesempurnaan" dan "finalitas." Dan melalui Roaring Twenties diasumsikan bahwa pekerja telah dihancurkan selamanya dan impian para pemimpin telah dicapai—dalam "Amerika yang paling tidak demokratis" yang "didirikan di atas protes pekerjanya," komentar sejarahwan Universitas Yale, David Montgomery. Namun lagi-lagi perayaan itu terlalu dini. Beberapa tahun kemudian binatang liar kembali lepas dari kandangnya dan bahkan Amerika Serikat, negara yang *par excellence* dikemudikan oleh bisnis mendapat perlawanan dari masyarakat luas yang ingin memperoleh kembali hak-haknya yang pernah mereka miliki di bawah sistem yang otokrat.

Menyusul usainya Perang Dunia II, kalangan bisnis meluncurkan propaganda besar-besaran untuk meraih milik mereka yang pernah hilang. Pada akhir '50-an, diasumsikan bahwa tujuan telah diraih. Daniel Bell, sosiolog Harvard, menulis bahwa kita telah mencapai "akhir ideologi" dalam dunia industri.

Beberapa tahun sebelumnya, sebagai editor *Fortune*, sebuah jurnal bisnis terkemuka, dia melaporkan tentang propaganda bisnis skala "besar" yang dirancang untuk mengatasi sikap sosial demokratis yang bertahan dalam tahun-tahun pascaperang.

Namun sekali lagi kesimpulan itu datang terlalu cepat. Kejadian-kejadian selama tahun '60-an menunjukkan bahwa makhluk liar tetap berkeliaran, kembali memunculkan ketakutan atas demokrasi di antara "orang-orang yang bertanggung jawab." Komisi Trilateral, didirikan oleh David Rockefeller pada tahun 1973, menjadikan tema "krisis demokrasi" dalam dunia industri—yang diibaratkan sebagai sebuah arena raksasa tempat masyarakat mencoba memasuki arena publik—sebagai tema pertama studi pentingnya. Orang awam mungkin menganggap hal itu sebagai satu langkah menuju demokrasi, namun Komisi paham bahwa ini adalah "demokrasi yang berlebihan" dan mereka berharap untuk mengembalikan hari-hari ketika "Truman mampu memerintah negara hanya dengan kerjasama dengan beberapa pengacara dan bankir Wall Street," seperti komentar reporter Amerika. Hal tersebut dipandang sebagai "penyederhanaan demokrasi." Yang dikhawatirkan oleh Komisi adalah apa yang mereka sebut sebagai kegagalan tanggung jawab lembaga-lembaga seperti sekolah, universitas, dan gereja untuk melakukan "indoktrinasi terhadap kaum muda". Komisi mengusulkan cara-cara seperti pemulihan disiplin, membuat masyarakat umum menjadi pasif dan patuh, untuk mengatasi krisis demokrasi.

Komisi itu mewakili kelompok berwawasan internasional yang progresif dalam hal pengaruh dan kehidupan intelektualnya. Mereka tidak hanya ada di Amerika Serikat, tetapi juga Eropa dan Jepang. Pemerintahan Carter hampir seluruhnya dibentuk oleh kelompok ini. Sayap kanan mengambil posisi garis keras.

Sejak tahun '70-an, perubahan dalam perekonomian internasional memberikan senjata baru ke tangan para penguasa yang memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan menyingkir

dari kontrak sosial yang mereka benci dan dimenangkan oleh perjuangan populer. Spektrum politisnya di Amerika Serikat selalu sangat dangkal dan bahkan telah dihilangkan hingga nyaris tak kentara. Beberapa bulan setelah Bill Clinton menjabat, berita utama di *Wall Street Journal* menyatakan kegembiraannya bahwa "setelah serangkaian masalah, Clinton dan pejabatnya berada di sisi yang sama dengan perusahaan Amerika." Hal ini membangkitkan sukacita para pimpinan perusahaan besar yang menyatakan bahwa "kita merasa cocok dengan pemerintahan yang sekarang ini dibanding yang sebelumnya."

Setahun kemudian para pimpinan bisnis mendapati bahwa mereka dapat bekerja dengan lebih baik, dan pada bulan September 1995 *Business Week* melaporkan bahwa Kongres yang baru "meletakkan tonggak bersejarah bagi bisnis: Belum pernah terjadi sebelumnya ada begitu banyak keuntungan menyirami pengusaha Amerika." Pada pemilihan bulan November 1996, kedua kandidat adalah anggota Partai Republik yang moderat dan orang dalam pemerintah yang sudah berpengalaman. Mereka adalah kandidat dunia bisnis. Pers bisnis melaporkan bahwa kampanye yang berlangsung merupakan salah satu yang "paling membosankan dalam sejarah." Jajak pendapat menunjukkan bahwa minat publik turun hingga di bawah level sebelumnya meski terjadi pemecahan rekor dalam pembiayaannya. Para pemilih juga tidak menyukai kedua kandidat dan hanya sedikit berharap dari keduanya.

Ada ketidakpuasan yang cukup luas di masyarakat atas pelaksanaan sistem demokrasi. Fenomena serupa dilaporkan terjadi di Amerika Latin, dan sekalipun kondisinya berbeda, beberapa alasan yang mendasarinya sama. Seorang ilmuwan politik Argentina, Atilio Boron, menggarisbawahi fakta bahwa di Amerika Latin demokratisasi berjalan seiring reformasi ekonomi neoliberal, yang menjadi bencana bagi sebagian besar rakyat. Pengenalan program serupa di negara-negara kaya di dunia pun memiliki dampak serupa. Ketika lebih dari 80% penduduk

merasa bahwa sistem demokrasi adalah sebuah tipuan dan bahwa perekonomian "pada dasarnya tidak adil," makna "permusyawaratan rakyat" menjadi sangat dangkal.

Pers bisnis mencatat "tekanan modal atas pekerja selama lima belas tahun terakhir," telah memungkinkan industri meraih banyak kemenangan. Namun mereka juga mengingatkan bahwa masa-masa kejayaan itu mungkin tidak akan bertahan akibat maraknya "kampanye agresif" para pekerja "untuk mendapatkan apa yang disebut 'pendapatan yang layak'" dan "jaminan atas potongan kue yang lebih besar."

Penting untuk diingat bahwa kita telah mengalami semua ini sebelumnya. "Akhir sejarah," "kesempurnaan," dan "finalitas" telah sering diungkapkan dan selalu saja tidak tepat. Namun, saya pikir, walaupun segala carut-marut ini tetap berlanjut, jiwa yang optimis tetap dapat melihat kemajuan dengan realistis, meskipun pelan. Di negara industri maju, dan juga di berbagai tempat lain, perlawanan rakyat dapat mulai dari tingkat yang lebih tinggi dan dengan harapan yang lebih besar dibanding pada masa Gay Nineties dan Roar Twenties atau bahkan tiga puluh tahun lalu. Solidaritas internasional dapat mengambil bentuk baru dan lebih konstruktif ketika sebagian besar warga dunia menyadari bahwa kepentingan mereka serupa dan bisa diraih melalui kerjasama. Kini, seperti juga dulu, tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita dikekang oleh hukum sosial yang misterius dan tak dikenal. Keputusan yang dibuat oleh institusi harus tunduk pada kehendak manusia—pada institusi manusia, harus menghadapi uji legitimasi dan, jika mereka gagal, harus digantikan dengan keputusan lain yang lebih bebas dan lebih adil, sebagaimana yang pernah ada di masa lalu.

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Amerika Selatan dalam Bahasa Spanyol dan Portugis, 1996

Catatan

1. Primary adalah pemilihan putaran pertama di AS di mana anggota partai politik memilih kandidat yang akan mewakili partai dalam pemilihan umum selanjutnya yang memperebutkan kursi di Senat.

BAB III
Hasrat akan Pasar Bebas

"Selama lebih dari setengah abad, PBB merupakan forum utama bagi Amerika Serikat dalam upayanya menciptakan dunia yang sesuai keinginannya. Amerika bergerak bersama sekutunya untuk menyusun kesepakatan global mengenai hak asasi manusia, uji coba nuklir, atau lingkungan yang menurut Washington akan mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya." Demikian yang terjadi dalam sejarah pascaperang, seperti yang kita pelajari dari paragraf pertama sebuah kepala berita di *New York Times* yang ditulis oleh seorang analis politik, David Sanger.

Namun zaman berubah. Hari ini *headline* itu berbunyi, "AS Mengekspor Nilai-Nilai Pasar Bebasnya Melalui Perjanjian Perdagangan Dunia." Lepas dari ketergantungan tradisional pada PBB, pemerintahan Clinton berpaling ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) dalam melaksanakan tugas "mengekspor nilai-nilai Amerika." Lebih jauh lagi, Sanger melanjutkan (mengutip wakil perdagangan AS), WTO mungkin merupakan sarana yang paling efektif untuk mewujudkan "hasrat Amerika akan deregulasi" dan untuk pasar bebas umumnya, serta "nilai-nilai Amerika mengenai persaingan bebas, peraturan yang adil, dan pelaksanaannya yang efektif" ke

dalam dunia yang masih tersesat dalam kegelapan. "Nilai-nilai Amerika" ini paling dramatis digambarkan dengan gelombang masa depan: telekomunikasi, Internet, kemajuan teknologi komputer, dan keajaiban lain yang diciptakan oleh semangat pengusaha besar Amerika yang tidak dibatasi oleh pasar dan pada akhirnya terbebas dari campur tangan pemerintah melalui revolusi Reagan.

Dalam laporan utama di sebuah edisi *New York Times* lainnya, Youssef Ibrahim menulis dengan semangat yang sama bahwa "pemerintah di mana pun kini turut melantunkan kidung suci doktrin pasar bebas seperti yang dinyanyikan pada tahun '80-an oleh Presiden Reagan dan PM Inggris Margaret Thatcher." Suka atau tidak, pendukung dan kritikus dengan berbagai sudut pandang sepakat—ini hanya pandangan kelompok liberal-dan-kiri dari spektrum pendapat—mengenai "perubahan permanen dari apa yang disebut para pendukungnya sebagai 'revolusi pasar'": "Penguatan individualisme ala Reagan" telah mengubah aturan main di seluruh dunia. Sementara di dalam negeri "Partai Republik dan Demokrat sama-sama siap memberi dukungan penuh kepada pasar" demi dedikasi mereka untuk "ortodoksi baru."[1]

Ada banyak masalah di sini. Salah satunya adalah pengalaman selama setengah abad terakhir. Bahkan pengikut paling setia dalam "misi Amerika" pun harus menyadari bahwa hubungan AS-PBB sebenarnya berlawanan dari yang digambarkan dalam paragraf awal, yakni sejak PBB melepaskan kontrol atas merebaknya dekolonisasi dan, dengan begitu, membiarkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya lawan dari berbagai kesepakatan global mengenai berbagai masalah. Amerika juga berusaha menggembosi badan-badan penting PBB, terutama yang berorientasi ke dunia ketiga. Berbagai pertanyaan menyangkut kepentingan seluruh dunia dapat diajukan, tapi tidak tentang yang satu ini.

Mengenai "penguatan individualisme a la Reagan" dan pemujaannya atas pasar, mungkin ada baiknya kita mengutip

ulasan yang ditulis oleh anggota senior pendanaan internasional dalam Dewan Hubungan Luar Negeri (Council of Foreign Relations) mengenai masa Reagan, yang dimuat dalam *Foreign Affairs*. Ia mencatat sebuah "ironi", yakni Reagan, "seorang pimpinan eksekutif pasca perang dengan kecintaan luar biasa terhadap prinsip atas *laissez-faire,* memimpin perubahan ke arah proteksionisme yang terbesar sejak tahun '30-an." Tapi ini sebenarnya bukan "ironi", melainkan hanya konsekuensi normal dari "kecintaan luar biasa terhadap *laissez-faire*": bagi *Anda*, disiplin pasar, namun tidak untuk*ku*, kecuali "arena permainannya" disesuaikan dengan keinginanku, dan itu biasanya sebagai hasil intervensi besar-besaran yang dilakukan oleh negara. Sangat sulit mencari tema lain yang sama dominannya dalam sejarah ekonomi selama tiga abad terakhir.

Pengikut Reagan mengikuti jejak pendahulunya—belakangan ini menjadi drama komedi yang dibawakan oleh kelompok "konservatif" pimpinan Gingrich—yakni sembari mengagung-agungkan pasar dan memberi kuliah kepada orang miskin tentang pentingnya memperlemah budaya ketergantungan di dalam dan luar negeri, mereka membangga-banggakan kepada dunia bisnis bahwa Reagan telah telah "memberi lebih banyak bantuan impor bagi industri AS dibanding para pendahulunya selama lebih dari setengah abad". Bahkan sebenarnya Reagan memberi lebih dari apa yang diberikan para pendahulunya secara gabungan, karena mereka memimpin "Serangan terus-menerus terhadap prinsip [perdagangan bebas]" yang dilakukan oleh kelompok kaya dan berkuasa sejak awal '70-an. Hal ini dikritik keras oleh Patrick Low, ketua ekonom General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), dalam sebuah analisis ilmiahnya. Low memperkirakan dampak restriktif dari kebijakan Reagan ini sekitar tiga kali lipat dibanding yang terjadi di negara industri maju lainnya.[3]

"Perubahan radikal ke arah proteksionisme" hanyalah satu bagian dari "serangan terus-menerus" kepada prinsip-prinsip perdagangan bebas yang mengalami percepatan karena

"penguatan individualisme a la pengikut Reagan." Bab lain dari kisah tersebut adalah penyaluran dana publik dalam jumlah besar kepada perusahaan swasta, yang seringkali menjadikan "keamanan" sebagai dalih tradisionalnya. Cerita yang berlangsung selama berabad-abad ini nyaris tidak berubah hingga hari ini; tidak hanya di sini, tentu saja, sekalipun kadar kebohongan dan kemunafikannya tergantung pada persepsi lokal.

"Inggris di bawah Thatcher" juga merupakan contoh bagus lainnya untuk menggambarkan "kidung pasar bebas." Berdasarkan beberapa fakta yang terungkap dalam beberapa bulan terakhir ini (awal 1997), *Observer* di London melaporkan, "selama periode tekanan maksimum untuk mensukseskan penjualan senjata ke Turki," PM Thatcher "secara pribadi ikut campur untuk menjamin pengeluaran sebesar 22 juta poundsterling dari anggaran bantuan luar negeri Inggris, untuk membantu membangun jalur kereta api bawah tanah di ibu kota Turki, Ankara. Proyek tersebut tidak ekonomis dan pada tahun 1995 diakui" oleh Menteri Luar Negeri Douglas Hurd bahwa ini "melanggar hukum." Insiden tersebut menjadi krusial setelah terjadinya skandal Pergau Dam yang membeberkan tentang subsidi ilegal yang diberikan kabinet Thatcher "untuk 'melicinkan' perjanjian persenjataan dengan pemerintah Malaysia." Penilaian Mahkamah Agung bertentangan dengan pendapat Hurd. Ini di luar jaminan kredit dan anggaran keuangan pemerintah, dan tujuan akhir penyaluran dana publik bagi "industri pertahanan" tersebut adalah keuntungan yang sudah bisa diduga akan didulang oleh industri maju secara umum.

Beberapa hari sebelumnya, jurnal yang sama melaporkan bahwa "sekitar dua juta anak di Inggris menderita akibat penyakit dan gangguan tumbuh kembang akibat malnutrisi". Ini adalah akibat dari "kemiskinan dalam skala yang belum pernah terjadi sejak tahun '30-an." Keinginan untuk meningkatkan status kesehatan anak telah berjalan ke arah sebaliknya, dan penyakit-penyakit pada anak yang dulunya sudah bisa dicegah kini muncul

lagi akibat "kidung pasar bebas" (yang dipilih dengan sangat cermat), yang lebih menguntungkan para pendukungnya.

Beberapa bulan sebelumnya, sebuah *headline* melaporkan "Satu dari Tiga Bayi di Inggris Lahir dalam Kemiskinan," seperti halnya "kemiskinan anak meningkat tiga kali lipat sejak Margaret Thatcher terpilih." Kepala berita lainnya berbunyi, "Penyakit Zaman Charles Dickens Kembali Menghantui Inggris," melaporkan penelitian yang berkesimpulan bahwa "kondisi sosial di Inggris kembali seperti satu abad lalu." Yang lebih suram lagi adalah dampak dari pengurangan pasokan gas, listrik, air, dan telepon ke "sejumlah besar rumah tangga" ketika privatisasi mengambil langkah alaminya yakni, dengan berbagai cara, memanjakan "konsumen kaya" dan mengenakan "biaya tambahan bagi si miskin"—yang mengakibatkan makin lebarnya "jurang konsumsi energi antara si kaya dan si miskin." Ini terjadi juga dalam suplai air dan layanan lainnya. "Pemotongan kejam" atas program-program sosial menjadikan negara berada "dalam cengkeraman kepanikan akan terjadinya kehancuran sosial." Namun pada saat yang sama industri dan bisnis keuangan benar-benar diuntungkan oleh kebijakan yang sama. Dan di atas semua ini, pengeluaran publik setelah tujuh belas tahun kidung Thatcher dinyanyikan tetap 42,25 % dari GDP, sama dengan ketika dia dilantik. [4]

Bukan hal yang asing sama sekali di sini.

Organisasi Perdagangan Dunia: "Mengekspor Nilai-Nilai Amerika"

Mari kita kesampingkan dulu perbedaan yang cukup mengganggu antara doktrin dengan kenyataan dan melihat apa yang bisa dipelajari dari era baru yang segera akan dimulai. Cukup banyak, saya kira.

Berita *Times* mengenai bagaimana "AS mengekspor nilai-nilai pasar bebasnya" sebenarnya merupakan sambutan hangat atas kesepakatan yang dicapai WTO mengenai telekomunikasi.

Salah satu dampak yang menggembirakan adalah membekali Washington dengan "alat baru untuk kebijakan luar negerinya." Perjanjian tersebut "memungkinkan WTO untuk memasuki batas tujuh puluh negara yang menandatanganinya" dan bukan rahasia jika lembaga-lembaga internasional dapat bekerja sejauh ia mampu memenuhi keinginan pihak yang berkuasa, khususnya Amerika Serikat. Dalam dunia nyata, "alat baru" tersebut memungkinkan Amerika Serikat secara serius campur tangan dalam urusan internal negara lain dan memaksa mereka untuk mengubah hukum dan praktik-praktik yang ada. Lebih penting lagi, WTO akan memastikan bahwa negara lain akan "mematuhi komitmen untuk mengizinkan investasi pihak asing" tanpa pembatasan di bidang-bidang utama perekonomian mereka. Dalam kasus tertentu, seperti dilaporkan oleh *Far Eastern Economic Review* [5], hasilnya jelas untuk semua orang: "perusahaan yang paling jelas menerima keuntungan dari era baru ini adalah perusahaan pengangkutan AS yang memang diposisikan untuk menguasai bidang tersebut," bersama satu megakorporasi Inggris-AS.

Tidak semua orang senang dengan prospek ini. Pihak yang diuntungkan menyadari hal ini dan menawarkan penafsiran mereka: dalam kalimat Sanger, pihak lain takut bahwa "raksasa telekomunikasi Amerika akan menguasai perusahaan-perusahaan monopoli yang lemah, yang selama ini didukung pemerintah dan telah lama mendominasi telekomunikasi di Eropa dan Asia". Hal ini terjadi di Amerika Serikat jauh sebelum ia menjadi negara terkuat dan kekuatan ekonomi paling maju di dunia. Juga penting untuk dicatat bahwa kontribusi utama bagi teknologi modern (antara lain transistor) berasal dari laboratorium "perusahaan monopoli yang lemah yang didukung pemerintah" yang mendominasi telekomunikasi di sini hingga tahun '70-an. Mereka menggunakan kebebasannya dari disiplin pasar untuk memenuhi kebutuhan sektor canggih industri, umumnya dengan penyaluran dana publik (adakalanya secara tidak langsung melalui

kekuatan monopoli, tidak seperti cara-cara langsung yang dilakukan oleh Pentagon).

Mereka yang secara irasional tetap berpegang pada masa lalu memandang persoalan dengan sedikit berbeda. *Far Eastern Economic Review* menyebutkan bahwa pekerjaan akan menghilang di Asia dan "banyak konsumen Asia akan membayar lebih mahal untuk layanan telepon sebelum mereka membayar lebih murah." Kapankah mereka akan membayar lebih murah? Agar masa depan cerah itu muncul, investor asing perlu "didukung agar bertindak dengan cara yang diinginkan masyarakat luas" bukan hanya dengan pertimbangan keuntungan dan melayani kepentingan orang kaya serta dunia bisnis. Bagaimana keajaiban ini akan datang tidak dijelaskan, sekalipun tidak diragukan saran tersebut akan mendorong pemikiran serius para pimpinan perusahaan di kantor-kantor pusatnya.

FEER juga memprediksi bahwa dalam jangka waktu yang direncanakan, perjanjian WTO akan menyebabkan peningkatan biaya telepon bagi sebagian besar konsumen Asia. "Faktanya adalah hanya segelintir konsumen di Asia yang menikmati keuntungan dari biaya hubungan internasional yang lebih murah" yang diantisipasi dengan pengambilalihan oleh perusahaan asing raksasa. Sebagai contoh, di Indonesia hanya sekitar 300 ribu dari 200 juta lebih penduduk—khususnya di sektor bisnis—yang pernah melakukan panggilan internasional. Mengacu pada David Barden, analis telekomunikasi regional J.P. Morgan Securities di Hong Kong, "sangat mungkin bahwa biaya layanan telepon lokal di Asia secara umum akan meningkat." Namun semua itu untuk tujuan baik, dia melanjutkan: "Jika tidak ada keuntungan dalam bisnis ini maka tidak akan ada bisnis." Dan kini bahkan lebih banyak lagi kepentingan publik yang pengelolaannya diserahkan pada perusahaan asing. Mereka memiliki jaminan keuntungan yang lebih baik. Sekarang telekomunikasi, dan kelak lebih banyak industri terkait lain. Pers bisnis memprediksikan bahwa "komunikasi personal melalui Internet [termasuk jaringan

dan interaksi perusahaan] akan mengambilalih telekomunikasi dalam lima atau enam tahun, dan operator telepon memiliki kepentingan terbesar untuk memasuki bisnis *online*." Sembari mempertimbangkan masa depan perusahaannya, CEO Intel, Andrew Grove, melihat Internet sebagai "perubahan terbesar dalam kehidupan kita" saat ini. Dia mengharapkan pertumbuhan skala besar pada "penyedia jasa sambungan, orang-orang yang pembuat World Wide Web, dan orang yang merancang komputer" ("orang" di sini berarti perusahaan). Industri periklanan sendiri telah menghabiskan 350 miliar dolar per tahun dan mengantisipasi kesempatan baru dengan privatisasi Internet, yang diharapkan untuk mengubahnya menjadi oligopoli global.[6]

Sementara itu privatisasi lebih dulu tumbuh dengan cepat dimana-mana. Satu contoh penting, dengan mengabaikan perlawanan dari sebagian besar rakyatnya, pemerintah Brasil memutuskan untuk melakukan swastanisasi Vale Company yang menguasai uranium, besi, dan sumber daya mineral lain dalam jumlah sangat besar serta memiliki fasilitas industri dan transportasi termasuk teknologi canggih. Vale sangatlah menguntungkan dengan pendapatan tahun 1996 lebih dari lima miliar dolar dan memiliki prospek luar biasa di masa depan. Ia adalah satu dari enam perusahaan Amerika Latin yang masuk dalam daftar lima ratus perusahaan paling menguntungkan di dunia. Studi para pakar dari Fakultas Teknik Pasca-Sarjana di Universitas Federal di Rio menyebutkan bahwa pemerintah benar-benar telah mengecilkan nilai perusahaan tersebut. Mereka juga mencatat bahwa keputusan pemerintah itu didasarkan pada analisis "independen" Merril Lynch, yang dikaitkan dengan perusahaan konglomerat Anglo-Amerika yang memang selalu mencoba mengambilalih tulang punggung perekonomian Brasil. Pemerintah Brasil dengan marah menyangkal kesimpulan tersebut. Namun jika mereka benar, Brasil akan jatuh pada pola yang sudah umum.[7]

Komentar tambahan: komunikasi tidak sama dengan uranium. Komunikasi yang terpusat di banyak tangan (terutama

pihak asing) menimbulkan beberapa pertanyaan serius mengenai demokrasi yang sesungguhnya. Pertanyaan serupa muncul mengenai pemusatan uang, yang mengurangi keterlibatan rakyat dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Kontrol atas pangan memunculkan pertanyaan yang jauh lebih serius, dalam hal ini mengenai daya tahan. Setahun lalu, Sekretaris Jendral Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) membahas mengenai "krisis pangan yang mengikuti kenaikan tajam harga biji-bijian tahun ini" dan mengingatkan bahwa negara-negara "harus lebih mandiri dalam produksi pangan."[8] FAO memperingatkan "negara-negara berkembang" untuk mengubah kebijakan yang diterapkan oleh "Konsensus Washington" pada mereka, yaitu kebijakan yang mengandung dampak membahayakan di berbagai belahan dunia. Pada saat yang sama FAO menyetujui bantuan berskala besar untuk mensubsidi sektor agribisnis—adakalanya juga termasuk perdagangan narkotika. Ini mungkin yang disebut keberhasilan paling dramatis dari reformasi neoliberal yang dibenarkan oleh "nilai-nilai pasar bebas" yang kini "diekspor AS."

Kontrol atas suplai pangan oleh perusahaan asing raksasa berjalan dengan baik, dan dengan ditandatangani dan dilaksanakannya perjanjian telekomunikasi, layanan keuangan adalah giliran berikutnya.

Kesimpulannya, dampak yang diharapkan dari kemenangan "nilai-nilai Amerika" di WTO adalah:

1. "Alat baru" bagi Amerika Serikat untuk mengintervensi sejauh mungkin urusan dalam negeri negara lain.
2. Pengambilalihan sektor penting perekonomian asing oleh perusahaan yang berbasis di AS.
3. Keuntungan bagi sektor bisnis dan kesejahteraan.
4. Pengalihan biaya ke masyarakat umum.
5. Senjata ampuh yang baru dan potensial menghadapi ancaman demokrasi.

Seorang yang rasional mungkin akan bertanya apakah harapan ini berkaitan dengan keberhasilan atau hanya suatu

kebetulan akibat kemenangan prinsip yang berasal dari komitmen terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Skeptisisme dipertinggi oleh perbandingan gambaran *Times* mengenai era pascaperang seperti telah dibahas di awal, dengan fakta yang tidak diragukan lagi. Hal ini ditambah lagi dengan tinjauan atas beberapa keteraturan yang mencolok dalam sejarah: di antara mereka yang berada di posisi untuk menjalankan rencananya, mereka tidak hanya menjalankannya dengan antusiasme berlimpah namun juga menangguk keuntungan darinya. Dan mereka tak peduli apakah nilai-nilai yang mereka klaim menyertakan prinsip pasar bebas atau prinsip-prinsip penting lainnya, asalkan sepanjang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang bermain dan mengharapkan hasil yang menggembirakan. Logika awam saja akan mengatakan pentingnya skeptisime jika pola seperti itu berulang. Sejarah harusnya menampilkan fakta ini dengan lebih baik.

Tapi sebenarnya kita tidak perlu mencari sejauh itu.

Organisasi Perdagangan Dunia: Bukan Forum yang Tepat

Pada hari yang sama ketika halaman depan melaporkan kemenangan nilai-nilai Amerika di WTO, editor *New York Times* mengingatkan Uni Eropa agar tidak menggunakan WTO untuk menuduh bahwa AS melanggar perjanjian perdagangan bebas. Secara khusus yang dibicarakan di sini adalah Undang-Undang Helms-Burton yang "mengharuskan AS untuk memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan asing yang berbisnis di Kuba." Sanksi tersebut "akan secara efektif mencegah perusahaan-perusahaan seperti itu mengekspor atau berbisnis ke Amerika Serikat, bahkan jika produk dan aktivitas mereka sama sekali tidak berkaitan dengan Kuba" (Peter Morici, mantan direktur ekonomi Komisi Perdagangan Internasional AS). Itu bukan hukuman yang bisa disepelekan, berbeda dari ancaman langsung terhadap individu dan perusahaan yang melanggar batas-batas yang ditetapkan Washington secara unilateral. Editor *NYT*

menganggap UU itu sebagai "upaya keliru dari Kongres yang ingin memaksakan kebijakan luar negerinya kepada pihak lain". Morici menentang UU ini karena "memerlukan biaya lebih besar daripada keuntungan" yang akan dipetik oleh Amerika Serikat. Secara luas, isunya adalah soal embargo, yakni "kekangan ekonomi oleh Amerika di Kuba" yang disebut editor *NYT* sebagai "perang dingin salah musim" yang lebih baik ditinggalkan karena berbahaya bagi kepentingan bisnis AS. [9]

Namun pertanyaan yang lebih luas mengenai benar dan salah tidak muncul, dan secara keseluruhan masalah ini "pada dasarnya merupakan suatu pertikaian politik," seperti ditekankan oleh editor *NYT*, yang tidak berkaitan dengan "kewajiban perdagangan bebas Washington." Seperti kebanyakan orang, editor *NYT* tampaknya berasumsi bahwa jika Eropa tetap bersikeras, tampaknya WTO akan bertindak menentang Amerika Serikat: Oleh karena itu WTO bukan forum yang tepat.

Logikanya sederhana, dan wajar. Sepuluh tahun sebelumnya, untuk masalah yang sama, Mahkamah Peradilan Internasional (International Court of Justice/ ICJ) dianggap bukan forum yang tepat untuk menangani tuntutan Nikaragua terhadap Washington. Amerika Serikat menolak kewenangan ICJ, dan ketika ICJ menuduh AS "menggunakan kekuatan yang melanggar hukum", memerintahkan Washington untuk menghentikan terorisme internasional, pelanggaran perjanjian, dan perang ekonomi yang tidak bisa dibenarkan, serta membayar biaya perbaikan yang diperlukan, Kongres yang dikuasai kelompok Demokrat bereaksi. Mereka justru segera meningkatkan tindakan melanggar hukum sementara ICJ diserang dari segala arah dan dituding sebagai "forum yang kejam" dan mendiskreditkan dirinya sendiri dengan membuat keputusan yang menentang Amerika Serikat. Penilaian ICJ sendiri nyaris tidak pernah dilaporkan, termasuk kata-kata yang dikutip di atas serta pernyataan eksplisit yang menyebut bahwa bantuan AS bagi kelompok kontra bersifat "militer" dan bukan "bantuan kemanusiaan." Seiring dengan langkah AS menggunakan

kekuatan teroris, bantuan terus diberikan hingga Amerika Serikat melaksanakan keinginannya. Bantuan itu selalu disebut sebagai "bantuan kemanusiaan." Sejarah dalam ingatan masyarakat publik mencatat konvensi yang sama.

Amerika Serikat kemudian memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyeru semua negara untuk menaati hukum internasional (nyaris tidak diberitakan). AS sendiri (didukung oleh El Salvador dan Israel) memveto resolusi Majelis Umum yang meminta "ketaatan penuh dan segera" terhadap keputusan Dewan—pernah dilaporkan kepada publik, seperti halnya yang terjadi lagi di tahun berikutnya namun kali itu hanya dengan dukungan Israel. Secara keseluruhan ini gambaran tipikal mengenai bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan PBB sebagai "forum" untuk memaksakan nilai-nilainya (lihat kutipan di awal).

Kembali ke masalah WTO yang terjadi baru-baru ini, pada bulan November 1996 Washington memveto sendiri (dengan dukungan Israel dan Uzbekistan) menentang resolusi Majelis Umum—yang didukung oleh seluruh anggota Uni Eropa—yang menuntut Amerika Serikat menghentikan embargo atas Kuba. Organisasi Negara-negara Bagian Amerika (Organization of American States/ OAS) bersepakat untuk menolak Helms-Burton Act dan meminta badan pengadilannya, Komite Pengadilan Amerika (Inter-American Juridical Committee/ IAJC) untuk menetapkan keabsahannya. Pada bulan Agustus 1996, IAJC sepakat memutuskan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan hukum internasional. Setahun sebelumnya, Komisi Hak Asasi Manusia di OAS telah menyatakan bahwa larangan pengiriman makanan dan obat-obatan ke Kuba oleh AS adalah tindakan melawan hukum internasional. Pemerintahan Clinton menjawab dengan mengatakan bahwa pengiriman obat-obatan sebenarnya tidak dihalangi, hanya terhambat oleh kondisi yang sangat sulit dan berbahaya sehingga tidak ada perusahaan lokal dan asing yang ingin menghadapinya (hukuman finansial dan penjara yang luar biasa atas apa yang dianggap Washington

sebagai pelanggaran atas "distribusi yang adil," pelarangan kapal dan pesawat terbang, mobilisasi kampanye media, dsb). Dan ketika pengapalan makanan benar-benar dihalangi, pemerintah berpendapat bahwa ada "banyak pemasok" di tempat lain (dengan harga yang jauh lebih tinggi), sehingga pelanggaran langsung terhadap hukum internasional tidak bisa lagi dianggap sebuah pelanggaran.

Ketika masalah tersebut dibawa oleh UE ke WTO, Amerika Serikat mundur dari pembentukan model ICJ dan itu secara efektif menutup kasus tersebut.

Singkatnya, dunia yang akan "diciptakan sesuai keinginan" Amerika Serikat melalui lembaga-lembaga internasional adalah dunia yang didasarkan pada prinsip kekuasaan kekuatan. Dan "hasrat Amerika atas perdagangan bebas" memperbolehkan pemerintah AS melanggar perjanjian perdagangan sesuka hati. Tidak akan ada masalah yang muncul ketika komunikasi, keuangan, dan suplai pangan diambilalih dan dikuasai oleh perusahaan asing (terutama AS). Masalahnya lain kalau perjanjian perdagangan dan hukum internasional ikut campur dalam proyek milik pihak yang berkuasa—sekali lagi ini mengacu pada pelajaran yang kita dapat dari sejarah.

Kita belajar lebih banyak dari alasan-alasan penolakan AS terhadap hukum internasional dan perjanjian perdagangan. Dalam kasus Nikaragua, penasehat hukum Departemen Luar Negeri, Abraham Sofaer, menjelaskan bahwa ketika Amerika Serikat mengakui kewenangan Majelis Dunia pada tahun '40-an, sebagian besar anggota PBB "ada di pihak yang sama dengan AS dan berbagi pandangan mengenai tatanan dunia." Namun kini "sebagian besar di antara mereka tidak dapat diharapkan untuk berbagi pandangan dengan kami mengenai konsep konstitusional yang sebenarnya dari Piagam PBB," dan "mereka seringkali menentang AS dalam masalah-masalah internasional yang penting." Oleh karena itu dapat dipahami jika Amerika Serikat kemudian memimpin upaya memveto resolusi PBB sejak tahun '60-an mengenai berbagai permasalahan, termasuk hukum

internasional, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya—suatu hal yang benar-benar bertentangan dengan pernyataan yang ditulis di paragraf awal. Amerika Serikat melangkah lebih jauh setelah ini dengan memberikan 71 veto sejak 1967. Ketika masalah ini (pendudukan Israel atas Yerusalem) dibawa ke Majelis Umum, kembali Amerika Serikat dan Israel menjadi satu-satunya pihak yang menentang resolusi, dan lagi-lagi inilah pola standarnya. [11]

Dengan menarik kesimpulan seperti yang sudah-sudah mengenai ketidakmampuan dunia, Sofaer kemudian menjelaskan bahwa kita sekarang harus "mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menentukan apakah Mahkamah memiliki kewenangan atas kita dalam kasus tertentu." Prinsip yang bertahan sekian lama, dan sekarang harus dipaksakan kepada pihak yang tidak lagi taat sepenuhnya, adalah bahwa "Amerika Serikat tidak menerima kewenangan yang dipaksakan mengenai setiap persengketaan atas masalah yang pada dasarnya berada dalam wilayah yurisdiksi Amerika Serikat, sebagaimana ditentukan sendiri oleh Amerika Serikat." Yang dimaksud dengan "persoalan domestik" dalam hal ini adalah serangan AS ke Nikaragua. [12]

Prinsip dasar pelaksanaan sikap tersebut dinyatakan dengan elegan oleh Menteri Luar Negeri yang baru, Madeleine Albright, ketika berbicara di Dewan Keamanan PBB perihal keengganan DK menyetujui tuntutan AS mengenai Irak: AS akan "bertindak, secara multilateral jika bisa, dan unilateral jika terpaksa," seraya menunjukkan tidak ada tekanan luar yang bisa menghalangi AS dalam urusan yang dinilai "vital bagi kepentingan nasional AS"—sebagaimana ditentukan sendiri oleh Amerika Serikat. [13] PBB dianggap forum yang tepat ketika para anggotanya "dapat diandalkan" untuk berbagi pandangan dengan Washington, namun tidak tepat ketika mayoritas justru "menentang Amerika Serikat dalam masalah internasional yang penting." Hukum internasional dan demokrasi adalah hal yang baik—namun keduanya dinilai bukan berdasarkan proses melainkan hasilnya, seperti halnya perdagangan bebas.

Posisi AS dalam kasus WTO baru-baru ini, dengan demikian, bukan hal baru. Washington menyatakan bahwa WTO "tidak memiliki kompetensi untuk mencampuri" isu mengenai keamanan dalam negeri Amerika; kita harus memahami bahwa keberadaan kita terancam oleh pengekangan terhadap perekonomian Kuba. Tindakan WTO menentang AS secara *in absentia* tidak berarti apa-apa dan tidak perlu dipikirkan, juru bicara pemerintahan Clinton menambahkan, sebab "kita tidak percaya apa pun yang dikatakan atau dilakukan WTO dapat memaksa AS untuk mengubah undang-undangnya." Ingat bahwa nilai penting dari perjanjian telekomunikasi WTO adalah bahwa hal itu menjadi "alat baru kebijakan luar negeri" yang mendorong negara lain untuk mengubah undang-undang dan pelaksanaannya sesuai dengan keinginan kami.

Prinsipnya adalah bahwa Amerika Serikat terbebas dari campur tangan WTO dengan undang-undangnya, sebagaimana mereka bebas melanggar hukum internasional sesuka hati; uniknya, hak istimewa tersebut dapat berlaku juga bagi negara sahabat jika situasi menghendaki. Prinsip dasar tatanan dunia kembali digaungkan dengan keras dan jelas.

Perjanjian-perjanjian GATT sebelumnya memungkinkan pengecualian untuk alasan keamanan nasional AS, dan berdasarkan hal ini Washington telah membenarkan embargo atas Kuba sebagai "langkah yang perlu untuk melindungi kepentingan keamanan AS yang mendasar." Perjanjian WTO juga mengizinkan satu anggotanya untuk mengambil "segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keamanannya" namun hanya berkaitan dengan tiga isu tertentu: hulu ledak nuklir, perdagangan senjata, dan tindakan yang perlu "diambil dalam perang atau kondisi darurat dalam hubungan internasional." [14] Mungkin karena tidak ingin absurditas nyata tersebut dicatat secara resmi, pemerintahan Clinton tidak secara formal membesar-besarkan soal "pengecualian keamanan nasional" tersebut, sekalipun mereka memperjelas bahwa masalahnya memang "keamanan nasional."

Saat penulisan artikel ini, UE dan Amerika Serikat mencoba untuk menyusun suatu kesepakatan sebelum 14 April, yaitu ketika dengar pendapat WTO dimulai. Sementara itu *Wall Street Journal* melaporkan, Washington "menyatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan panel-panel WTO dan menyatakan bahwa organisasi perdagangan tidak memiliki kewenangan atas masalah keamanan nasional." [15]

Pemikiran yang Tak Sepantasnya

Orang-orang yang tahu sopan-santun diharapkan tidak mengingat reaksi ketika Kennedy mencoba mengorganisir tindakan kolektif melawan Kuba pada tahun 1961: Meksiko tidak dapat ikut serta, perwakilannya menjelaskan, karena "jika kami secara terbuka menyatakan Kuba sebagai ancaman atas keamanan kami, empat puluh juta warga Meksiko akan mati tertawa." [16] Di sini kita akan mengulas secara lebih serius mengenai ancaman terhadap keamanan nasional.

Tidak dilaporkan adanya kematian karena tertawa ketika juru bicara pemerintah Stuart Eizenstadt membenarkan penolakan Washington atas perjanjian WTO. Ia berargumen bahwa "Eropa menantang 'kebijakan Amerika atas Kuba yang telah berlangsung selama tiga dekade sejak masa pemerintahan Kennedy,' dan sepenuhnya ditujukan untuk mengganti pemerintahan di Havana."[17] Reaksi yang lebih serius sepenuhnya didasarkan pada asumsi bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk menjatuhkan pemerintahan mana pun. Dalam hal ini dengan agresi, teror besar-besaran, dan pengekangan ekonomi.

Asumsi ini tetap bertahan dan jelas tidak terlawan, namun tak urung pernyataan Eizenstadt tersebut mendapat kritik dari sejarahwan Arthur Schlesinger. Dengan pendekatan "sebagai orang yang pernah terlibat dalam kebijakan pemerintahan Kennedy terhadap Kuba," Schlesinger menyatakan bahwa Wakil Menteri Perdagangan Eizenstadt salah dalam memahami kebijakan pemerintahan Kennedy. Yang menjadi kekhawatiran pemerintah ketika itu adalah Kuba "menimbulkan masalah di

separuh wilayah dunia" dan "sekutu Soviet." Namun semua itu tinggal masa lalu, sehingga sebenarnya kebijakan Clinton tidak tepat waktu, meskipun tampaknya tidak bisa dibilang salah. [18]

Schlesinger tidak menjelaskan makna ungkapan "menimbulkan masalah separuh wilayah dunia" dan "sekutu Soviet," namun tampaknya ia menyimpan suatu rahasia. Dalam laporan pada presiden terpilih mengenai hasil-hasil Misi Amerika Latin di awal 1961, Schlesinger mengungkapkan masalah Castro sebagai "pemicu kekacauan" adalah "penyebaran gagasan Castro untuk bertindak tanpa berpikir panjang." Adalah masalah serius, katanya menambahkan, ketika "sistem distribusi lahan dan kekayaan nasional lain secara umum berpihak pada kalangan pemilik... [dan] orang miskin serta mereka yang tersisih, terilhami oleh revolusi Kuba, kini menuntut kesempatan untuk hidup dengan layak." Schlesinger juga menjelaskan tentang ancaman "sekutu Soviet": "Dalam pada itu, Uni Soviet membayangi dengan menebar dana pinjaman untuk pembangunan dalam jumlah besar dan menampilkan diri sebagai model dalam mencapai modernisasi hanya dalam satu generasi." Washington dan London memiliki persepsi yang sama dan jauh lebih luas mengenai "Sekutu Soviet", sejak dimulainya perang dingin antara tahun 1917 hingga tahun '60-an, yakni ketika catatan dokumenter penting berakhir.

Schlesinger juga merekomendasikan pada presiden terpilih "untuk menjamin kesuksesan luar biasa" dalam "pencapaian di bidang budaya dan semangat" yang "akan menggetarkan para penonton di selatan di mana penjelasan kesejarahan yang akurat dan mendetail benar-benar dihargai." Sementara itu kita akan mengurus persoalan-persoalan yang lebih serius. Dengan maksud menunjukkan betapa banyaknya perubahan telah terjadi, Schlesinger mengkritik "pengaruh mengerikan dari Dana Moneter Internasional (IMF)," sebelum mengajukan versi '50-an dari "Konsensus Washington" hari ini ("pengaturan struktural," "neoliberalisme"). [19]

Dengan penjelasan (rahasia) tentang "menimbulkan masalah di separuh wilayah dunia" dan "sekutu Soviet" dari Castro, kita jadi lebih memahami mengenai realitas Perang Dingin. Namun ini adalah topik yang lain.

Pemicu masalah di belahan dunia yang lain juga bukan masalah enteng, dan terus menebarkan gagasan berbahaya di antara mereka yang "kini menuntut kesempatan untuk hidup layak." Pada akhir Februari 1996 ketika Amerika Serikat sedang diliputi kemarahan menyusul ditembak jatuhnya dua pesawat terbang milik kelompok anti Castro yang berbasis di Florida dan kerap melintasi wilayah udara Kuba untuk menyebarkan selebaran yang menyerukan warga Kuba untuk mendukung revolusi (dan juga berpartisipasi dalam serangan teroris ke Kuba, menurut catatan pihak Kuba), media massa menerbitkan laporan yang berbeda. AP melaporkan bahwa di Afrika Selatan "kerumunan warga menyambut sambil bernyanyi dokter-dokter Kuba" yang baru tiba atas undangan pemerintah Mandela "untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan yang miskin". "Kuba memiliki 57.000 dokter bagi sebelas juta warganya, bandingkan dengan 25.000 di Afrika Selatan bagi 40 juta orang." Dalam rombongan seratus satu dokter Kuba tersebut temasuk dokter spesialis terkemuka yang, jika mereka warga Afrika Selatan, akan "sangat mungkin bekerja di Cape Town atau Johannesburg" dengan gaji dua kali lipat dari yang akan mereka terima di wilayah miskin yang mereka tuju. "Sejak program pengiriman spesialis kesehatan masyarakat ke luar negeri dimulai di Algeria pada tahun 1963, Kuba telah mengirim 51.820 dokter, dokter gigi, perawat, dan spesialis lainnya" ke "negara-negara termiskin di dunia ketiga" dan seringkali menyediakan "bantuan kesehatan yang benar-benar gratis." Satu bulan setelah tiba di Afrika Selatan, pakar kesehatan Kuba diundang oleh Haiti untuk menangani wabah meningitis. [20]

Jurnal terkemuka di Jerman Barat melaporkan pada tahun 1988 bahwa negara-negara Dunia Ketiga menganggap Kuba sebagai "negara adidaya internasional" karena jumlah guru,

pekerja konstruksi, dokter, dan lainnya yang terlibat dalam "bantuan internasional." Pada tahun 1985, 16.000 warga Kuba bekerja di negara dunia ketiga, dua kali lipat lebih dari jumlah total relawan Peace Corps dan spesialis AID dari Amerika Serikat. Pada tahun 1988, Kuba memiliki "lebih banyak dokter yang bekerja di luar negeri dibanding negara industri lainnya dan lebih banyak dari Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO)." Sebagian besar bantuan ini tidak mendapat imbalan dan "sukarelawan internasional" Kuba adalah "pria dan wanita yang hidup dalam kondisi yang tidak akan diterima oleh sebagian besar pekerja kemanusiaan," dan ini menjadi "dasar bagi keberhasilan mereka." Bagi rakyat Kuba, laporan itu melanjutkan, "bantuan internasional" dianggap sebagai "tanda kedewasaan politik" dan diajarkan di sekolah sebagai "sikap moral tertinggi." Sambutan hangat oleh delegasi ANC di Afrika Selatan pada tahun 1996 dan kerumunan warga yang menyanyikan "Long Live Cuba" menjadi bukti dari fenomena tersebut. [21]

Di satu sisi kita mungkin akan menanyakan bagaimana Amerika Serikat akan bereaksi jika pesawat Libya terbang melintasi New York dan Washington dan menebar selebaran yang mengajak rakyat Amerika untuk melakukan revolusi setelah serangan teroris terhadap AS terjadi selama bertahun-tahun, baik di dalam dan luar negeri. Dengan mengalungkan bunga pada mereka, mungkin? Satu isyarat diberikan oleh Barrie Dunsmore dari ABC beberapa pekan sebelum jatuhnya dua pesawat itu. Demikian dikatakan oleh Walter Porges, mantan wakil presiden ABC News dalam pencarian berita. Porges melaporkan bahwa ketika kru berita ABC di pesawat sipil mencoba memotret Sixth Fleet milik AS di atas laut Mediterania, "[pesawat tersebut] dipaksa menjauh atau akan ditembak jatuh" –suatu tindakan yang "akan dianggap sah berdasarkan definisi penerbangan militer menurut Hukum Internasional." Tetapi, negara kecil yang diserang oleh negara *superpower* adalah persoalan lain. [22]

Tinjauan sejarah lebih jauh mungkin bisa berguna. Kebijakan untuk menggulingkan pemerintahan Kuba tidak dimulai pada

masa pemerintahan Kennedy, seperti yang dinyatakan Eizenstadt, namun pada pendahulunya: keputusan resmi untuk menggulingkan Castro demi sebuah rezim "yang lebih mengabdi pada kepentingan rakyat Kuba dan lebih bisa diterima oleh AS." Hal tersebut dinyatakan secara diam-diam pada bulan Maret 1960 dengan tambahan bahwa operasi tersebut harus dilaksanakan "sedemikian rupa untuk menghindari kesan intervensi AS" mengingat reaksi yang bakal muncul di Amerika Latin serta kebutuhan untuk tidak menambah masalah lagi bagi pemerintah. Pada saat itu, "sekutu Soviet" dan "pembuat masalah di setengah belahan dunia" tidak terbukti, terlepas dari versi Schlesinger. Pemerintahan Kennedy juga mengetahui bahwa upaya mereka melanggar hukum internasional serta Piagam PBB dan OAS, namun masalah itu di-peti-es-kan dan kesimpangsiuran pun merebak. [23]

Sejak Washington menjadi penentu "kepentingan sebenarnya rakyat Kuba," tidaklah penting bagi para perencana pembangunan di pemerintah AS untuk memperhatikan hasil studi mengenai kehendak rakyat yang mereka terima, yang justru melaporkan mengenai dukungan luas publik terhadap Castro dan optimisme akan masa depan. Untuk alasan serupa, informasi terbaru mengenai permasalahan ini juga tidak dianggap. Pemerintahan Clinton menjawab kepentingan sebenarnya rakyat Kuba dengan kesengsaraan dan kelaparan, terlepas dari apa pun yang ditunjukkan oleh berbagai studi tentang pendapat rakyat Kuba. Sebagai contoh, jajak pendapat yang dilaporkan hasilnya pada bulan Desember 1994—yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang berafiliasi ke Gallup Foundation—menemukan bahwa setengah populasi menganggap embargo sebagai "penyebab utama masalah-masalah Kuba," sementara hanya 3% yang menyatakan bahwa situasi politik adalah "masalah paling serius yang dihadapi Kuba saat ini". Sebanyak 77% warga menganggap AS sebagai "rekan terburuk Kuba" (negara lain tidak ada yang mencapai 3%), sehingga satu dari dua orang merasa bahwa revolusi menghasilkan lebih banyak prestasi ketimbang

kegagalan. "Kegagalan utama" adalah "bergantung pada negara sosialis seperti Rusia yang telah mengkhianati kita" dan setengah penduduk menggambarkan diri mereka sebagai "revolusioner," 20% lainnya sebagai "komunis" atau "sosialis." [24]

Benar atau salah, kesimpulan mengenai sikap publik tidaklah relevan, lagi-lagi ini adalah pola tetap yang juga umum di dalam negeri.

Para penggemar sejarah mungkin akan mengingat bahwa kebijakan tersebut sebenarnya berakar pada tahun '20-an, ketika keinginan Washington untuk mengendalikan Kuba dihalangi oleh Inggris. Kuba adalah "objek yang teramat penting bagi tujuan komersial dan politik Perserikatan kita," menurut Menteri Luar Negeri John Quincy Adams. Namun Adams menyarankan AS untuk bersabar. Setelah beberapa waktu, dia meramalkan, Kuba akan jatuh ke tangan AS oleh "hukum gaya tarik politik." Kuba akan menjadi "buah cukup matang" untuk dipanen. Demikianlah yang terjadi, ketika relasi kekuasaan telah cukup condong ke Amerika Serikat untuk membebaskan pulau tersebut (dari penduduknya) di akhir abad, AS mengubahnya menjadi perkebunan dan surga bagi sindikat kejahatan dan wisatawan.

Komitmen yang memiliki akar historis untuk mengendalikan Kuba dapat membantu memahami nuansa histeria yang tampak jelas dalam jalannya pemerintahan; sebagai contoh, atmosfer "liar" dalam pertemuan pertama kabinet setelah gagalnya invasi Teluk Babi digambarkan oleh Chester Bowles sebagai "reaksi sangat panik mengenai suatu program." Sikap ini tercermin dalam pernyataan terbuka Kennedy mengenai bagaimana kegagalan bertindak "hampir saja membuat kita tertimbun puing-puing sejarah." Inisiatif Clinton yang terbuka dan tidak langsung, mengungkapkan fanatisme berdarah dingin yang sama kejamnya. Misalnya dalam paksaan dan ancaman yang dilakukan untuk memastikan bahwa "jumlah perusahaan yang diberi lisensi AS untuk menjual [obat-obatan] ke Kuba turun hingga kurang dari 4%" dari level sebelumnya yang tercantum dalam Cuban Democracy Act (CDA) bulan Oktober 1992.

"Hanya sebagian kecil perusahaan obat dunia yang berani melawan peraturan" dan hukuman dari AS. Demikian disebutkan dalam laporan jurnal kesehatan terkemuka di Inggris. [25]

Pemikiran semacam ini membawa kita dari situasi abstrak berkaitan dengan hukum internasional dan perjanjian resmi ke kenyataan hidup yang sesungguhnya. Para pengacara mungkin akan berdebat apakah pelarangan pangan dan obat-obatan [secara efektif] melanggar perjanjian internasional yang menyatakan bahwa "makanan dan obat-obatan tidak boleh digunakan sebagai alat tekanan politik dan ekonomi" (Deklarasi Roma, 1996), dan prinsip atau komitmen lain yang pernah dideklarasikan. Namun para korban harus hidup dengan kenyataan bahwa CDA telah "menyebabkan penurunan serius dalam bantuan pangan dan perdagangan obat-obatan resmi, yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat Kuba" (Cameron). Sebuah studi yang baru-baru ini diumumkan hasilnya oleh Asosiasi Amerika untuk Kesehatan Dunia (American Association for World Health/ AAWH) menyimpulkan bahwa embargo tersebut menyebabkan kekurangan gizi yang serius, memburuknya suplai air minum, dan penurunan tajam dalam persediaan obat-obatan dan informasi medis. Hal tersebut berakibat pada rendahnya angka kelahiran hidup, epidemi penyakit persarafan dan penyakit-penyakit lain yang diderita oleh puluhan ribu penderita, serta berbagai konsekuensi kesehatan yang mengerikan lainnya. "Standar kesehatan dan nutrisi telah dihancurkan oleh pengetatan embargo AS yang telah berlangsung selama 37 tahun, termasuk impor makanan," tulis Victoria Brittain di media Inggris. Victoria melaporkan penelitian AAWH yang dilakukan selama setahun penuh oleh pakar AS. Penelitian tersebut juga menemukan "anak-anak di rumah sakit yang tergolek menderita akibat kurangnya obat-obatan yang diperlukan" serta dokter yang dituntut "untuk bekerja dengan peralatan medis yang efisiensinya telah berkurang setengah akibat ketiadaan suku cadang." Kesimpulan serupa tercantum dalam penelitian lain pada jurnal profesional. [26]

Ini adalah kejahatan nyata, yang efeknya jauh dibanding kekerasan umum dan refleks terhadap undang-undang resmi yang digunakan sebagai senjata melawan musuh negara, dengan sinisme yang hanya dapat ditunjukkan oleh negara yang benar-benar kuat.

Untuk adilnya, perlu ditambahkan bahwa penderitaan akibat embargo tersebut juga adakalanya dilaporkan oleh media massa. Berita utama bagian bisnis di *New York Times* bertajuk "Ledakan Harga Cerutu Kuba: Kini Embargo Benar-benar Menyiksa Ketika Asap Tebal Makin Menghilang." Berita tersebut melaporkan tentang keluhan para eksekutif bisnis di "ruang merokok eksklusif di Manhattan," yang menyatakan bahwa "belakangan ini sangat sulit mendapat cerutu Kuba di Amerika Serikat" kecuali dengan "harga yang mencekik leher perokok paling berat." [27]

Ketika pemerintahan Clinton, sembari memperkuat hak-hak istimewa kelompok berkuasa, menisbahkan dampak buruk dari perang ekonomi terburuk sepanjang sejarah kepada kebijakan rezim yang dijanjikan AS akan "dijauhkan" dari rakyat Kuba yang menderita, kesimpulan yang lebih valid tampaknya justru sebaliknya. Kesimpulan itu adalah "kekangan ekonomi AS atas Kuba" telah dirancang, dilaksanakan, dan dalam era pasca perang dingin makin ditingkatkan, atas dasar alasan-alasan yang tersirat dalam laporan Arthur Schlesinger pada Presiden Kennedy. Kebanyakan Misi Amerika Latin Kennedy mengkhawatirkan keberhasilan program peningkatan kesehatan dan standar hidup akan membantu penyebaran "gagasan Castro mengenai penanganan persoalan oleh tangan sendiri" serta mendorong "orang miskin dan tersisih" di wilayah dengan kualitas hidup terburuk di dunia untuk "menuntut kesempatan memperoleh kehidupan yang layak" serta dampak lain yang tak kurang berbahayanya. Terdapat sejumlah catatan dokumenter yang mendasar dan meyakinkan, dipadu dengan tindakan konsisten yang cukup didasarkan pada motif rasional, yang tidak mendukung penilaian ini. Untuk mengevaluasi klaim bahwa

kebijakan berasal dari kepedulian atas hak asasi manusia dan demokrasi, tinjauan lebih singkat pada catatan ini jauh dari cukup, setidaknya bagi mereka yang sekadar berpura-pura serius menanggapi hal ini.

Bagaimanapun juga, tidak tepat untuk mengenang kembali persoalan-persoalan semacam itu ketika kita merayakan kemenangan "nilai-nilai Amerika." Kita juga tidak seharusnya mengingat bahwa Clinton, didorong oleh hasrat yang sama akan perdagangan bebas, telah "menekan Meksiko untuk suatu perjanjian yang akan mengakhiri pengapalan tomat murah ke Amerika Serikat." Itu adalah suatu hadiah bagi petani Florida yang diberikan oleh Meksiko seharga 800 juta dolar per tahun, dan melanggar perjanjian NAFTA seperti halnya WTO (sekalipun hanya "dalam semangat" karena ini merupakan permainan kekuasaan yang samar dan tidak memerlukan tarif resmi). Para pejabat menjelaskan keputusan secara langsung: tomat Meksiko lebih murah dan konsumen lebih menyukainya. Pasar bebas berfungsi namun hasilnya keliru. Atau mungkin tomat adalah ancaman bagi keamanan nasional.[28]

Jelasnya, tomat dan telekomunikasi adalah bidang yang sangat berbeda. Segala hadiah yang mungkin diberikan Clinton pada petani Florida dibayangi oleh syarat-syarat yang diperlukan industri telekomunikasi sekalipun lepas dari apa yang digambarkan Thomas Jefferson sebagai "rahasia yang disimpan paling rapat dalam pemilu 1996": bahwa "dibandingkan apa pun, sektor telekomunikasi-lah yang paling menyelamatkan Bill Clinton" –yang menerima bantuan utama kampanye dari "sektor yang sangat menguntungkan ini." Undang-Undang Telekomunikasi (Telecommunications Act) tahun 1996 dan perjanjian WTO sebenarnya merupakan ucapan terimakasih sekalipun mungkin hasilnya tidak akan benar-benar berbeda jika gabungan sumbangan yang berbeda telah dipilih oleh dunia bisnis menderita pada saat yang disebut *Business Week* keuntungan "spektakuler" dalam "Pesta Kejutan yang Lain bagi Perusahaan Amerika."

Yang terpenting di antara kebenaran yang tidak perlu diingat adalah seperti telah disinggung sedikit di awal: "penguatan individualisme ala Reagan" dan "kidung suci pasar bebas" yang dikhotbahkan (kepada orang miskin dan lemah) ketika proteksi mencapai tingkat yang tak pernah diduga dan pemerintah menghamburkan dana publik untuk industri teknologi tinggi tanpa diiringi kontrol sebagaimana harusnya. Di sini kita mulai mencapai inti permasalahan. Alasan bagi skeptisisme mengenai "hasrat" yang baru saja diulas cukup valid, namun itu adalah catatan kaki dari cerita sebenarnya, yakni bagaimana perusahaan-perusahaan AS dirancang dengan sangat tepat untuk menguasai pasar internasional adalah perwujudan mutakhir dari "nilai-nilai Amerika."

Namun sekali lagi, di balik itu adalah kisah yang lebih besar, yang menceritakan kepada kita tentang sebuah dunia kontemporer: mengenai kenyataan sosial dan ekonomi, serta cengkeraman ideologi dan doktrin, termasuk doktrin yang disusun untuk menghapus harapan, kepasrahan, dan keputusasaan.

Diterbitkan pertama kali di Z, Maret 1997

Catatan

1. David Sanger, *NYT*, 17 Februari 1997; Youssef Ibrahim, *NYT*, 13 Desember 1996; Harvey Cox, *World Policy Review*, Musim Semi 1997; Martin Nolan, *Boston Globe*, 5 Maret 1997; John Buell, *Progressive*, Maret 1997.
2. Shafiqul Islam, *Foreign Affairs*, America and the World, 1989-90.
3. Patrick Low, *Trading Free* (Twentieth Century Fund, 1993).

4. *Observer* (London), 19 dan 12 Januari 1997; Noam Chomsky, *Powers and Prospects* (South End, 1996), 18; *Independent*, 24 dan 25 November 1996; *Guardian Weekly*, 5 Januari 1997; *Financial Times*, 17 Januari 1997.
5. Gary Silverman dan Shada Islam, *Far Eastern Economic Review*, 27 Februari 1997.
6. *Reuters*, 1 Februari 1996, disebutkan dalam Andrew Grove, *Only the Paranoid Survive* (Doubleday, 1996), 201, hh. 172-3. Mengenai hal ini, lihat Robert McChesney, *Corporate Media and the Threat to Democracy* (Open Media Pamphlet Series/Seven Stories Press, 1997); Edward Herman dan Robert McChesney, *The Global Media* (Cassell, 1997).
7. *Jornal do Brasil*, 10 dan 19 Maret 1997; *Revista Atencao*, Maret 1997, dicetak ulang di Sem Terra, Februari 1997; Carlos Tautz, *Latinamerica Press*, 13 Maret 1997.
8. Deborah Hargreaves, *Financial Times* (London), 2 Februari 1996.
9. Tajuk rencana, *NYT*, 17 Februari 1997; Peter Morici, *Current History*, Februari 1997.
10. Tajuk Rencana, *NYT*, 17 Februari 1997; *NYT*, 13 November 1996; Wayne Smith, *In These Times*, 9 Desember 1996; Anthony Kirkpatrick, *Lancet* 358, no. 9040, 30 November 1996, dicetak ulang di *Cuba Update*, Musim Dingin 1997; David Sanger, 21 Februari 1997.
11. Ian William, *Middle East International*, 21 Maret 1997. Pada penafsiran standar yang muluk mengenai catatan PBB, lihat Noam Chomsky, *Deterring Democracy* (Verso 1991), bab 6; *Letters from Lexington* (Common Courage, 1993), bab 8 dan 9.
12. Abraham Sofaer, *The United States and the World Court*, Departemen Luar Negeri AS, Biro Hubungan Masyarakat, Seri Kebijakan Terbaru, no 769, Desember 1985

13. Jules Kagian, *Middle East International*, 21 Oktober 1994
14. Frances Williams dan Nancy Dunne, *Financial Times*, 21 November 1996
15. *Wall Street Journal*, 25 Maret 1997
16. Ruth Leacock, *Requiem for Revolution* (Kent State, 1990), 33
17. David Sanger, *NYT*, 21 Februari 1997
18. Arthur Schlesinger, surat, *NYT*, 26 Februari 1997
19. *Foreign Relations of the United States*, 1961-63, vol. XII, *American Republics*, 13f., 33,9. (Kantor Percetakan Negara, Washington, DC 1997)
20. Tim Weiner dan Miyera Navarro, *NYT*, 26 Februari 1997, juga melaporkan bahwa dinas rahasia AS menyatakan setidaknya satu dari pesawat tersebut, mungkin ketiganya, telah melanggar wilayah udara Kuba dan menerima peringatan dari pengawas penerbangan di Havana. Pada serangan teroris baru-baru ini, lihat *Cuba Update*, Maret/April 1996. Angus Shaw, *AP*, 27 Februari; Donna Bryson, *AP*, 20 Februari; Lionel Martin, *Reuters*, 26 Maret 1996 (dari *San Jose Mercury News*). *Boston Globe*, 24 Maret 1996
21. Michael Stuehrenberg, Die Zeit; *World Press Review*, Desember 1988
22. Barrie Dunsmore, "Live from the Battlefield," laporan diskusi, 8 Januari 1996
23. Piero Gleijeses, "Ships in the Night: The CIA, the Whitehouse and the Bay of Pigs," *Journal of Latin American Studies* 27, no. 1, Februari 1995, 1-42; Jules Benjamin, *The United States and the Origins of the Cuban Revolution* (Princeton University Press, 1990)
24. *Miami Herald*, edisi Spanyol, 18 Desember 1994; Maria Lopez Vigil, *Envío* (Jesuit University of Central America, Managua), Juni 1995

25. Kirkpatrick, op. Cit. Joanna Cameron, "*The Cuban Democracy Act of 1992: The International Complications*," Fletcher Forum (Musim Dingin,/Semi 1996). Lihat Noam Chomsky, *Year 501* (South End, 1993), bab 6, untuk latar belakang dan rujukan
26. Cameron, "*Cuban Democracy Act*"; American Association for World Health, *Denial of Food and Medicine: The Impact of the U. S. Embaro on Health and Nutrition in Cuba*, Maret 1997; Victoria Brittain, *Guardian Weekly*, 16 Maret 1997
27. *NYT*, 17 April 1996
28. David Sanger, *NYT*, 12 Oktober 1996. Setahun kemudian, pemerintahan Clinton memberlakukan bea tinggi pada superkomputer dari Jepang. Lihat bab VII
29. Thomas Ferguson, *Mother Jones*, November/Desember 1996, *Business Week*, 12 Agustus 1996

BAB IV
Demokrasi Pasar dalam Tatanan Neoliberal: Antara Doktrin dan Kenyataan

Disarikan dari kuliah tahunan Davie Memorial tahunan di University of Cape Town, Afrika Selatan, Mei 1997

Saya diminta untuk membahas beberapa aspek akademik atau kebebasan manusia. Ini adalah permintaan yang menawarkan banyak pilihan. Saya akan membahas beberapa hal sederhana saja.

Kebebasan tanpa kesempatan adalah hadiah dari setan, dan penolakan untuk menyediakan kesempatan merupakan kejahatan. Takdir mereka yang lebih lemah memperlihatkan adanya perbedaan yang lebih tajam antara hal ini dengan sesuatu yang mungkin disebut "peradaban." Ketika saya sedang berbicara, seribu anak meninggal akibat penyakit yang sebenarnya mudah dicegah, dan sekitar dua kali lipat dari jumlah itu perempuan yang akan meninggal atau menderita akibat komplikasi kehamilan atau persalinan karena kurang mendapat bantuan dan penanganan, bahkan yang sederhana sekalipun.[1] UNICEF memperkirakan bahwa untuk mengatasi tragedi tersebut dan untuk menjamin akses universal pada layanan sosial dasar

diperlukan seperempat anggaran belanja tahunan militer di "negara berkembang", atau sekitar 10% anggaran belanja militer AS. Diskusi serius mengenai kebebasan manusia seharusnya mengarah kepada hal-hal yang berlawanan dengan kenyataan ini.

Banyak pihak telah sepakat bahwa penanganan untuk wabah sosial mendasar ini ada dalam jangkauan tangan. Harapan ini bukannya tanpa dasar. Tahun-tahun terakhir ini kita telah menyaksikan kejatuhan tiran-tiran yang brutal, berkembangnya pemahaman ilmiah yang menawarkan janji-janji besar, dan banyak lagi alasan untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Wacana mereka yang dianugerahi hak istimewa ditandai dengan kepercayaan diri dan kejayaan: langkah untuk maju telah jelas dan tidak ada kemungkinan lain. Tema dasar yang dicetuskan dengan tegas dan jelas adalah bahwa "kemenangan Amerika dalam Perang Dingin adalah kemenangan bagi seperangkat prinsip politik dan ekonomi: demokrasi dan pasar bebas." Prinsip-prinsip ini adalah "gelombang masa depan—di mana Amerika menjadi penjaga gawang dan model sekaligus." Saya mengutip pimpinan komentator politik *New York Times*, namun gambaran ini adalah gambaran konvensional, yang diulang terus-menerus di seluruh dunia dan dianggap akurat bahkan oleh para kritikus. Tema dasar ini juga disebut sebagai "Doktrin Clinton", yang menyebutkan bahwa misi baru kita adalah untuk "memperkokoh kemenangan demokrasi dan pasar terbuka" yang baru saja dimenangi.

Namun tetap ada satu spektrum ketaksepakatan: di satu kutub, "para idealis Wilsonian" mendesak dedikasi berkelanjutan dari misi kebajikan. Sementara di kutub lain, para "realis" menentang bahwa kita mungkin tidak punya cukup kemampuan untuk mengupayakan "meliorisme (*ed.*: mengubah tatanan untuk sesuatu yang dianggap lebih baik) global" ini, dan sudah seharusnya tidak mengabaikan kepentingan kita sendiri ketika melayani pihak lain. Di tengah kedua kutub itulah terhampar jalan menuju dunia yang lebih baik. '

Kenyataan yang tampak oleh saya sedikit berbeda. Semua perdebatan menyangkut kebijakan publik yang ada sekarang hanya memiliki sedikit relevansi terhadap kebijakan, sebagaimana yang sudah-sudah: Amerika Serikat atau kekuatan dunia yang lain tidak ada yang dipandu oleh semangat "meliorisme global." Demokrasi sedang terancam di mana-mana, termasuk di negara-negara industri terkemuka. Setidaknya demokrasi, dalam pengertian sejatinya, yang berarti juga kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola kepentingan pribadi dan kepentingan bersama mereka. Hal serupa juga berlaku mengenai pasar. Serangan pada demokrasi dan pasar sesungguhnya saling terkait. Akar masalahnya terletak pada kekuatan entitas perusahaan yang kian terkait dan bergantung pada negara yang kuat, dan kian tak terjangkau lagi oleh masyarakat. Kekuatan mereka yang luar biasa tumbuh sebagai hasil kebijakan sosial yang makin mengglobalkan model struktural dunia ketiga, di mana dengan kelompok yang sangat makmur dan memiliki hak istimewa semakin meningkat jumlahnya bersamaan dengan bertambahnya "proporsi mereka yang bersedia bekerja dalam situasi serba kekurangan sambil diam-diam bermimpi tentang pemerataan rezeki," sebagaimana yang diprediksi James Madison, perumus demokrasi Amerika terkemuka. [3] Pilihan-pilihan kebijakan ini paling jelas tampak di masyarakat Anglo-Amerika, dan kemudian meluas ke seluruh dunia. Mereka tidak dapat diasosiasikan dengan "apa yang telah ditetapkan pasar bebas, dalam kebijakannya yang tak terbatas dan misterius," [4] "perluasan tak terelakkan atas 'revolusi pasar'," "penguatan individualisme ala Reagan," atau "ortodoksi baru" yang "memberi pasar dukungan penuh." Sebaliknya intervensi pemerintah memainkan peran menentukan, seperti yang terjadi di masa lalu, dan dasar kerangka kebijakan tersebut nyaris bukan sesuatu yang baru. Versi terbaru mencerminkan "penindasan terang-terangan modal atas pekerja" selama lebih dari lima belas tahun, mengutip kalimat insan pers, [5] yang seringkali melaporkan dengan akurat persepsi komunitas bisnis yang sangat sadar kelas dan memicu terjadinya perang antarkelas.

Jika persepsi ini valid, maka jalan menuju sebuah dunia yang lebih adil dan bebas berada di luar skenario yang dirumuskan dengan memanfaatkan hak-hak istimewa dan kekuasaan. Saya tidak berharap untuk membuat kesimpulan semacam itu di sini, namun cukuplah untuh dikatakan bahwa kesimpulan semacam itu cukup beralasan untuk dipertimbangkan, meski tentu dengan hati-hati. Saya pun tidak berharap untuk lebih jauh menyatakan bahwa doktrin yang tengah berlaku nyaris tidak dapat bertahan jika bukan karena kontribusinya dalam "mengendalikan setiap inci pemikiran publik, seperti halnya militer mengendalikan tubuh prajuritnya," seperti kita kutip lagi dari Edward Bernays ketika menguliahi para pelaku bisnis mengenai pelajaran yang diambil dari propaganda selama perang (lihat bab 2).

Cukup mencolok bahwa di negara-negara yang paling menerapkan demokrasi, tumbuh kesadaran mengenai kebutuhan untuk "menerapkan pelajaran" mengenai sistem propaganda yang sangat berhasil pada Perang Dunia I "untuk tujuan pengorganisasian peperangan politik," sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan Partai Konservatif Inggris tujuh puluh tahun lalu. Pengikut liberal Wilson di Amerika Serikat, termasuk tokoh intelektual dan sosok terkemuka dalam ilmu politik, menarik kesimpulan yang sama dalam tahun yang sama. Sementara di sudut lain peradaban Barat, Adolf Hitler menjanjikan bahwa di masa yang akan datang Jerman tidak akan dapat dikalahkan lagi dalam perang propaganda. Dia juga merumuskan caranya sendiri dalam menerapkan pelajaran dari propaganda Anglo-Amerika untuk perang politik di dalam negerinya. [6]

Sementara itu dunia bisnis mengingatkan tentang "para industrialis yang menghadapi kesulitan" dalam "kekuatan politik massa yang baru saja disadari" serta kebutuhan untuk bertarung dan memenangkan "pertempuran abadi menguasai pemikiran manusia," dan "mengindoktrinasi warga negara dengan kisah kapitalisme" sehingga "mereka mampu mengulang kisah tersebut dengan persis sama" dan seterusnya, dalam urutan yang mengagumkan disertai upaya yang sungguh mengesankan. [7]

Untuk mengetahui makna sebenarnya dari "prinsip-prinsip politik dan ekonomi" yang diyakini sebagai "gelombang masa depan," tentunya penting untuk mencermati lebih dalam dari sekadar embel-embel retoris dan pernyataan publik, serta menyelidiki pelaksanaan sebenarnya dari prinsip-prinsip tersebut dan catatan dokumenter internasional. Pengamatan cermat pada kasus-kasus tertentu merupakan cara yang paling baik, namun kasus-kasus tersebut harus dipilih dengan hati-hati untuk mendapat gambaran yang tepat. Ada beberapa panduan dasar. Satu pendekatan yang bagus adalah mengambil contoh yang dipilih oleh para pendukung doktrin tersebut sebagai kasus terkuat mereka. Cara lain adalah menyelidiki catatan tentang kasus di mana terjadi pengaruh paling kuat dan campur tangan paling lemah, sehingga kita bisa melihat prinsip operasionalnya dalam bentuknya yang paling murni. Jika kita ingin memastikan apa yang disebut Kremlin sebagai "demokrasi" dan "hak asasi manusia," kita tidak akan terlalu serius mencermati kritikan pedas di harian *Pravda* mengenai rasisme di Amerika Serikat atau teror yang dilakukan pemerintah di negara-negara bagiannya, apalagi menyangkut kecamannya atas pokok-pokok moral di negara yang menjadi musuh mereka. Akan lebih jelas jika kita melihat pelaksanaan "demokrasi rakyat" di Eropa Timur. Permasalahannya cukup elementer dan berlaku juga untuk "penjaga gawang dan model" yang dirancang sendiri. Amerika Latin adalah laboratorium yang paling jelas dalam hal ini, terutama Amerika Tengah daerah Karibia. Di sini Washington hanya menghadapi sedikit tantangan eksternal selama hampir satu abad, sehingga prinsip-prinsip dasar untuk perumusan kebijakan, serta wujud "Konsensus Washington" neoliberal yang kita lihat hari ini, tampak paling jelas jika kita mengamati situasi di wilayah ini dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut terbentuk.

Cukup menarik bahwa pengamatan semacam ini jarang dilakukan, dan jika pun diusulkan akan menuai kecaman keras dan dianggap sebagai ekstremis atau lebih buruk dari itu. Jadi saya serahkan saja hal ini sebagai "tugas untuk pembaca,"

sementara saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa catatan yang ada memberi pelajaran berharga mengenai prinsip-prinsip politik dan ekonomi yang harus menjadi "gelombang masa depan."

"Perang salib penegakan demokrasi"—demikian sebutannya—yang dilancarkan oleh Washington mendapat dukungan luar biasa selama pemerintahan Reagan, dan Amerika Latin terpilih sebagai laboratorium percobaan. Capaian di Amerika Latin tersebut selalu dikutip sebagai contoh bagaimana AS, menurut sejumlah editor di sebuah jurnal internasional terkemuka mengenai liberalisme Amerika, menjadi "ilham bagi kemenangan demokrasi pada masa kita,"[8] Studi ilmiah terbaru mengenai demokrasi melukiskan tentang "kebangkitan kembali demokrasi di Amerika Latin" sebagai hal yang "mengesankan" tapi "bukannya tanpa masalah"; "hambatan-hambatan untuk menerapkannya" tetap "sangat kuat", namun mungkin dapat diatasi dengan integrasi yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Penulisnya, Sanford Lakoff, menunjuk "Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement—NAFTA) yang bersejarah" sebagai instrumen potensial untuk demokratisasi. Di wilayah yang telah sekian lama berada di bawah pengaruh AS, tulisnya, negara-negara tersebut bergerak menuju demokrasi, dan berhasil "menyelamatkan diri dari intervensi militer" serta "perang sipil yang brutal."

Sekarang mari kita mulai melihat lebih dekat pada kasus-kasus terbaru, yang secara alamiah mendapat pengaruh luar biasa dari AS. Kita juga akan melihat kasus-kasus lain yang biasa dipilih untuk menggambarkan keberhasilan dan janji "misi Amerika."[9]

Lakoff menyatakan, "hambatan utama untuk menerapkan" demokrasi adalah upaya untuk melindungi "pasar domestik"—yakni mencegah perusahaan asing (terutama AS) agar tidak memiliki kontrol yang besar terhadap masyarakat. Kita harus memahami bahwa demokrasi dipahami sebagai pergeseran signifikan dari proses pengambilan keputusan ke tangan sejumlah besar tiran, yang sebagian besar di antaranya adalah pihak asing. Sementara itu arena publik kian menyempit ketika negara

mengalami proses "minimalisasi" akibat prinsip-prinsip politik dan ekonomi neoliberal yang dimenangkan. Penelitian Bank Dunia menyebutkan bahwa ortodoksi baru menunjukkan "peralihan dramatis dari model politik yang pluralis dan didasarkan pada prinsip partisipasi menuju bentuk otokratik dan teknokratik." Hal ini sangat sesuai dengan elemen-elemen terpenting dari pemikiran liberal dan progresif abad dua puluh dan, dalam varian lain, dengan model Leninis; dua hal yang jauh lebih mirip satu sama lain daripada yang selama ini diketahui. [10]

Dengan mengamati latar belakang ini kita akan mendapat pemahaman berharga mengenai konsep demokrasi dan pasar dalam pengertiannya yang operatif.

Lakoff tidak membahas mengenai "kebangkitan kembali demokrasi" di Amerika Latin, namun dia mengutip sumber resmi yang menyebutkan tentang perang salib Washington tahun '80-an. Penulisnya adalah Thomas Carothers, yang menggabungkan teori pengetahuan dengan "persepektif orang dalam" dan pernah bekerja untuk program "penguatan demokrasi" di Departemen Luar Negeri era Reagan. [11] Carothers menganggap "dorongan Washington untuk memperbaiki demokrasi" sebagai bentuk "kejujuran", namun secara umum merupakan kegagalan. Lebih jauh lagi, kegagalan tersebut bersifat sistematis: di mana pengaruh Washington paling kecil, yakni di Amerika Selatan, di sanalah terjadi kemajuan nyata menuju demokrasi. Biasanya yang terjadi adalah penentangan oleh pemerintahan Reagan, yang kemudian mengambil keuntungan ketika proses tersebut terbukti tidak dapat dibendung lagi. Sebaliknya, ketika pengaruh Washington paling besar, kemajuan yang terjadi sangat kecil. Dan ketika ini terjadi peran AS menjadi sangat kecil atau bahkan negatif. Kesimpulan umum yang ditariknya adalah AS harus berusaha untuk mempertahankan "tatanan dasar ... bagi masyarakat yang paling tidak demokratis" dan menghindari "perubahan yang dipicu oleh masyarakat luas", dan karenanya "mau tak mau hanya [mencari] demokrasi yang terbatas, yang didorong oleh pendekatan *top-down*, dan tidak berisiko mengubah struktur

kekuatan tradisional yang telah lama menjadi sekutu Amerika Serikat."

Anak kalimat terakhir ini memerlukan penjelasan. Istilah *Amerika Serikat* biasanya digunakan untuk menunjuk pada struktur kekuatan di dalam negeri Amerika Serikat. "Kepentingan nasional" adalah kepentingan kelompok tertentu, yang hanya sedikit saja terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga kesimpulannya adalah Washington berusaha mencari bentuk demokrasi dari atas ke bawah yang tidak akan mengubah struktur kekuatan tradisional dengan siapa struktur kekuatan di Amerika Serikat telah lama bersekutu. Ini bukan fakta yang mengejutkan apalagi baru.

Di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, "demokrasi dari-atas-ke-bawah" memiliki akar yang kuat pada sistem Konstitusional. [12] Kita mungkin bisa mendebat, seperti yang dilakukan beberapa sejarahwan, bahwa prinsip-prinsip ini akan kehilangan giginya ketika teritori negara ditaklukkan dan diduduki. Apa pun penilaian orang mengenai tahun-tahun itu, pada akhir abad ke-19 doktrin-doktrin tersebut diperbarui dan lebih opresif. Ketika James Madison berbicara tentang "hak-hak perorangan," dia benar-benar memaksudkan *orang*. Namun pertumbuhan ekonomi industri dan munculnya korporasi ekonomi mengarahkan istilah itu pada makna yang benar-benar baru. Dalam dokumen resmi sekarang ini, "Pengertian 'orang' mencakup setiap individu, cabang, kemitraan, kelompok terkait, asosiasi, lahan, konsorsium, perusahaan atau organisasi lain (terorganisir atau tidak di bawah undang-undang negara mana pun), atau semua lembaga pemerintahan," [13] suatu konsep yang akan mengejutkan Madison dan sarjana-sarjana lainnya yang intelektualitasnya berakar pada Abad Pencerahan dan liberalisme klasik.

Perubahan radikal dalam konsepsi mengenai hak asasi manusia dan demokrasi diperkenalkan pertama kali bukan oleh undang-undang, melainkan oleh keputusan hukum dan pendapat intelektual. Perusahaan, yang sebelumnya dianggap sebagai

entitas artifisial tanpa hak, dianugerahi semua hak perorangan, dan banyak lagi lainnya, karena mereka adalah "orang abadi" dan "orang" dengan kekayaan dan kekuatan luar biasa. Lebih jauh lagi, mereka tidak lagi terikat pada tujuan spesifik yang ditetapkan oleh piagam negara, serta dapat bertindak sesuai keinginan mereka nyaris tanpa kendala. [14]

Para sarjana hukum konservatif menentang keras pemberian hak seperti ini, karena menyadari bahwa hal ini akan melemahkan pandangan tradisional yaitu hak melekat dalam individu, serta melemahkan prinsip-prinsip pasar. Namun bentuk baru peraturan otoriter telah dilembagakan, demikian pula halnya dengan upah buruh yang dianggap nyaris tidak lebih baik dari perbudakan menurut pola pikir Amerika sepanjang abad ke-19, yang tidak hanya ditandai dengan munculnya gerakan tapi juga oleh tokoh seperti Abraham Lincoln, Partai Republik, dan media terkemuka. [15]

Topik ini berimplikasi luas pada pemahaman terhadap sifat dasar demokrasi pasar. Tetapi saya hanya dapat mengatakan itu sampai di sini. Hasil material dan ideologis membantu menjelaskan pemahaman bahwa "demokrasi" di luar negeri harus merefleksikan model demokrasi di dalam negeri: bentuk kontrol dari atas ke bawah, publik yang hanya berperan sebagai penonton dan bukan partisipan dalam arena pengambilan keputusan, yang harus menyisihkan "pihak luar yang tak terdidik dan suka ikut campur", sesuai pemikiran terbaru teori demokrasi. Namun gagasan umum ini bersifat standar dan memiliki dasar kuat dalam tradisi, dan secara radikal dimodifikasi dalam era baru "entitas hukum bersama."

Kembali ke "kemenangan demokrasi" di bawah panduan AS, baik Lakoff maupun Carothers tidak mempertanyakan bagaimana Washington menjaga struktur kekuatan lama pada masyarakat yang benar-benar tidak demokratis. Topik mereka bukan tentang perang teroris yang mengakibatkan puluhan ribu jiwa terbunuh secara keji, menciptakan jutaan pengungsi, dan kehancuran yang tak dapat dipulihkan—dalam skala besar adalah

perang melawan Gereja yang berubah menjadi musuh ketika mereka mengadopsi "pilihan lain yang lebih baik bagi orang miskin", dan mencoba membantu orang-orang yang menderita untuk meraih keadilan dan hak demokratis. Adalah lebih dari sekadar simbolisme ketika dekade '80-an yang mengerikan diawali dengan pembunuhan seorang kepala uskup yang menjadi "penyambung lidah mereka yang bisu," dan diakhiri dengan pembantaian enam intelektual Jesuit terkemuka yang memilih untuk mengabdi di jalur yang sama. Dalam kedua kasus tersebut pelakunya adalah teroris bersenjata dan dilatih oleh pemenang "perang salib untuk demokrasi." Kita harus mencatat dengan cermat mengenai fakta bahwa intelektual pembangkang di Amerika Tengah mengalami dua jenis pembantaian: dibunuh dan dibungkam. Pendapat mereka, dan bahkan eksistensi mereka, nyaris tidak diketahui di Amerika Serikat. Tidak seperti pembangkang di negara-negara yang menjadi musuh AS, yang sangat dihormati dan dikagumi.

Hal-hal semacam ini tidak dimasukkan dalam sejarah versi para pemenang. Yang tercantum dalam penelitian Lakoff, dan ini bukan hal yang baru, adalah acuan pada "intervensi militer" dan "perang sipil", tanpa mengidentifikasi adanya faktor luar. Kedua hal ini tidak begitu saja disisihkan oleh mereka yang mencoba mencari keterkaitan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya membentuk masa depan, jika struktur kekuatan memang terbukti adanya.

Salah satu deskripsi yang paling jelas adalah gambaran Lakoff mengenai Nikaragua, meski lagi-lagi standar: "Perang sipil berakhir menyusul pemilihan demokratis dan upaya sulit sedang berlangsung untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mampu mengatur dirinya sendiri." Dalam dunia nyata, negara *superpower* yang menyerang Nikaragua meningkatkan serangannya *setelah* pemilihan umum demokratis pertama. Pemilu tahun 1984 secara tertutup diawasi dan dianggap sah oleh Asosiasi Sarjana Amerika Latin (Latin American Scholars Association/ LASA), delegasi parlemen Inggris dan Irlandia, serta

pihak lainnya termasuk delegasi pemerintah Belanda yang dikenal sinis dan jelas-jelas mendukung kekejaman ala Reagan. Tokoh demokrasi Amerika Tengah, José Figueres dari Kosta Rika, yang juga seorang pengamat yang kritis, mengakui pemilu tersebut sah di "negara yang diinvasi" dan menyeru Washington untuk mengizinkan para Sandinista "untuk mengakhiri dengan damai apa yang mereka telah mulai, karena mereka berhak mendapatnya." Amerika Serikat sangat menentang pelaksanaan pemilu dan berusaha menggagalkannya karena khawatir bahwa pemilu demokratis akan bersinggungan dengan agenda perang melawan teroris. Namun kekhawatiran itu dihapuskan oleh keberhasilan sistem doktrin yang secara efisien menghambat laporan-laporan yang ada dan secara otomatis mengadopsi propaganda negara yang menyebut bahwa pemilu adalah tipuan tak berarti. [16]

Yang juga terabaikan adalah fakta bahwa ketika pemilu selanjutnya mulai mendekati jadwal, [17] Washington sama sekali tidak meragukan bahwa kecuali hasilnya sesuai harapan, rakyat Nikaragua akan harus terus bertahan dengan perekonomian ilegal dan "penggunaan kekuatan yang melanggar hukum." Dua hal tersebut telah dilarang oleh Mahkamah Peradilan Internasional dan diperintahkan untuk diakhiri – suatu perintah yang sia-sia belaka. Kali ini hasilnya dapat diterima dan dipuji habis di AS dengan semangat tinggi. [18]

Terdepan di kalangan kritikus independen adalah kolumnis Anthony Lewis dari *New York Times*, yang sangat menghargai "eksperimen yang dilakukan dalam damai dan demokrasi" oleh Washington yang menunjukkan bahwa "kita hidup dalam abad romantis." Metode eksperimental tersebut bukan rahasia. Karenanya majalah *Time* yang ikut merayakan "kelahiran demokrasi" di Nikaragua menggambarkannya dengan gamblang: yaitu untuk "menghancurkan perekonomian serta menyulut perang yang panjang dan mematikan sampai masyarakat pribumi yang kelelahan menjatuhkan pemerintahan yang tidak diinginkan dengan tangan mereka sendiri", dengan biaya "minimal" yang

harus kita tanggung, meninggalkan para korban "dengan jembatan hancur, pembangkit listrik yang disabotase, dan lahan pertanian yang rusak," serta mempersenjatai kandidat Washington dengan "isu kemenangan" yaitu mengakhiri "kemiskinan rakyat Nikaragua" tanpa menyebutkan sama sekali tentang teror berkelanjutan, yang memang sebaiknya tidak disebutkan. Pastinya, biaya bagi mereka hampir tidak bisa disebut "minimal": Carothers mencatat bahwa jumlah korban "per kapita jauh lebih tinggi dibanding jumlah warga AS yang terbunuh dalam Perang Sipil dan *gabungan* semua perang abad ke-20." [19] Dampaknya adalah "Kemenangan bagi *Fair Play* AS," kata sebuah kepala berita di *New York Times* dengan nada gembira, membuat masyarakat Amerika "Bersatu dalam Sukacita," menurut cara Albania dan Korea Utara.

Metode "abad romantis," dan reaksi terhadapnya di kelompok-kelompok yang tercerahkan memberitahu kita lebih banyak mengenai prinsip-prinsip demokrasi yang terbukti unggul. Metode ini juga menjelaskan mengapa "sulit" untuk "menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mampu mengatur dirinya sendiri" di Nikaragua. Benar bahwa upaya itu kini sedang berlangsung dan terbukti berhasil untuk beberapa golongan minoritas yang mendapat keistimewaan, sementara sebagian besar penduduk menghadapi bencana ekonomi dan sosial—semuanya menurut pola yang sudah umum dari ketergantungan terhadap Barat. [20] Perhatikan bagaimana hal ini merupakan contoh yang mendorong editor *New Republic* menyatakan diri mereka sebagai "inspirasi bagi kejayaan demokrasi masa kini," senada dengan sorakan antusias lainnya.

Kita belajar lebih banyak mengenai prinsip-prinsip unggul dengan mengingat bahwa figur-figur yang sama dari kalangan intelektual liberallah yang telah mendorong agar perang Washington dilakukan tanpa ampun, dengan dukungan militer terhadap "gaya fasis Latin... tak peduli berapa banyak yang terbunuh" karena "sejumlah prioritas Amerika yang bernilai lebih tinggi daripada hak asasi manusia Salvador." Lebih rinci lagi,

editor *New Republic*, Michael Kinsley yang mewakili arus kiri dalam debat TV, memperingatkan tentang kritik tanpa pemikiran mendalam terhadap kebijakan resmi Washington untuk menyerang target sipil yang tak terlindungi. Dia mengakui bahwa operasi teroris internasional mengakibatkan "penderitaan sipil yang luar biasa," namun bisa jadi "sangat sah" jika "analisis untung-rugi" menunjukkan bahwa "jumlah darah mengalir dan penderitaan yang terjadi "menghasilkan demokrasi" sebagaimana yang didefinikan penguasa dunia. Pandangan yang tercerahkan bersikeras bahwa teror tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, namun harus sesuai dengan kriteria pragmatis. Kinsley belakangan mengamati bahwa akhir yang diharapkan telah dicapai: "Pemiskinan rakyat Nikaragua merupakan titik sebenarnya dari perang kontra dan kebijakan yang paralel dari embargo ekonomi dan veto terhadap pinjaman pembangunan internasional" yang "[telah] menghancurkan perekonomian" serta "[telah] menciptakan bencana ekonomi [yang] mungkin merupakan isu terbaik oposan pemenang." Dia kemudian ikut menyambut "kemenangan demokrasi" dalam "pemilu bebas" tahun 1990. [21]

Negara klien menikmati hak istimewa serupa. Karena itu, dalam komentarnya atas serangan Israel ke Libanon, editor *desk* luar negeri *Boston Globe*, H. D. S Greenway, yang melalui gambar melaporkan invasi besar pertama lima belas tahun sebelumnya, berkomentar bahwa "jika mengepung desa-desa Libanon, bahkan jika harus mengorbankan nyawa dan mengarahkan pengungsi sipil ke utara akan mengamankan perbatasan Israel, melemahkan Hizbullah, dan membawa kedamaian, saya akan mengatakan 'lakukan', sebagaimana akan dikatakan oleh kebanyakan warga Arab dan Israel. Namun sejarah tidak memihak pada petualangan Israel di Libanon. Mereka menyelesaikan sangat sedikit masalah dan hampir selalu menimbulkan lebih banyak masalah lain." Maka secara pragmatis, pembunuhan banyak warga sipil, pengusiran ratusan ribu pengungsi, dan penghancuran Libanon bagian selatan adalah saran yang meragukan. [22]

Ingat bahwa saya tetap berada di kelompok pembangkang dari opini yang dapat ditoleransi, yang disebut "golongan kiri," suatu fakta yang menjelaskan lebih banyak pada kita mengenai prinsip-prinsip unggul dan budaya intelektual dalam mana mereka menemukan tempatnya.

Yang juga turut menjelaskan adalah reaksi atas tuduhan periodik pemerintahan Reagan terhadap rencana Nikaragua untuk memperoleh pesawat tempur jet dari Uni Soviet (Amerika Serikat telah menekan negara sekutunya agar menolak menjual pada negara-negara musuhnya). Hawks mendesak agar Nikaragua dihancurkan dalam sekejap. Doves membalas bahwa tuduhan harus diselidiki terlebih dahulu, namun jika terbukti benar maka Amerika Serikat harus membom Nikaragua. Para pengamat yang waras memahami mengapa Nikaragua menginginkan pesawat tempur jet: yaitu untuk melindungi wilayahnya dari mata-mata CIA yang melintasi wilayahnya dengan seenaknya dan mensuplai angkatan bersenjata AS dengan informasi paling mutakhir mengenai peta kekuatan sehingga mudah bagi mereka untuk menyerang "sasaran empuk" yang tak terlindungi. Asumsi tersirat adalah bahwa tidak ada negara yang berhak melindungi warga sipilnya dari serangan AS, suatu doktrin yang nyaris tak mendapat bantahan dalam pemikiran umum.

Dalih bagi perang teroris Washington adalah pertahanan diri adalah suatu pembenaran resmi standar untuk setiap tindakan mengerikan, termasuk Holocaust Nazi. Jelas saja jika Ronald Reagan, yang mendapati bahwa "kebijakan dan tindakan pemerintah Nikaragua menyebabkan ancaman yang tidak wajar dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat", lantas menyatakan "darurat nasional untuk mengatasi ancaman tersebut" , dan ini sama sekali bukan merupakan lelucon. [7] Dengan logika yang sama, Uni Soviet memiliki hak penuh untuk menyerang Denmark, yang merupakan ancaman keamanan yang jauh lebih serius, dan tentu saja Polandia dan Hungaria ketika mereka melangkah menuju

kemerdekaan. Fakta bahwa dalih semacam terus-menerus diajukan kembali menjadikannya sebagai wacana budaya intelektual para pemenang, demikian juga halnya dengan faktor lain yang ada.

Sekarang mari kita beralih ke NAFTA, perjanjian "bersejarah" yang berperan dalam mengembangkan demokrasi ala AS di Meksiko, seperti yang disarankan Lakoff. Tinjauan lebih dekat akan dapat membantu kita. Perjanjian NAFTA dipaksakan melalui Kongres, meski mendapat tentangan sangat kuat dari masyarakat oposisi, namun didukung secara sangat luar biasa oleh dunia bisnis dan media yang sangat meyakini janji-janji menggiurkan tentang keuntungan bagi semua yang terlibat. Komisi Perdagangan Internasional AS (U.S. International Trade Commission) dan ekonom terkemuka yang melengkapi diri dengan teori terbaru juga dengan penuh percaya diri meramalkan kebenaran janji-janji tersebut. (Tapi sayangnya teori tersebut gagal memprediksi dampak menyakitkan dari Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Kanada (U.S.-Canada Free Trade Agreement), namun cukup terbukti benar untuk kasus NAFTA kali ini). Yang benar-benar tak berkutik adalah analisis cermat dari Kantor Penilaian Teknologi (Office of Technology Assessment), biro riset Kongres, yang menyimpulkan bahwa versi NAFTA yang direncanakan akan menyengsarakan sebagian besar rakyat Amerika Utara. Mereka pun mengusulkan perubahan yang mengubah penerima keuntungan menjadi kelompok-kelompok kecil investasi dan keuangan. Namun yang tetap informatif adalah tekanan pada gerakan pekerja AS yang ditunjukkan dalam analisis yang sama. Sementara pekerja dengan kejam diserang karena perspektif mereka yang dituduh "terbelakang dan tidak tercerahkan", serta "menggunakan taktik perlawanan mental" yang dimotivasi oleh "ketakutan akan perubahan dan pihak asing", saya mengambil akan contoh paling kiri dari spektrum pendapat yang ada, dalam hal ini Anthony Lewis. Tuduhan-tuduhan tersebut jelas terbukti salah, tapi masalahnya hanya kata-kata seperti itu yang dapat menjangkau publik dalam proses penegakan demokrasi. Detil

lebih lengkap adalah yang paling menjelaskan. Ini dibahas di literatur-literatur kiri sejak saat itu namun tersembunyi dari publik dan tidak bakal tercantum dalam versi remi sejarah. [24]

Saat ini dongeng tentang keajaiban NAFTA disingkirkan diam-diam ketika fakta-fakta yang sesungguhnya mulai mengemuka. Kita tidak akan mendengar lagi tentang ratusan ribu pekerjaan baru dan keuntungan besar lainnya yang tersedia bagi penduduk di tiga negara. Kabar baik ini telah digantikan oleh "sudut pandang ekonomi yang lunak"—"pandangan 'pakar'"—bahwa NAFTA *tidak* memiliki dampak berarti. *Wall Street Journal* melaporkan bahwa "pegawai pemerintah merasa frustrasi karena ketidakmampuan mereka meyakinkan para pemilih bahwa ancaman tersebut tidak akan merugikan mereka" dan bahwa jumlah orang yang kehilangan pekerjaan "jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan Ross Perot". Perot diizinkan untuk ikut dalam diskusi *mainstream* (tidak seperti OTA, gerakan Buruh, dan para ekonom yang tidak mengikuti Garis Partai, dan tentu saja para analis pembangkang) karena klaimnya yang kadang-kadang ekstrim dan gampang dijadikan bahan ejekan. Mengutip pernyataan yang menyedihkan dari seorang pegawai pemerintah, *Journal* melaporkan lebih jauh bahwa "Sulit untuk melawan para kritikus dengan mengatakan yang sebenarnya—bahwa pakta perdagangan 'sebenarnya tidak melakukan apa-apa.'" Yang dilupakan adalah akan menjadi seperti apakah "kebenaran" ketika penegakan demokrasi jauh lebih kuat disuarakan.[25]

Ketika para pakar merendahkan NAFTA yang disebut "tidak memiliki dampak signifikan," melengkapi "pandangan pakar" terdahulu yang sudah tertanam dalam memori, "pemikiran ekonomi yang bersahabat" mulai memikirkan kemungkinan perluasan "kepentingan nasional" hingga dapat menyertakan juga kepentingan masyarakat umum. Dalam kesaksiannya di depan Komite Perbankan Senat pada bulan Februari 1997, pimpinan Federal Reserve Board, Alan Greenspan, menunjukkan optimismenya yang tinggi mengenai "ekspansi ekonomi

berkelanjutan" berkat "pembatasan khusus pada peningkatan gaji [yang] tampaknya menjadi penyebab utama meningkatnya rasa tidak aman di kalangan pekerja"—suatu prasyarat nyata bagi terwujudnya masyarakat yang adil. Laporan Ekonomi Presiden bulan Februari 1997 membanggakan prestasi pemerintah namun secara tidak langsung mengacu pada "perubahan dalam institusi dan pengelolaan pasar tenaga kerja" sebagai faktor dalam "pembatasan upah secara signifikan" yang mendukung kesehatan perekonomian.

Salah satu alasan perubahan yang menguntungkan ini dicetuskan dalam sebuah penelitian yang diprakarsai oleh Sekretariat Pekerja NAFTA "mengenai dampak dari penutupan tiba-tiba sebuah pabrik berdasarkan prinsip kebebasan berserikat dan hak pekerja untuk berorganisasi di tiga negara." Penelitian tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan NAFTA sebagai reaksi terhadap keluhan para pekerja telekomunikasi mengenai pekerja ilegal yang dimanfaatkan oleh Sprint. Keluhan itu ditangani oleh Badan Hubungan Pekerja Nasional AS yang ternyata hanya memberi hukuman sangat ringan, itu pun setelah ditunda selama bertahun-tahun, dan sekadar memenuhi prosedur standar. Penelitian NAFTA oleh ekonom buruh Universitas Cornell, Kate Bronfenbrenner, dilakukan untuk publikasi di Kanada dan Meksiko namun dihalangi oleh pemerintahan Clinton. Ini menujukkan dampak signifikan NAFTA terhadap penghentian mogok kerja. Sekitar setengah dari upaya terorganisir serikat pekerja dihalangi oleh para pemilik yang mengancam akan mengalihkan produksi ke luar negeri, misalnya dengan menempatkan tulisan berbunyi "Alih Pekerjaan ke Meksiko" di depan pabrik di mana para pekerja diduga mengorganisasi diri. Tindakan itu bukan basa basi: ketika upaya buruh yang terorganisir tersebut berhasil, para pemilik menutup seluruh atau sebagian pabriknya sampai tiga kali lipat sebelum NAFTA (sekitar 15% saat itu). Penutupan pabrik terjadi hampir dua kali lebih banyak pada industri yang lebih dinamis (misalnya pabrikasi vs konstruksi).

Praktik-praktik seperti dilaporkan dalam penelitian ini adalah ilegal, namun itu hanya masalah sepele, sama sepelenya dengan pelanggaran hukum internasional dan perjanjian perdagangan yang disengaja ketika ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pemerintahan Reagan telah menegaskan kepada kalangan bisnis bahwa tindakan anti-perserikatan mereka yang ilegal tidak akan dianggap sebagai tindakan pidana negara, dan para penerus Reagan pun mengambil sikap yang sama. Ada dampak yang mendasar dari penghancuran perserikatan—atau, memakai kata-kata yang lebih halus, "perubahan dalam institusi dan pengelolaan pasar tenaga kerja" yang menyumbang pada "pembatasan upah signifikan" pada model ekonomi yang ditawarkan dengan rasa bangga pada negara-negara yang masih terbelakang, yang belum menerapkan prinsip-prinsip unggul yang akan mengarahkan mereka menuju kebebasan dan keadilan.[20]

Yang pernah ditekankan oleh pemikiran kiri mengenai tujuan NAFTA kini dengan enggan diakui kebenarannya: tujuan sebenarnya adalah untuk "mengunci Meksiko" menuju "reformasi" yang akan menjadikannya "keajaiban ekonomi." Secara teknis istilah ini berarti "keajaiban" untuk para investor AS dan golongan kaya Meksiko, sementara rakyat banyak terpuruk dalam penderitaan. Pemerintahan Clinton "lupa bahwa tujuan dasar NAFTA bukanlah untuk memajukan perdagangan melainkan memastikan reformasi ekonomi Meksiko," kata koresponden *Newsweek* Marc Levinson dengan nada menyalahkan. Hanya saja Levinson tidak menyebutkan bahwa hal yang sebaliknya disuarakan dengan sangat jelas untuk memuluskan jalannya NAFTA di tengah hujatan para kritikus yang menyebutkan "tujuan yang tidak disebutkan" ini disingkirkan oleh pemiliknya sendiri dari pertarungan gagasan pasar bebas.

Mungkin suatu hari alasan serupa akan diakui juga pada akhirnya. "Mengunci Meksiko" pada proses reformasi diharapkan akan mencegah bahaya seperti yang dideteksi para

pakar dalam Lokakarya Strategi Pembangunan Amerika Latin di Washington bulan September 1990. Lokakarya tersebut menyimpulkan bahwa hubungan dengan diktator Meksiko yang brutal cukup baik sekalipun ada satu masalah potensial: "'pengenalan demokrasi' di Meksiko dapat menjadi batu ujian hubungan khusus yang ada dengan memilih pemerintahan yang lebih tertarik untuk menantang AS dalam hal ekonomi dan semangat nasionalisnya"—tapi sekarang ini bukan lagi masalah serius ketika Meksiko "terkunci oleh reformasi" melalui kesepakatan. AS-lah yang memiliki kekuatan untuk mengabaikan sesuka hatinya kewajiban seperti yang tercantum dalam kesepakatan, bukan Meksiko.[27]

Singkatnya, ancamannya adalah demokrasi, baik di dalam maupun luar negeri, seperti yang digambarkan oleh pilihan contoh. Demokrasi dibolehkan, bahkan disambut baik, namun sekali lagi ditentukan oleh hasil dan bukan proses. NAFTA dipandang sebagai alat yang efektif untuk menghilangkan ancaman demokrasi. Ia diterapkan di dalam negeri dengan melakukan subversi secara efektif pada proses demokrasi, dan di Meksiko melalui kekuatan dan tanpa memedulikan protes publik yang substantial namun tidak efektif.[28] Hasil yang diperoleh dipaparkan sebagai instrumen yang menjanjikan untuk menumbuhkan demokrasi ala Amerika pada rakyat Meksiko yang berada dalam kegelapan. Seorang pengamat sinis yang menyadari fakta-fakta ini mungkin akan sependapat.

Sekali lagi, contoh-contoh yang dipilih mengenai kemenangan demokrasi tampak alamiah, menarik dan sekaligus jelas, meskipun bukan dalam cara yang dikehendaki.

Pernyataan Doktrin Clinton disertai dengan contoh penting untuk menggambarkan prinsip-prinsip unggul: capaian pemerintah di Haiti. Karena ini juga merupakan kasus penting, maka layak untuk dibahas dengan lebih cermat.

Benar bahwa presiden terpilih Haiti diizinkan untuk kembali, namun hanya setelah organisasi massa dipaksa mengalami teror selama tiga tahun penuh yang dilakukan oleh

tentara yang memiliki hubungan dekat dengan Washington. Pemerintahan Clinton sejauh ini tetap menolak mengembalikan 160 ribu halaman dokumen mengenai teror oleh negara milik Haiti yang dirampas pasukan militer AS—"untuk menghindari pengungkapan yang memalukan" mengenai keterlibatan pemerintah AS dengan rezim yang melakukan kudeta, menurut Human Rights Watch. [29] Penting juga untuk melihat Presiden Aristide dalam perspektif "jalur cepat menuju demokrasi dan kapitalisme" –sebagaimana dijelaskan pendukung utamanya di Washington mengenai proses mendisiplinkan pemuka agama yang dituding sebagai biang kerok.

Metode ini bukannya tidak dikenal di tempat lain, sebagaimana suatu transisi yang tidak dikehendaki dalam perjalanan menuju demokrasi formal dipikirkan.

Sebagai sebuah syarat kepulangannya, Aristide dipaksa untuk menerima program ekonomi yang mengarahkan kebijakan pemerintah Haiti pada kebutuhan akan "Masyarakat Sipil, terutama dalam hal ini sektor swasta, baik nasional maupun asing". Tapi investor AS-lah yang ditetapkan sebagai pusat masyarakat sipil Haiti beserta golongan kaya yang mendukung kudeta militer, bukannya petani dan penghuni pemukiman kumuh yang mengorganisir masyarakat sipil dengan begitu hidup dan bersemangat hingga mereka bahkan mampu memilih presidennya sendiri bagaimanapun situasinya, menolak agresi AS dan upaya mereka menjatuhkan pemerintah demokratis Haiti pertama. [30]

Aksi yang tak dapat diterima itu, yang dilakukan oleh "pihak luar yang bodoh dan suka ikut campur" di Haiti, ditangani dengan kekerasan dengan keterlibatan langsung AS, tidak hanya melalui kontak dengan kaum teroris yang berkuasa. Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) kemudian menyerukan embargo. Pemerintahan Bush dan Clinton sejak awal berusaha melemahkan hal tersebut dengan mengecualikan perusahaan AS dan juga dengan diam-diam mengizinkan Texas Oil Company mensuplai rezim yang melakukan kudeta dan para pendukungnya

yang kaya sembari melanggar sanksi resmi yang diberlakukan pemerintah. Ini adalah sebuah fakta krusial yang diungkap dengan sangat gamblang sehari menjelang pasukan AS mendarat untuk "memulihkan demokrasi" [31] namun kemudian diketahui publik, dan merupakan calon kasus berikutnya yang tidak mungkin diharapkan akan dicatat oleh sejarah resmi.

Kini demokrasi telah dipulihkan. Pemerintah yang baru telah dipaksa untuk meninggalkan program-program demokratis dan reformis yang mempermalukan Washington, serta harus mengikuti kebijakan mengenai kandidat yang didukung Washington dalam pemilu tahun 1990 di mana ia memperoleh 14% suara.

Latar belakang kemenangan ini memberikan pengetahuan yang tidak sedikit kepada kita mengenai "prinsip-prinsip politik dan ekonomi" yang akan membawa kita kepada masa depan yang sejahtera. Haiti merupakan salah satu negara koloni terkaya di dunia (bersama Bengali) dan merupakan sumber kekayaan utama Prancis. Negara ini dalam banyak hal berada di bawah kendali dan pengawasan AS, yakni sejak angkatan laut Wilson melakukan invasi terhadapnya delapan puluh tahun lalu. Sekarang negara tersebut berada dalam kekacauan hingga mungkin tidak lama lagi tidak akan dapat ditinggali. Pada tahun 1981, strategi pembangunan dari USAID-Bank Dunia dimulai dan didasarkan pada industri perakitan dan ekspor pertanian yang mengubah lahan dari pangan untuk konsumsi lokal. USAID meramalkan terjadinya "perubahan bersejarah menuju situasi pasar yang saling bergantung dengan Amerika Serikat" di sebuah negara yang akan menjadi "Taiwan dari Karibia." Bank Dunia sependapat dan menawarkan resep mereka yang biasa, yakni "ekspansi perusahaan swasta" dan minimalisasi "tujuan sosial" dan, sebagai akibatnya, meningkatkan kesenjangan dan kemiskinan serta menurunkan tingkat kesehatan dan pendidikan. Penting untuk dicatat, sebagaimana adanya, bahwa resep standar ditawarkan bersamaan dengan ceramah mengenai perlunya mengurangi kesenjangan dan kemiskinan serta memperbaiki tingkat

kesehatan dan pendidikan. Dalam kasus Haiti, konsekuensinya juga sudah bisa diduga: keuntungan bagi para industriawan AS dan orang superkaya di Haiti dan penurunan gaji sebesar 56% bagi yang lain selama tahun '80-an—singkatnya, suatu "keajaiban ekonomi." Haiti tetaplah Haiti, dan tidak menjadi Taiwan yang telah mengikuti ajaran yang secara radikal berbeda sebagaimana yang pasti diketahui para penasehat pembangunan.

Upaya pemerintah demokratis Haiti pertama adalah mencegah semakin parahnya bencana yang akan mengundang campur tangan AS serta aksi kudeta dan teror militer yang bakal mengikutinya. Dengan "pemulihan demokrasi," USAID menahan bantuannya untuk memastikan bahwa perusahaan semen dan tepung diprivatisasi demi kepentingan kalangan kaya Haiti dan investor asing ("Masyarakat Sipil" Haiti, sesuai dengan tatanan yang mendukung pemulihan demokrasi), dan melarang pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan. Agribisnis memperoleh dana dalam jumlah besar, namun tidak ada sumber daya yang tersedia bagi pertanian dan industri kerajinan desa yang menjadi sumber pemasukan bagi sebagian besar warga. Pabrik-pabrik perakitan yang dimiliki pihak asing yang mempekerjakan buruh (kebanyakan perempuan) dengan upah minimal dan kondisi kerja yang berbahaya diuntungkan oleh listrik murah yang disubsidi oleh pemerintah yang murah hati. Namun bagi rakyat miskin Haiti—yang merupakan sebagian besar populasi—tidak ada subsidi listrik, bahan bakar, air, atau makanan karena hal-hal itu dilarang oleh aturan IMF berdasarkan prinsip bahwa rakyat miskinlah yang memegang "kendali harga."

Sebelum "reformasi" berlangsung, produksi beras lokal sebenarnya mencukupi semua kebutuhan domestik dan karenanya memiliki pengaruh penting terhadap perekonomian domestik. Dengan adanya "liberalisasi" satu sisi, sekarang produksi beras lokal ini hanya mencukupi 50% kebutuhan dengan dampak yang dapat diduga terhadap perekonomian. Haiti harus "bereformasi" dengan menghapuskan tarif sesuai prinsip dasar ilmu ekonomi yang ketat—yang dengan keajaiban logika

mengecualikan industri agribisnis AS. Yang terakhir ini terus menerima subsidi publik besar-besaran yang diperbesar pada masa pemerintahan Reagan hingga mencapai 40% dari pemasukan kotor petani pada tahun 1987. Konsekuensi ikutannya dapat dipahami: laporan USAID tahun 1995 menyebutkan bahwa "perdagangan yang digerakkan oleh ekspor dan kebijakan penanaman modal" yang dimandatkan oleh Washington akan "sangat menekan petani beras domestik" yang akan terpaksa berpaling pada komoditi agroekspor lainnya demi keuntungan para investor, sesuai dengan prinsip-prinsip teori pengharapan yang rasional.[32]

Dengan metode tersebut, negara termiskin di belahan dunia tersebut berubah menjadi pembeli utama produksi beras AS dan jelas semakin memperkaya perusahaan AS yang sudah disubsidi. Mereka yang cukup beruntung pernah menerima pendidikan Barat yang baik pasti dapat menjelaskan bahwa keuntungan akan menetes ke petani dan rakyat miskin Haiti—pada akhirnya.

Contoh berharga ini memberitahu kita lebih banyak mengenai makna dan implikasi dari kemenangan ini bagi "demokrasi dan pasar terbuka."

Rakyat Haiti tampaknya memahami pelajaran ini bahkan jika para pengelola doktrin di Barat menghendaki gambaran yang lain. Pemilihan parlemen pada bulan April 1997 mengungkapkan "penurunan pemilih sebesar 5%", sebagaimana dilaporkan media, dan karenanya memunculkan pertanyaan, "Apakah Haiti Tidak Memenuhi Harapan AS?"[33] Kita telah berkorban begitu besar untuk membawakan demokrasi bagi mereka namun mereka tidak tahu terimakasih dan tidak menghargai. Kita dapat memahami mengapa "para realis" menyarankan agar kita tetap menjauh dari perang "meliorisme global."

Sikap serupa dianut di seluruh wilayah tersebut. Jajak pendapat menunjukkan bahwa di Amerika Tengah, politik menimbulkan "kebosanan," "ketidakpercayaan," dan "ketidakacuhan" dalam proporsi yang jauh di atas "minat" atau "antusiasme" di kalangan "publik apatis yang merasa dirinya

sebagai penonton dalam sistem demokrasi" dan "umumnya pesimis mengenai masa depan." Survey Amerika Latin yang pertama, disponsori oleh UE, mendapati hal sama: "pesan paling penting dari survey ini," menurut koordinator di Brasil, adalah "bahwa masyarakat umum menganggap hanya kalangan elit yang mengenyam keuntungan dari transisi menuju demokrasi."[34] Para sarjana Amerika Latin belakangan juga melihat bahwa gelombang baru demokratisasi terjadi bersamaan dengan reformasi ekonomi neoliberal, yang membahayakan banyak orang dan mengarah pada penilaian sinis terhadap prosedur demokrasi resmi. Pengenalan program serupa di negara-negara terkaya di dunia pun memiliki dampak yang sama, sebagaimana telah dibahas.

Mari kita kembali pada doktrin yang diterima secara luas, yakni "kemenangan Amerika dalam perang dingin" merupakan kemenangan bagi demokrasi dan pasar bebas. Berkenaan dengan demokrasi, doktrin itu hanya setengah benar sekalipun kita harus mengerti apa yang dimaksudkan dengan demokrasi: kendali dari atas ke bawah "untuk melindungi kaum minoritas kaya melawan mayoritas." Bagaimana dengan pasar bebas? Di sini kita mendapati bahwa doktrin tersebut telah bergeser jauh dari kenyataan, seperti dicontohkan oleh kasus Haiti.

Pertimbangkan lagi kasus NAFTA, sebuah persetujuan yang dirancang untuk mengunci Meksiko dalam suatu disiplin ekonomi yang melindungi investor dari bahaya "dimulainya demokrasi." Ini bukan "persetujuan pasar bebas." Sebaliknya justru bersifat sangat protektif, disusun untuk menghentikan pesaing dari Asia Timur dan Eropa. Lebih jauh, seperti halnya perjanjian global yang berprinsip anti-pasar semisal "hak kekayaan intelektual", NAFTA juga memuat semangat pembatasan yang sangat ekstrim sehingga masyarakat kaya tidak mau menerimanya selama periode pembentukannya, namun kini mereka pakai untuk melindungi perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Sebagai contoh, mereka menggunakannya untuk menghancurkan industri farmasi di negara yang lebih miskin—dan kadang-kadang menghentikan inovasi teknologi seperti

mempercanggih proses produksi untuk produk-produk paten yang telah mendapat izin peraturan paten yang sudah ada. Kemajuan bukan lagi hal penting dibandingkan pasar, kecuali jika hal ini menjanjikan keuntungan yang jelas bagi mereka yang terlibat.

Ada sejumlah masalah mengenai "perdagangan." Lebih dari setengah perdagangan AS dengan Meksiko dilaporkan terdiri dari transaksi dalam perusahaan, atau meningkat sekitar 15% sejak NAFTA. Sekitar satu dekade lalu, sebagian besar pabrik milik AS yang beroperasi di wilayah utara Meksiko hanya mempekerjakan sedikit buruh dan hampir tidak memiliki kaitan dengan perekonomian Meksiko. Mereka menghasilkan lebih dari 33% mesin yang digunakan di mobil-mobil AS dan 75% komponen esensial lainnya. Runtuhnya perekonomian Meksiko pasca-NAFTA pada tahun 1994, yang hanya menyisakan kalangan sangat kaya dan investor AS (yang dilindungi oleh jaminan pemerintah AS), meningkatkan neraca perdagangan antara AS-Meksiko dan menjadikannya sebuah krisis baru yang kian menyengsarakan masyarakat. Pers bisnis lebih jauh melaporkan bahwa situasi ini "mengubah Meksiko menjadi sumber barang manufaktur murah [tepatnya lebih murah] dengan tingkat upah hanya sepersepuluh di AS." Merujuk pada beberapa pakar, setengah perdagangan AS di seluruh dunia memang merupakan transaksi yang dikelola terpusat, demikian juga halnya dengan industri-industri lain. [35] Meski demikian kita harus berhati-hati mengambil kesimpulan seperti itu jika terkait dengan lembaga-lembaga dengan akuntabilitas publik yang terbatas. Beberapa ekonom menjelaskan dengan gamblang sistem dunia seperti itu sebagai salah satu "merkantilisme perusahaan" yang jauh dari tujuan ideal pasar bebas. OECD yang menyimpulkan bahwa "kompetisi oligopolistik dan interaksi strategis antara perusahaan dan pemerintahlah, dan bukan kekuatan tak terlihat yang bekerja di pasar, yang mendorong kondisi keunggulan kompetitif hari ini serta model pembagian kerja yang berlaku secara internasional dalam industri

berteknologi tinggi,"[36] secara implisit mengadopsi pandangan serupa.

Bahkan struktur dasar perekonomian domestik melanggar prinsip neoliberal yang dianut. Tema utama standar kerja dalam sejarah bisnis AS adalah "perusahaan bisnis modern menggantikan mekanisme pasar dalam mengkoordinasi aktivitas perekonomian dan mengalokasikan sumber dayanya," menangani banyak transaksi secara internal, yang sudah melompat jauh dari prinsip-prinsip pasar.[37] Masih banyak yang lainnya. Sebagai contoh, mari amati nasib prinsip Adam Smith bahwa pergerakan bebas manusia—misalnya melintas batas negara—adalah komponen esensial pasar bebas. Kalau kita mengamati perusahaan-perusahaan transnasional, dengan aliansi-aliansi strategis mereka dan dukungan kuat yang didapatkan dari negara, maka kesenjangan antara doktrin dan kenyataan menjadi semakin mendasar.

Berbagai pernyataan yang ditujukan kepada publik harus diterjemahkan dalam konteks kenyataan ini. Di antaranya seruan Clinton mengenai perdagangan-dan-bukan-bantuan untuk Afrika, yang diiringi serangkaian syarat yang hanya menguntungkan investor AS serta retorika yang dirancang untuk menghindari kesan yang selama ini sudah ada, yakni bahwa Amerika Serikat, dibanding negara kaya lainnya, adalah yang paling pelit dalam memberikan bantuan, bahkan sebelum negara lain menaikkan jumlah bantuannya. Contoh lain yang lebih jelas adalah rencana Chester Crocker mengenai Afrika yang diserahkan kepada pemerintahan Reagan pada tahun 1981. "Kami mendukung peluang pasar terbuka, akses ke sumber daya utama, dan memperluas perekonomian Afrika dan Amerika," kata Crocker seraya menambahkan bahwa ia ingin membawa negara-negara Afrika "menuju jalur utama perekonomian pasar bebas."[38] Pernyataan itu tampak mengabaikan sinisme yang datang dari para pemimpin "serangan berkesinambungan" terhadap "perekonomian pasar bebas." Namun versi Crocker ini cukup adil ketika dilihat melalui perspektif doktrin pasar yang

sebenarnya. Peluang pasar dan akses ke sumber daya diberikan pada investor asing dan rekanan lokal mereka, dan perekonomian dikembangkan dalam cara tertentu untuk melindungi "minoritas kaya melawan mayoritas." Sementara itu, golongan kaya berhak menikmati perlindungan negara dan subsidi publik. Bagaimana lagi mereka dapat berkembang, toh demi keuntungan bersama?

Tentu saja Amerika Serikat tidak sendiri dalam konsepsi "perdagangan bebas" yang seperti ini, sekalipun ideologi ini seringkali mengundang komentar-komentar sinis. Penyebab kesenjangan antara negara kaya dan miskin sejak tahun 1960 sesungguhnya dapat dinisbahkan kepada besarnya perlindungan yang diterima oleh mereka yang kaya. Demikian disimpulkan oleh laporan pembangunan PBB tahun 1992. Sementara itu laporan tahun 1994 menyimpulkan bahwa "negara-negara industri, sambil melakukan pelanggaran atas prinsip-prinsip perdagangan bebas, telah membebani negara berkembang sekitar 50 miliar dolar per tahun—nyaris setara dengan jumlah total bantuan asing"—kebanyakan diakui sebagai subsidi promosi ekspor.[39] *Global Report* tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Organisasi Pembangunan Industri PBB memperkirakan bahwa kesenjangan antara negara terkaya dan termiskin pada 20% populasi dunia meningkat lebih dari 50% antara tahun 1960 hingga 1989. Laporan itu juga memprediksikan "meningkatnya kesenjangan dunia sebagai hasil dari proses globalisasi." Peningkatan kesenjangan juga terjadi dalam masyarakat kaya. Paling depan adalah Amerika Serikat, dan disusul oleh Inggris. Pers bisnis sangat gembira menyambut pertumbuhan keuntungan yang "spektakuler" dan "mengejutkan". Mereka bersorak menyaksikan pemusatan kekayaan luar biasa di tangan segelintir orang kaya, sementara kondisi mayoritas masyarakat stagnan atau bahkan menurun.

Perusahaan media, pemerintahan Clinton, dan para pendukung Jalan Amerika dengan bangga menawarkan diri sebagai model bagi negara-negara lain. Mereka tenggelam dalam gemuruh pengagungan diri yang merupakan hasil kebijakan sosial

yang dalam beberapa tahun terakhir yang memang dirancang seperti itu. Sebagai contoh, "indikator dasar" yang dipublikasikan oleh UNICEF[40] menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki catatan terburuk di antara negara-negara industri, bersama-sama dengan Kuba—negara dunia ketiga yang miskin yang selama empat puluh tahun terus-menerus diserang oleh negara *superpower* dunia—dalam hal tingkat kematian balita. AS juga menduduki posisi serupa dalam hal kelaparan, kemiskinan anak, dan indikator sosial dasar lainnya.

Dan semua ini berlangsung di negara terkaya di dunia dengan berbagai kelebihan yang tak tertandingi dan lembaga-lembaga demokratisnya yang stabil, namun juga yang terikat dalam aturan bisnis sampai batas yang tidak wajar. Ini semua merupakan pertanda tentang wajah masa depan, yakni jika "peralihan dramatis dari model politik yang pluralis dan didasarkan pada prinsip partisipasi menuju bentuk otokratik dan teknokratik" terus berlangsung di seluruh penjuru dunia.

Penting untuk dicatat bahwa diam-diam niatan seperti itu sering tercetus dengan jujur. Sebagai contoh, segera setelah Perang Dunia II berakhir, George Kennan, salah satu perencana pembangunan paling berpengaruh dan tokoh humanisme terkemuka, memberi "tugas" bagi tiap-tiap wilayah di dunia: fungsi Afrika adalah untuk "dieksploitasi" oleh Eropa untuk keperluan rekonstruksinya karena Amerika Serikat, menurutnya, hampir tidak berminat di sini. Setahun sebelumnya, sebuah studi perencanaan yang dirancang di tingkat atas mendesak "kerjasama membangun industri bahan pangan murah dan bahan mentah di Afrika Utara dapat mendorong terbentuknya kesatuan Eropa dan menjadi dasar perekonomian bagi pemulihan di benua itu." Sebuah konsep yang menarik tentang "kooperasi."[41] Tidak ada catatan mengenai usulan agar Afrika "mengeksploitasi" Barat untuk kepentingan pemulihannya sendiri setelah "meliorisme global" yang dilancarkan terhadap mereka pada abad sebelumnya.

Dalam tulisan ini saya telah mencoba mengikuti prinsip metodologis yang masuk akal: mengevaluasi pemujaan "prinsip-

prinsip politik dan ekonomi" oleh kekuatan dominan dunia dengan menggunakan contoh-contoh yang dipilih sendiri oleh para pembelanya sebagai kasus terkuat mereka. Ulasan ini singkat dan tidak menyeluruh, serta hanya menyinggung persoalan-persoalan yang tidak jelas dan tidak dipahami dengan baik. Penilaian saya sendiri adalah bahwa contoh yang ada cukup adil dan memunculkan gambaran yang benar mengenai prinsip-prinsip operatif serta "gelombang masa depan", jika prinsip-prinsip tersebut dapat bertahan cukup lama.

Sekalipun akurat, gambaran ini sebenarnya mengecoh, terutama karena tulisan ini sangat parsial: sama sekali tidak mencakup apa yang telah dicapai oleh mereka yang benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip yang didengungkan, serta pada prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan yang jauh jangkauannya. Ini terutama catatan mengenai perjuangan rakyat yang ingin mengikis dan melepaskan segala bentuk penindasan dan dominasi, yang kadang-kadang sangat jelas namun terinternalisasi begitu dalam sehingga tak dapat dilihat oleh para korbannya. Catatan tersebut lengkap dan memberi semangat, dan kita memiliki semua alasan untuk menduga bahwa semua itu mampu laksana. Untuk melakukan hal itu diperlukan penilaian realistis terhadap situasi yang ada sekarang dan awal sejarahnya. Tapi itu tentu saja hanya sebuah permulaan.

Orang-orang skeptis yang melecehkan harapan tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah utopia dan kenaifan hanya perlu mengarahkan pandangan mereka pada apa yang terjadi di Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir, suatu penghormatan atas apa yang bisa dicapai oleh jiwa manusia serta prospeknya yang tak terbatas. Pelajaran dari prestasi yang luar biasa ini seharusnya menjadi inspirasi bagi manusia, di mana pun mereka berada, dan membimbing langkah selanjutnya dalam perjuangan terus-menerus di sini, seperti halnya rakyat Afrika Selatan yang bangkit dari perayaan kemenangan besarnya untuk menyambut tantangan yang lebih sulit yang menghadang di depan.

Catatan

1. UNICEF, *The States of the World's Children 1997*, Oxford University Press, 1997; UNICEF, *The Progress of Nations 1996*, UNICEF House, 1996.
2. Thomas Friedman, *NYT*, 2 Juni 1992; Penasehat Keamanan Nasional Anthony Lake, *NYT*, 26 September 1993; sejarahwan David Fromkin, *NYT Book Review*, 4 Mei 1997, menyarikan karya terbaru.
3. Mengenai gambaran umum dan sejarah awalnya, lihat antara lain penelitian klasik Frederick Clairmont, *The Rise and Fall of Economic Liberalism*, Asia Publishing House, 1960. Dicetak ulang dan diperbarui, Penang and Goa: Third World Network, 1996; dan Michel Chossudovsky, *The Globalisation of Poverty*, Penang, Third World Network, 1997. Clairmont adalah ekonom yang bertugas di UNCTAD selama bertahun-tahun; Chossudovsky adalah profesor ekonomi di University of Ottawa.
4. John Cassidy, *New Yorker*, 16 Oktober 1995. Lihat Bab III, catatan 1 untuk kutipan berikut. Contoh ini adalah liberal-hingga-kiri, dalam beberapa kasus cukup kritis. Analisis serupa dapat dijumpai di sepanjang spektrum, namun secara umum bernada eforia.
5. John Liscio, *Barron's*, 15 April 1996.
6. Richard Cockett, "The Party, Publicity, and the Media," dalam Anthony Seldon dan Stuart Ball, ed., *Conservative Century: The Conservative Party since 1900*, Oxford University Press, 1994; Harold Lasswell, "Propaganda," dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. 12, Macmillan, 1933. Untuk kutipan dan diskusi, lihat "Intellectuals and the State" (1977), dicetak ulang dalam Noam Chomsky, *Towards a New Cold War*, Pantheon, 1982. Yang akhirnya tersedia juga adalah beberapa karya

terkemuka pada topik ini oleh Alex Carey, dikumpulkan dalam *Taking the Risk out of Democracy,* University of New South Wales Press, 1995, dan University of Illinois Press, 1997.

7. Ibid., dan Elizabeth Fones-Wolf, *Selling Free Enterprise: the Business Assault on Labor and Liberalism, 1945-1960*, University of Illinois Press, 1995. Juga Stuart Ewen, *PR!: A Social History of SPIN*, Basic Books, 1996. Untuk konteks yang lebih luas, lihat Noam Chomsky, "Intellectuals and the State" dan "Force and Opinion," dicetak ulang dalam *Deterring Democracy*, Verso, 1991.
8. Editorial, *New Republic*, 19 Maret 1990.
9. Sanford Lakoff, *Democracy: History, Theory, Practice*, Westview, 1996, 262 f.
10. J. Toye, J. Harrigan, dan P. Mosley, *Aid and Power* (Routledge, 1991), vol 1, 16. Mengenai perbandingan a la Lenin, lihat esai saya yang disebutkan dalam catatan 7 dan *For Reasons of State*, Pantheon, 1973, Introduction.
11. Carothers, "The Reagan Years," dalam Abraham Lowenthal (*ed.*), *Exporting Democracy*, Johns Hopkins University Press, 1991. Lihat juga *In the Name of Democracy*, University of California Press, 1991.
12. Lihat Bab 2, dan untuk diskusi dan sumber lebih lanjut, Noam Chomsky, *Powers and Prospects*, South End, 1996; "Consent Without Consent: Reflections on the Theory and Practice of Democracy," *Cleveland State Lawa Review 44.4*, 1996.
13. *Survey of Current Business*, Departemen Perdagangan AS, Vol. 76, no 12 Desember 1966.
14. Morton Horwitz, *The Transformation of American Law, 1870-1960*, Harvard University Press, 1992, bab 3. Lihat juga Charles Sellers, *The Market Revolution*, Oxford University Press, 1991.

15. Michael Sandel, *Democracy's Discontent*, Harvard University Press, 1996, bab 6. Penafsirannya pada istilah republikanisme dan moral individu menurut saya terlalu dangkal, mengabaikan akar yang lebih dalam pada Abad Pencerahan dan sebelumnya. Untuk beberapa pembahasan, lihat Noam Chomsky, *Problems of Knowledge and Freedom*, Pantheon, 1971, Bab 1; beberapa esai dicetak ulang dalam James Peck (*ed.*), *The Chomsky Reader*, Pantheon, 1987, dan Noam Chomsky, *Powers and Prospects*, bab 4 .
16. Untuk detail, lihat Noam Chomsky, *Turning the Tide*, Boston: South End, 1985, Bab 6.3; dan Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End, 1988. Bab 11 (dan sumber yang disebutkan didalamnya), termasuk kutipan dari Figueres, yang penghormatan padanya dari media menunjukkan dedikasi yang mengagumkan. Lihat *Letters from Lexington*, Common Courage, 1993, Bab 6, pada catatan, termasuk obituari panjang dalam *New York Times* oleh pakar Amerika Tengah dan editorial mengharukan yang mengiringinya, yang sekali lagi berhasil menghambat pandangannya mengenai "perang salib demokrasi" oleh Washington. Pada laporan media mengenai pemilu di Nikaragua dan El Salvador, lihat Edward Herman dan Noam Chomsky, *Manufacturing Consent*, Pantheon, 1988, Bab 3. Bahkan Carothers, yang berhati-hati dengan fakta, menulis bahwa para Sandinista "menolak untuk mengakui pemilu" hingga tahun 1990 dalam Lowenthal, *op. cit.*
17. Kesalahan standar yang lain adalah lamanya perencanaan pemilu yang terjadi hanya karena tekanan militer dan ekonomi Washington, yang karena itu diakui secara retroaktif.
18. Mengenai pemilu dan reaksi di Amerika Latin dan Amerika Serikat, termasuk penyebab kejadian yang mengikutinya, lihat Noam Chomsky, *Deterring*

Democracy, Bab 10. Untuk tinjauan rinci mengenai subversi diplomasi yang sangat berhasil, yang secara umum diakui sebagai penghargaan atas diplomasi, lihat Noam Chomsky, *Culture of Terrorism*, Bab 7; dan Noam Chomsky, *Necessary Illusions*, South End, 1989, appendiks IV.5.

19. Penekanannya, dalam Lowenthal, *op. cit.*
20. Untuk detail, lihat antara lain, Richard Garfield, "Desocializing Health Care in a Developing Country," *Journal of the American Medical Association*, 270, no. 8, 25 Agustus 1993, dan Noam Chomsky, *World Orders, Old and New*, Columbia University Press, 1994, 131 f.
21. Michael Kinsley, *Wall Street Journal*, 26 Maret 1987; *New Republic*, editorial, 2 April 1984; 19 Maret 1990. Untuk lebih banyak lagi contoh mengenai hal ini, lihat Noam Chomsky, *Culture of Terrorism*, Bab 5; Chomsky, *Deterring Democracy*, Bab 10, 12.
22. H.D.S. Greenway, *Boston Globe*, 29 Juli 1993.
23. *NYT*, 2 Mei 1985.
24. Lihat *World Orders*, 131 ff. Pada prediksi dan hasilnya, lihat ekonom Malvin Burke. "NAFTA Intregation: Unproductive Finance and Real Unemployment," *Proceeding from the Eighth Annual Labor Segmentation Conference*, April 1995, disponsori oleh Notre Dame dan Universitas Indiana. Juga *Social Dimensions of North American Economic Integration*, laporan bagi Departemen Pembangunan Sumber Daya Manusia oleh Kongres Buruh Kanada, 1996. Dalam prediksi Bank Dunia mengenai Afrika, lihat Cheryl Payer, *Lent and Lost*, Zed, 1991, dan John Mihevc, *The Market Tells Them So*, Zed, 1995. Pelajari juga dampak mengerikan dari kesalahan terus menerus—yakni dampak mengerikan bagi masyarakat luas, dan bukan untuk konstituen Bank yang sebenarnya. Bahwa catatan prediksi tersebut tidak

lengkap, dan kurang dipahami, diketahui dengan baik oleh para ekonom profesional. Lihat, e.g., Paul Krugman, "Cycles of Conventional Wisdom on Economic Development," *International Affairs* 71 no. 4, Oktober 1995. Lihat 25f., di atas.

25. Helene Cooper, "Experts' View of NAFTA's Economic Impact It's a Wash," WSJ, 17 Juni 1997.
26. Editorial, "Class War in the USA," *Multinational Monitor*, Maret 1997. Bronfenbrenner, "We'll Close," *ibid.*, berdasarkan penelitian yang dipimpinnya: "Final Report: The of Plant Closing or Threat of Plant Closing on the Right of Workers to Organize." Dampak luar biasa pada pelanggaran di masa pemerintahan Reagan dirinci dalam laporan di *Business Week*, "The Workplace: Why America Needs Unions, But Not The Kind It Has Now," 23 Mei 1994.
27. Levinson, *Foreign Affairs*, Maret/April 1996. Workshop, 26 dan 27 September 1990, Minutes, 3.
28. Lihat bab berikut. Di AS dan sebagian Kanada (di mana berlangsung diskusi yang jauh lebih terbuka) masyarakat kebanyakan menunjukkan sikap berlawanan, sebagaimana diindikasikan oleh jajak pendapat.
29. Kenneth Roth, Executive Director, HRW, Surat, *NYT*, 12 April 1997.
30. Lihat Paul Farmer, *The Uses of Haiti*, Common Courage, 1994; Chomsky, *World Orders*, 62ff; Noam Chomsky, "Democracy Restored," Z, November 1994; North American Congress on Latin America (NACLA), *Haiti: Dangerous Crossroads*, South End, 1995.
31. Noam Chomsky, "Democracy Restored," menyebutkan John Solomon, AP, 18 September 1994 (berita utama).
32. Lihat *Year 501*, South End, 1993, Bab 8, dan sumber yang tercantum; Farmer, *op. cit.*, *Labor Rights in Haiti*, International Labor Rights Education and Research

Fund (New York), April 1993. Lisa McGowan, *Democracy Undermined, Economic Justice Denied: Structural Adjustment and the AID Juggernaut in Haiti*, Development Gap, Januari 1997.

33. Nick Madigan, "Democracy in Inaction: Did Haiti Fail U.S Hope?" *Christian Science Monitor*, 8 April 1997; Lihat AP, *Boston Globe*, 8 April 1997, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemilu.
34. John McPhaul, *Tico Times* (Kosta Rika), 11 April; 2 Mei 1997.
35. Vincent Cable, *Daedalus* (Musim Semi 1995), menyebut *World Investment Report 1993* dari PBB (yang bagaimanapun juga memberi gambaran berbeda, juga menyebutkan bahwa "relatif hanya sedikit data yang tersedia" 164f). Untuk diskusi yang lebih mendetil, memperkirakan perdagangan antar TNC pada level 40%, lihat Peter Cowhey dan Jonathan Aronso, *Managing the World Economy* (New York, Council on Foreign Relations, 1993). Mengenai AS-Meksiko, lihat David Barkin dan Fred Rosen, "Why the Recovery is Not a Recovery," *NACLA Report on the Americas*, Januari/Februari 1997; Leslie Crawford, "Legacy of Shock Therapy," *Financial Times*, 12 Februari 1997 (subjudul "Mexico: A Healthier Outlook," artikel ini membahas mengenai peningkatan kesengsaraan yang berlangsung cepat di masyarakat, terpisah dari mereka yang "sangat kaya"). Pascatransaksi antarperusahaan NAFTA: William Greider, *One World, Ready or Not* (Simon & Schuster, 1997), 273, menyebut ekonom Meksiko Carlos Heredia. Perkiraan pra-NAFTA mengenai transaksi ekspor AS antarperusahaan tidak pernah memasuki pasar Meksiko melampaui 50%. Senator Ernest Hollings, *Foreign Policy*, Musim Dingin 1993-1994.
36. Penelitian OECD tahun 1992 dikutip oleh ketua penasehat ekonomi Clinton Laura Tyson dalam *Who's*

Bashing Whom? (Institute for International Economics, 1992).

37. Alfred Chandler, *The Visible Hand* (Belknap Press, 1977).
38. Ceramah diedarkan oleh C.A. Crocker, Asisten Menteri Negara untuk Urusan Afrika, di Honolulu sebelum Komite Keamanan Nasional untuk Liga Amerika, Agustus 1981. Disebut oleh Hans Abrahamsson, *Hegemony, Region and Nation State: The Case of Mozambique*, Padrigu Peace and Development Research Institute, Gothenburg University, Januari 1996.
39. Untuk diskusi, lihat Erik Toussaint dan Peter Drucker (ed.), *IMF/World Bank/WTO, Notebooks for Study and Research*, Amsterdam: International Institute for Research and Education, 1995, 24/5.
40. UNICEF, *State of the World's Children 1997.*
41. George Kennan, PPS 23, 24 Februari 1948 (*Foreign Relations of the United States*, vol. 1, 1948), 511. Michael Hogan, *The Marshall Plan* (Cambridge University Press, 1987), 41, mengulang Bonesteel Memorandum bulan Mei 1947.

BAB V
Perlawanan Zapatista

Berbagai perubahan besar telah terjadi dalam tatanan global sepanjang seperempat abad terakhir. Pada tahun 1970, "aliansi negara kaya" pascaperang berada di ambang perpecahan, sementara keuntungan banyak perusahaan juga mengalami penurunan. Menyadari bahwa Amerika Serikat tidak lagi mampu memainkan peran sebagai "bankir internasional" yang selama ini sangat menguntungkan perusahaan multinasional AS, Richard Nixon mengubah tatanan ekonomi dunia (sistem Bretton Woods), menahan penukaran dolar AS ke emas, menerapkan kontrol atas gaji dan bea impor, dan memperkenalkan peraturan fiskal yang memfokuskan kekuatan negara untuk membantu kalangan kaya lebih dari sebelumnya. Sejak itu kebijakan ini menjadi rujukan dan mendapat dukungan lebih pada masa Reagan serta dipertahankan oleh kaum "Demokrat Baru." Perang kelas yang tak berkesudahan dan dipicu oleh sektor bisnis diintensifkan hingga skala global.

Langkah-langkah yang diambil Nixon ini hanya beberapa di antara sejumlah faktor lain yang menyebabkan peningkatan luar biasa dalam dana finansial non-reguler dan perubahan radikal dalam penggunaannya—dari investasi jangka panjang dan perdagangan menjadi spekulasi. Dampaknya telah merusak

perencanaan ekonomi nasional karena pemerintah dipaksa untuk menjaga "kredibilitas" pasar, membawa berbagai sektor perekonomian pada "ekuilibrium baru antara pertumbuhan rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi," kata ekonom Universitas Cambridge, John Eatwell. Ini masih ditambah dengan pendapatan riil yang stagnan atau justru makin menurun, meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan, meski di sisi lain terjadi *booming* pasar dan peningkatan laba hanya bagi segelintir orang. Pada saat yang sama proses internasionalisasi produksi menjadi alat baru yang mengancam kehidupan kaum pekerja di Barat. Mereka harus menerima berakhirnya gaya hidup "mewah" dan menyetujui "fleksibilitas pasar buruh" (tidak pernah tahu apakah kau akan memiliki pekerjaan esok), kata pers bisnis dengan girangnya. Turunnya peringkat sebagian besar negara di Eropa Timur kembali menjadi Dunia Ketiga turut memperparah prospek ini. Serangan terhadap hak-hak pekerja, standar sosial, dan demokrasi yang berlaku di seluruh penjuru dunia merefleksikan kemenangan ini.

Kejayaan di antara beberapa sektor elit dapat dipahami, sebagaimana juga kesedihan dan kemarahan yang dialami mereka yang berada di luar kelompok beruntung ini.

Upaya perlawanan yang dilakukan kaum pribumi Indian di Chiapas pada hari Tahun Baru (1994) bisa dipahami dalam konteks umum ini. Perlawanan ini terjadi bersamaan dengan penandatanganan NAFTA yang disebut kaum militer Zapatista sebagai "hukuman mati" bagi suku Indian, dan hadiah bagi orang kaya, yang tentunya akan memperdalam jurang perbedaan antara segelintir orang kaya dan massa yang menderita serta menghancurkan masyarakat pribumi yang tinggal tersisa sedikit.

Tapi hubungan antara perlawanan tersebut dengan NAFTA sebagian bersifat simbolik, karena masalah sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. "Kita adalah produk perjuangan selama lima ratus tahun," demikian dinyatakan dalam deklarasi perang Zapatista. Perjuangan hari ini adalah "untuk mendapatkan pekerjaan, tanah, pemukiman, makanan, layanan kesehatan,

pendidikan, kemerdekaan, kebebasan, demokrasi, keadilan, dan perdamaian." Ditambahkan oleh wakil uskup Chiapas, " Latar belakang sebenarnya adalah marjinalisasi total, kemiskinan, dan frustrasi setelah bertahun-tahun berusaha memperbaiki keadaan."

Orang Indian merupakan korban yang paling menderita akibat kebijakan pemerintah Meksiko. Namun sesungguhnya tidak hanya mereka yang mengalami penderitaan seperti itu. "Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan jutaan rakyat Meksiko yang hidup dalam kemiskinan parah akan tahu bahwa kami hidup dengan bom waktu," kata kolumnis Pilar Vardes dari Meksiko.

Selama dekade reformasi ekonomi sebelumnya, jumlah orang yang sangat miskin di daerah pinggiran meningkat sampai hampir sepertiganya. Setengah dari total populasi tidak memiliki akses kepada sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah peningkatan dramatis sejak tahun 1980. Mengikuti resep yang diusulkan oleh IMF dan Bank Dunia, produksi pertanian dialihkan menjadi komoditi ekspor dan pakan ternak yang memberi keuntungan bagi sektor agribisnis, konsumen asing, dan kelompok masyarakat kaya di Meksiko, sementara malnutrisi menjadi masalah kesehatan utama di negara tersebut. Pada saat bersamaan kesempatan kerja di bidang pertanian berkurang, lahan produktif ditinggalkan, dan Meksiko mulai mengimpor bahan pangan dalam jumlah besar. Upah riil di sektor industri pun mengalami penurunan tajam. Kontribusi pekerja dalam produk domestik bruto yang mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun '70-an turun hingga lebih dari sepertiganya. Ini adalah konsekuensi wajar akibat reformasi neoliberal. Penelitian IMF, sebagaimana dikutip oleh ekonom Manuel Pastor, menunjukkan "adanya pola yang kuat dan konsisten pada penurunan kontribusi pekerja terhadap penghasilan" akibat "program stabilisasi" yang berlangsung di Amerika Latin.

Menteri Perdagangan Meksiko mengakui terjadinya penurunan upah sebagai daya tarik bagi investor asing. Dan persis inilah yang sering terjadi, seperti juga tekanan terhadap pekerja, pelonggaran peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan orientasi umum kebijakan sosial yang disesuaikan dengan keinginan minoritas kaya. Kebijakan semacam ini tentu saja disambut baik oleh kalangan industri dan keuangan yang ingin memperluas kendali mereka atas perekonomian global dengan bantuan yang disalahartikan sebagai perjanjian "perdagangan bebas."

NAFTA diperkirakan akan menghela sebagian besar petani meninggalkan lahan mereka, yang akan kian meningkatkan angka kemiskinan di pedesaan dan pengangguran. Sementara lapangan kerja di bidang manufaktur, yang sudah menurun selama reformasi, diperkirakan akan mengalami penurunan yang makin tajam. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh jurnal bisnis Meksiko terkemuka, *El Financiero*, memprediksi bahwa Meksiko akan kehilangan hampir seperempat industri manufakturnya dan 14% lapangan pekerjaan dalam dua tahun pertama. "Para ekonom memperkirakan bahwa jutaan rakyat Meksiko terancam kehilangan pekerjaan dalam lima tahun pertama setelah perjanjian itu dilaksanakan," kata Tim Golden dalam laporannya untuk *New York Times*. Proses ini akan menekan upah pekerja jauh lebih rendah lagi, sementara keuntungan dan polarisasi semakin meningkat dan tentu saja keuntungan di pihak Amerika Serikat dan Kanada.

Daya tarik utama NAFTA, sebagaimana selalu digarisbawahi oleh para pendukung sejatinya yang bersemangat, adalah bahwa perjanjian ini "terkunci" dalam reformasi neoliberal yang telah membalikkan tahun-tahun penuh kemajuan dalam hak-hak pekerja dan pembangunan ekonomi menjadi kemiskinan dan penderitaan massal yang disertai peningkatan kekayaan bagi segelintir orang dan investor asing. Bagi perekonomian Meksiko umumnya, "kemajuan ekonomi" ini hanya membawa "sedikit pahala," menurut pengamatan *Financial Times* London dalam

tinjauannya atas "delapan tahun kebijakan ekonomi pasar yang sesuai buku teks" yang hanya menghasilkan pertumbuhan kecil dan sebagian besarnya dicapai berkat bantuan finansial yang luar biasa dari Bank Dunia dan Amerika Serikat. Tingkat suku bunga tinggi sebagian digunakan untuk menggantikan pelarian modal besar-besaran yang merupakan faktor utama krisis utang Meksiko. Sekalipun pinjaman utang adalah beban yang makin berat, sebagian terbesarnya kini adalah berupa utang yang dipinjamkan pada orang kaya Meksiko.

Tidak mengejutkan jika muncul perlawanan yang substansial terhadap rencana untuk "mengunci" model pembangunan ini. Sejarahwan Seth Fein yang menulis dari Mexico City, menggambarkan tentang banyaknya demonstrasi menentang NAFTA yang "diartikulasikan dengan baik, meski hampir tidak terperhatikan di Amerika Serikat, meneriakkan rasa frustrasi menentang kebijakan pemerintah—termasuk pembatalan undang-undang perburuhan, pertanian, dan hak pendidikan yang disyaratkan dalam konstitusi tahun 1971 dan mendapat sambutan baik dari masyarakat luas—yang bagi rakyat Meksiko tampak sebagai makna sesungguhnya dari NAFTA dan kebijakan luar negeri AS yang diterapkan di sini." Koresponden *Los Angeles Times*, Juanita Darling, melaporkan kekhawatiran besar para pekerja Meksiko mengenai hilangnya "hak-hak pekerja yang telah diperjuangkan dengan susah payah," yang sangat mungkin "akan dikorbankan ketika perusahaan-perusahaan yang sedang mati-matian bersaing dengan perusahaan asing mencoba mencari cara untuk menghemat biaya."

Forum "Komunikasi Uskup Meksiko Mengenai NAFTA"mengutuk perjanjian tersebut berikut kebijakan ekonomi yang menyertainya karena dampak sosialnya yang mengerikan. Para uskup menyatakan kembali suara keprihatinan dari konferensi uskup Amerika Latin tahun 1992 bahwa "perekonomian pasar tidak boleh menjadi kekuatan absolut yang mengorbankan segalanya, memunculkan kesenjangan dan marjinalisasi sebagian besar masyarakat"—yang sebenarnya

merupakan dampak dari NAFTA dan perjanjian hak-hak investor lainnya. Reaksi dunia bisnis Meksiko cukup beragam: kelompok yang paling berkuasa menyetujui perjanjian tersebut, sementara kelompok bisnis skala menengah dan kecil beserta organisasi mereka kebingungan atau bersikap menentang. Jurnal Meksiko terkemuka, *Excelsior*, memperkirakan bahwa NAFTA hanya akan menguntungkan "warga Meksiko yang sekarang menjadi penguasa hampir di seluruh negara (15% menerima lebih dari setengah GDP)," yakni kelompok minoritas yang telah mengalami "de-Meksikonisasi," dan selangkah lagi akan menjadi bagian dari "sejarah Amerika Serikat di negara kita," "suatu pelanggaran dan perampasan yang tak dapat dikontrol." Perjanjian itu juga ditentang oleh banyak pekerja (termasuk perserikatan pekerja nonpemerintah terbesar) dan kelompok lainnya yang mengingatkan dampaknya terhadap gaji, hak-hak buruh, lingkungan hidup, hilangnya kedaulatan negara, meningkatnya perlindungan atas hak-hak perusahaan dan investor, dan hilangnya kemungkinan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Homero Aridjis, presiden organisasi lingkungan hidup terkemuka di Meksiko, menyatakan bahwa ini adalah "penaklukan ketiga yang diderita Meksiko. Pertama oleh senjata, kedua oleh agama, ketiga oleh ekonomi."

Tidak perlu waktu lama sebelum semua ketakutan ini akhirnya terwujud. Sesaat setelah NAFTA disetujui oleh Kongres, para pekerja diberhentikan dari pabrik Honeywell dan GE sebagai upaya menghalangi pembentukan perserikatan buruh independen. Ford Motor Company memecat seluruh tenaga kerjanya pada tahun 1987, membatasi kontrak perserikatan, dan mempekerjakan kembali para buruh dengan upah yang jauh lebih rendah. Tekanan berkekuatan penuh melemahkan protes-protes yang dilancarkan. Volkswagen mengikuti langkah itu pada tahun 1992 dengan memecat 14.000 pekerjanya dan hanya mempekerjakan kembali mereka yang secara resmi menolak kepimpinan perserikatan independen. Tindakan VW ini mendapat dukungan dari pemerintah. Inilah komponen utama

dari "keajaiban ekonomi" yang harus "dikunci" oleh NAFTA.

Beberapa hari setelah NAFTA diputuskan, Senat AS meloloskan "paket anti kejahatan terbaik dalam sejarah" (Senator Orrin Hatch), merekrut seratus ribu polisi baru, penjara regional berkeamanan tinggi, pengucilan para pelaku kejahatan, kemudahan hukuman mati dan vonis yang lebih berat, serta berbagai peraturan keras lainnya. Pakar penegakan hukum yang diwawancarai pers menyatakan keraguan mereka bahwa undang-undang tersebut akan berdampak terhadap pengurangan angka kriminalitas karena tidak menyentuh "penyebab disintegrasi sosial yang melahirkan berbagai kejahatan besar." Yang paling utama adalah kebijakan sosial dan ekonomi yang menciptakan polarisasi dalam tubuh masyarakat Amerika yang semakin dipertajam oleh NAFTA. Konsep "efisiensi" dan "ekonomi yang sehat" yang dipilih oleh kalangan kaya dan memiliki hak istimewa tidak sama sekali tidak berkontribusi pada sektor yang sedang tumbuh di masyarakat, sehingga tidak meningkatkan keuntungan dan justru makin memperparah kemiskinan dan keputusasaan. Jika mereka tidak dapat dikurung di daerah pinggiran, mereka harus dikendalikan dengan cara yang lain.

Seperti waktu munculnya perlawanan Zapatista, munculnya perubahan yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang ini memiliki makna yang tidak sekadar simbolis.

Debat NAFTA secara umum berfokus pada hilangnya pekerjaan, yang hanya sedikit dipahami. Namun kemungkinan yang cukup besar adalah bahwa penurunan gaji akan terjadi dalam skala luas. "Banyak ekonom berpikir bahwa NAFTA dapat menurunkan pembayaran," Steven Pearlstein melaporkan di *Washington Post*. Ia berharap bahwa "upah buruh Meksiko yang lebih rendah dapat berdampak pada gaji rakyat Amerika." Hal ini juga diperkirakan bahkan oleh pendukung NAFTA yang mengetahui bahwa pekerja yang kurang terampil—yang membentuk sekitar 70% dari angkatan kerja yang ada—tampaknya akan menderita akibat pemotongan gaji.

Sehari setelah persetujuan kongres untuk menerima NAFTA, *New York Times* memuat ulasan pertamanya mengenai dampak yang diramalkan dari perjanjian itu di wilayah New York. Ulasan itu bernada positif, konsisten dengan dukungan antusias yang tercermin di seluruh isi tulisan. Tema yang dibahas adalah mengenai siapa yang akan diuntungkan oleh sistem baru ini: yaitu sektor "keuangan dan yang berkaitan dengan itu," seperti "perbankan, telekomunikasi, dan perusahaan jasa," kemudian perusahaan asuransi, lembaga-lembaga investasi, firma hukum, industri humas, konsultan manajemen, dan sejenisnya. Di samping itu terdapat sejumlah industri yang mungkin akan meraih keuntungan juga, terutama yang menggunakan teknologi tinggi sebagai basisnya, penerbitan, dan juga farmasi. Mereka akan memperoleh keuntungan dari perlindungan yang sengaja dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besarlah yang akan mengendalikan teknologi masa depan. Secara sambil lalu ulasan tersebut juga mengatakan akan ada pecundang, yaitu "kebanyakan perempuan, orang kulit hitam, dan Hispanik," dan secara umum "pekerja produksi semi terlatih": yaitu mayoritas populasi di sebuah kota di mana 40% anak hidup di bawah garis kemiskinan, mengalami kekurangan dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang "mengunci mereka" dalam takdir yang pahit.

Perhatikan bahwa upah nyata telah jatuh hingga setara dengan level tahun '60-an bagi pekerja produksi dan non-supervisi. Menurut Badan Kongres untuk Pengkajian Teknologi (Congressional Office of Technology Assesment), dalam analisanya mengenai versi NAFTA yang direncanakan (dan dilaksanakan), memperkirakan kejatuhan upah tersebut "dapat mengunci Amerika Serikat sehingga dalam jangka waktu lama akan berada dalam tingkat upah dan produktivitas yang rendah". Di luar itu revisi yang diusulkan OTA, pekerja, dan kritikus lain—dan tidak pernah diangkat dalam perdebatan—sebenarnya diperkirakan dapat membawa keuntungan bagi masyarakat di tiga negara.

Versi NAFTA yang akhirnya diterapkan tampaknya akan mempercepat "kemajuan yang didambakan" (*Wall Street Journal*), yakni penurunan biaya pekerja AS sampai di bawah semua negara industri besar lainnya kecuali Inggris. Pada tahun 1985, AS berada di tingkat teratas di antara tujuh negara utama yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis (G-7), sebagaimana yang dibayangkan dari sebuah negara terkaya di dunia. Dalam perekonomian yang lebih terintegrasi, dampaknya lebih mendunia dan ini harus diakomodasi oleh para pesaing. GM misalnya, dapat saja pindah ke Meksiko atau sekarang ke Polandia di mana mereka dapat memperoleh pekerja yang upahnya jauh lebih murah dibanding upah pekerja Barat, dan diproteksi dengan tarif tinggi serta berbagai pembatasan lainnya. Volkswagen dapat beralih ke Republik Ceko untuk memperoleh keuntungan dari proteksi yang serupa, mengambil laba dan membuat pemerintah menanggung sejumlah biaya. Daimler-Benz dapat melakukan hal serupa di Alabama. Modal dapat bergerak dengan bebas, sementara pekerja dan masyarakat harus merasakan konsekuensinya. Sementara itu pertumbuhan pesat dari modal spekulatif yang tidak diatur memiliki daya tekan yang hebat melawan kebijakan stimulatif pemerintah.

Ada banyak faktor yang membawa masyarakat global menuju upah rendah, pertumbuhan lambat dan keuntungan tinggi di masa depan, yang disertai dengan peningkatan polarisasi dan disintegrasi sosial. Konsekuensi lainnya adalah makin kaburnya proses demokratis yang bermakna seperti pembuatan keputusan yang kini dirampas oleh lembaga-lembaga swasta dan badan-badan semi-pemerintah yang bersatu, yang disebut *Financial Times* sebagai "pemerintah dunia *de facto*". Mereka bekerja diam-diam dan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Kemajuan ini hanya sedikit terkait dengan liberalisme ekonomi, sebuah konsep yang hampir tidak memiliki signifikansi dalam sebuah dunia di mana komponen terbesar "perdagangannya" terdiri dari transaksi antarperusahaan yang dikelola terpusat (sebagai contoh, setengah ekspor AS ke Meksiko

pra-NAFTA adalah ekspor yang tidak pernah masuk ke pasar Meksiko). Sementara itu kekuatan swasta menuntut dan menerima perlindungan dari kekuatan pasar, seperti yang terjadi di masa lalu.

"Zapatista benar-benar mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat Meksiko," komentar ilmuwan politik Meksiko, Eduardo Gallardo, sesaat setelah terjadinya perlawanan. Ia memperkirakan dampak perlawanan tersebut akan meluas, termasuk menjatuhkan diktator terpilih yang sudah lama berkuasa. Berbagai jajak pendapat di Meksiko mendukung kesimpulan tersebut. Mereka melaporkan dukungan mayoritas terhadap sejumlah alasan pemberontakan Zapatista. Dukungan yang sama mereka dapatkan dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari masyarakat di negara-negara industri kaya yang memahami bahwa alasan Zapatista tidak berbeda dari kegelisahan mereka selama ini, sekalipun lingkungan mereka berbeda sama sekali. Dukungan yang luas tersebut juga dipacu lebih jauh dengan keinginan Zapatista untuk meraih dukungan dari sektor masyarakat yang lebih luas dan menggabungkan semuanya dalam suatu upaya bersama dan paralel untuk mengendalikan kehidupan dan takdir mereka sendiri. Solidaritas domestik dan internasional tidak dapat disangkal lagi merupakan faktor utama untuk menangkal tekanan brutal dari militer, serta memberikan angin segar bagi kegiatan pengorganisasian dan aktivisme di seluruh dunia.

Protes masyarakat pribumi Indian di Chiapas hanyalah gambaran sepintas mengenai "bom waktu" yang akan segera meledak, bukan hanya di Meksiko.

Sebagian besar artikel ini dimuat dalam In These Times, *21 Februari 1994.*

BAB VI
"Senjata Pamungkas"

Mari kita mulai dengan beberapa hal sederhana yang mengasumsikan kondisi yang saat ini tengah berlangsung—bukan (kondisi) akhir dari suatu perlawanan tanpa henti untuk meraih kebebasan dan keadilan.

Terdapat sebuah "arena publik" di mana, secara prinsip, individu dapat berpartisipasi dalam keputusan yang melibatkan masyarakat umum: bagaimana pajak dipungut dan digunakan, seperti apa kebijakan luar negeri yang akan diterapkan, dan lain sebagainya. Dalam dunia negara-bangsa, arena publik sebenarnya adalah wajah lain dari pemerintahan, hanya saja pada tingkat yang berbeda. Demokrasi berfungsi sejauh individu dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam arena publik, sembari melakukan urusan mereka masing-masing, baik secara individual maupun kolektif, tanpa campur tangan tidak sah dari pemegang kekuasaan. Terlaksananya demokrasi memerlukan kesetaraan relatif dalam hal akses kepada sumber daya—materi, informasi, dan lainnya. Ini adalah sebuah aksioma yang setua Arsitoteles. Secara teori pemerintah adalah lembaga untuk melayani "konstituen domestiknya" dan harus tunduk terhadap keinginan mereka. Karena itu ukuran pelaksanaan demokrasi adalah sejauh mana teori mendekati kenyataan, dan sejauh mana "konstituen domestik" mendekati masyarakat.

Dalam demokrasi kapitalis, arena publik diperluas dan diperkaya oleh perlawanan rakyat yang panjang dan seringkali pahit. Sementara itu kekuatan swasta yang terkonsentrasi digunakan untuk mempersempitnya. Konflik ini mewarnai sebagian besar sejarah modern. Cara paling efektif untuk membendung demokrasi adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari publik kepada institusi yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban: para raja dan ratu, kasta para pemimpin agama, junta militer, diktator partai, atau perusahaan modern. Keputusan yang diambil direktur GE, misalnya, mempengaruhi masyarakat luas secara mendasar, namun toh secara prinsip masyarakat tidak dapat memainkan peran apa pun (kita sisihkan dulu mitos transparan mengenai "demokrasi" pasar dan pemegang saham).

Namun sebenarnya sistem kekuatan yang-tak-bisa-dimintai-pertanggungjawaban ini tetap menawarkan sejumlah pilihan bagi warganya. Mereka dapat mengirim petisi kepada raja atau CEO, atau bergabung dengan partai yang berkuasa. Mereka dapat mencoba berbisnis dengan GE, atau membeli produknya. Mereka bisa memperjuangkan hak-hak mereka dalam situasi tiranik, baik negara maupun perusahaan swasta, atau menggalang solidaritas dengan lainnya. Mereka dapat mencoba membatasi atau melemahkan kekuatan tidak sah dan mengejar cita-cita lama mereka—termasuk yang pernah menyemangati gerakan buruh AS pada awal terbentuknya dulu—yakni bahwa mereka yang bekerja di industri penggilinganlah yang seharusnya memiliki dan menjalankan industri tersebut.

"Korporatisasi Amerika" yang terjadi selama abad lalu merupakan serangan terhadap demokrasi—dan juga pasar. Ia juga adalah bagian dari perubahan, dari sesuatu yang mirip "kapitalisme" menjadi pasar yang diatur dengan canggih di era korporat/negara modern. Versi terbarunya sekarang disebut "meminimalkan peran negara" yaitu mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan dari arena publik ke suatu tempat lain: "pada masyarakat" menurut retorika kekuasaan; dan pada tiran

swasta dalam kenyataannya. Semua tindakan tersebut dirancang untuk membatasi demokrasi dan menjinakkan "gerombolan bandit"—demikian masyarakat disebut oleh orang-orang yang dulu menamakan dirinya sebagai "kelompok dengan kualitas terbaik" dan sekarang dengan nama "pihak yang paling bertanggungjawab"—selama gelombang pertama perjuangan menegakkan demokrasi modern, tepatnya pada abad ke-17 di Inggris. Persoalan dasarnya tetap ada meski terus-menerus mengambil bentuk yang baru, yakni mengupayakan cara-cara baru untuk mengontrol dan meminggirkan (kelompok lain) yang pada akhirnya mengundang perlawanan rakyat yang juga terus berubah modusnya.

Yang disebut sebagai "perjanjian perdagangan bebas" sebenarnya adalah alat lain untuk melemahkan demokrasi. Perjanjian-perjanjian tersebut dirancang untuk mengalihkan pembuatan keputusan—yang menyangkut kehidupan dan aspirasi masyarakat luas—ke tangan tiran swasta yang beroperasi secara rahasia tanpa pengawasan atau kendali publik. Tidak mengejutkan jika publik tidak menyukai mereka. Yang terjadi selanjutnya bisa diduga, yakni upaya sungguh-sungguh untuk menghindarkan gerombolan bandit dari pemahaman yang benar dan informasi yang relevan.

Sebagian besar kenyataan ini diterima dengan terpaksa. Kita baru saja menyaksikan sebuah contoh lain: upaya yang dilakukan selama beberapa bulan untuk meloloskan undang-undang "Jalur Cepat" (*Fast Track*) yang memungkinkan eksekutif membicarakan perjanjian perdagangan tanpa pengawasan dari Kongres dan masukan publik. Sekadar "ya" atau "tidak" saja sudah cukup. "Jalur Cepat" mendapat dukungan penuh dari kekuasaan, namun, seperti disesali oleh *Wall Street Journal*, pihak lawan memiliki "senjata pamungkas", yakni mayoritas warga masyarakat. Publik terus menentang undang-undang sekalipun tanpa dukungan media, dan dengan lugunya mempercayai bahwa mereka seharusnya tahu apa yang terjadi pada diri mereka dan memiliki hak untuk ikut menentukan. Dengan cara serupa

NAFTA diterapkan, yakni dengan mengabaikan perlawanan dari publik yang bersikukuh dengan pendapatnya meski itu berarti berhadapan dengan dukungan penuh dari negara dan kekuatan bisnis terhadap NAFTA, termasuk media, yang tidak hanya menolak untuk menyuarakan posisi oposan utama (gerakan buruh) tapi bahkan menyerangnya dengan aneka kesalahan yang dicari-cari.[1]

Jalur Cepat dipandang sebagai sebuah isu perdagangan bebas, namun sebenarnya tidak begitu. Seorang pendukung pasar bebas yang paling antusias sekalipun akan menentang keras Jalur Cepat jika ia percaya pada demokrasi, isu yang menjadi sentral masalah. Di samping itu, perjanjian-perjanjian lain nyaris tidak dianggap sebagai perjanjian perdagangan bebas lagi dibanding NAFTA atau persetujuan GATT/WTO, yang kini dibicarakan di mana-mana.

Dalih resmi bagi Jalur Cepat dicetuskan oleh Deputi Perwakilan Perdagangan AS, Jeffrey Lang: "Prinsip dasar negosiasi adalah hanya satu orang [dalam hal ini Presiden] yang dapat bernegosiasi mewakili AS."[2] Peran Kongres adalah sebagai pemberi stempel sementara peran publik adalah mengamati—lebih baik lagi jika mengamati sesuatu yang lain.

"Prinsip dasar" ini cukup nyata, namun cakupannya dangkal. Prinsip ini berlaku untuk *perdagangan* namun tidak untuk permasalahan lain: hak asasi manusia, misalnya. Di sini prinsip yang berlaku adalah sebaliknya: anggota Kongres harus diberi semua peluang untuk memastikan bahwa Amerika Serikat "menjaga rekornya" dalam hal perjanjian yang tidak diratifikasi, yang termasuk terburuk di dunia. Bahkan beberapa konvensi mengalami penundaan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dibicarakan di Kongres, seperti halnya beberapa kebijakan yang dibiarkan tenggelam oleh berbagai kondisi sehingga akhirnya tidak dapat dijalankan di AS. Alasannya biasanya "tidak dapat diterapkan secara terpisah" atau memerlukan penanganan khusus.

Perdagangan adalah satu hal, penganiayaan dan hak-hak perempuan dan anak adalah hal lain.

Kesenjangan pun berlangsung makin luas. Cina dijatuhi sanksi berat karena tidak mematuhi tuntutan proteksionistis Washington atau karena mencampuri keputusan AS dalam pemberian hukuman kepada Libya. Namun teror dan penganiayaan memunculkan tanggapan yang berbeda: dalam kasus ini, sanksi akan menjadi "kontra-produktif." Penerapan sanksi akan menghalangi upaya memperjuangkan hak asasi manusia bagi rakyat yang menderita di Cina dan wilayah kekuasaannya. Kasusnya mirip dengan keengganan melatih militer Indonesia karena akan "mengurangi kemampuan kita untuk secara positif mempengaruhi kebijakan dan mengubah perilaku mereka mengenai HAM", sebagaimana yang baru-baru ini dijelaskan Pentagon. Oleh karena itu, misi di Indonesia harus dilaksanakan, meski ini berarti mengesampingkan perintah Kongres. Ini cukup masuk akal. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana latihan militer AS "membayar dividen" pada awal tahun '60-an dan "mendorong" militer untuk melaksanakan tugas penting mereka. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Robert McNamara pada Kongres dan Presiden menyusul pembantaian berskala besar oleh militer pada tahun 1965 yang meminta korban ratusan ribu jiwa hanya dalam waktu beberapa bulan. Itu adalah "pembantaian massal yang mengejutkan" (*New York Times*) yang memunculkan euforia kebebasan di antara "orang-orang terbaik" (kata *Times* menambahkan) dan anugerah bagi kaum "moderat" yang melaksanakannya. McNamara secara khusus memuji pelatihan yang diberikan kepada para perwira militer Indonesia, di depan publik berbagai universitas di AS. Ia menyebut hal itu sebagai "faktor-faktor yang sangat signifikan" dalam pembentukan "elit politik Indonesia yang baru" (yakni pihak militer) pada posisi yang sesuai.

Dalam menyusun kebijakan hak asasi manusia atas Cina, pemerintah mungkin juga mengacu pada saran konstruktif dari misi militer Kennedy ke Kolombia: "pembunuhan oleh kelompok paramiliter, sabotase, dan atau terorisme terhadap apa yang dikenal sebagai pendukung komunis" (yang mencakup

petani, penggerak organisasi, aktivis hak asasi manusia, dan lainnya). Para murid mempelajari hal itu dengan baik, dengan mengkompilasikan catatan hak asasi manusia terburuk pada tahun '90-an di belahan dunia tersebut dan peningkatan pelatihan dan bantuan militer AS.

Karena itu orang yang cukup waras dapat dengan mudah memahami bahwa tekanan yang terlalu keras pada Cina akan menjadi kontraproduktif, seperti halnya penyiksaan terhadap lawan politik atau kebrutalan di Tibet. Bahkan mungkin hal itu menyebabkan Cina mengalami "dampak buruk yang dialami oleh masyarakat yang terisolasi dari pengaruh Amerika." Alasan ini dikemukakan oleh sebuah kelompok eksekutif yang ingin menghapuskan hambatan perdagangan AS yang telah menghalangi mereka dari pasar Kuba, di mana mereka sebenarnya dapat membantu mengembalikan "dampak menguntungkan dari pengaruh Amerika" yang muncul dari "upaya liberasi" seratus tahun lalu melalui pemerintahan Batista—seperti yang terjadi dan terbukti membawa efek bagus di Haiti, EL Salvador, dan surga masa kini lainnya, yang tanpa sengaja juga membawa banyak keuntungan.[3]

Diskriminasi yang tersamar ini menjadi bagian dari strategi yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin meraih kehormatan dan prestise. Dengan menguasai mereka, kita dapat melihat mengapa hak-hak, termasuk HAM, para investor memerlukan perlakuan yang berbeda. Kontradiksi mengenai "prinsip dasar" tampak sangat nyata.

Lubang Hitam Propaganda

Sangatlah mencerahkan ketika kita mencari tahu apa yang sengaja dihapus dalam kampanye propaganda. Jalur Cepat memperoleh publikasi luar biasa. Namun sejumlah isu krusial menghilang ke dalam lubang hitam yang sengaja disiapkan untuk sejumlah topik yang dianggap tidak sesuai untuk konsumsi publik. Salah satunya adalah fakta yang telah disebutkan, bahwa isu sebenarnya bukan mengenai perjanjian perdagangan

melainkan lebih mengenai prinsip demokrasi, dan bahwa seringkali perjanjian yang ada bukan mengenai perdagangan *bebas*. Yang juga mengejutkan adalah bahwa selama masa kampanye yang sangat intensif tidak pernah ada tanggapan dari publik mengenai kesepakatan yang seharusnya menjadi kepedulian utama: Perjanjian Investasi Multilateral (Multilateral Agreement on Investment/ MAI), yang merupakan persoalan yang jauh lebih penting daripada membawa Chile ke dalam NAFTA, atau informasi-informasi sepele-namun-menarik yang dipakai untuk menjelaskan mengapa Presiden sendiri yang harus menegosiasikan perjanjian perdagangan, tanpa campur tangan publik.

MAI mendapat dukungan kuat dari lembaga keuangan dan industri yang terlibat dari jarak dekat sejak awal perencanaannya. Misalnya dari Dewan Bisnis Internasional Amerika Serikat yang, menurut kata-katanya sendiri, "memajukan kepentingan global bisnis Amerika baik dalam maupun luar negeri." Pada bulan Januari 1996, Dewan bahkan menerbitkan *A Guide to the Multilateral Agreement on Investment* yang diperuntukkan bagi konstituen bisnis dan lingkaran dalam mereka, dan sudah barang tentu untuk media. Bahkan sebelum Jalur Cepat dibawa ke Kongres, pihak Dewan telah meminta pemerintahan Clinton untuk memasukkan MAI ke dalam undang-undang yang kemudian tertunda. Ini dilaporkan oleh *Miami Herald* bulan Juli 1997—tampaknya merupakan pernyataan pertama mengenai MAI di media, dan merupakan suatu hal yang jarang. Kita akan kembali untuk membahas masalah ini secara detil.[4]

Mengapa kemudian kebungkaman selama kontroversi Jalur Cepat, atau mengenai MAI, terjadi? Sebuah alasan yang cukup mengena pun terpikir. Hanya sedikit pemimpin politik dan media yang meragukan bahwa jika publik harus diberi informasi, maka akan ada kehebohan menyangkut MAI. Oposan mungkin sekali lagi akan menggerakkan "senjata pamungkas" mereka jika fakta-fakta tersebut bocor. Karenanya masuk akal untuk melakukan negosiasi MAI di bawah "selubung kerahasiaan," meminjam

istilah yang digunakan mantan Hakim Agung Majelis Agung Australia, Sir Anthony Mason, ketika menentang keputusan pemerintahnya untuk menghindarkan negosiasi tentang "sebuah perjanjian yang akan memiliki dampak besar di Australia jika kita meratifikasinya" dari pengawasan publik.[5]

Tapi suara serupa tidak terdengar di sini. Mungkin ini berlebihan, tapi selubung kerahasiaan tersebut dijaga dengan kewaspadaan yang lebih besar dalam institusi-institusi kita yang bebas.

Di Amerika Serikat hanya sedikit yang mengetahui segala hal tentang MAI, yang berlangsung di bawah negosiasi intensif di forum OECD sejak bulan Mei 1995. Target semula adalah Mei 1997. Jika tujuan telah dicapai, publik akan tahu tentang MAI sama banyaknya dengan mereka mengetahui tentang Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1996, yang merupakan hadiah besar dari publik untuk kekuatan swasta yang terkonsentrasi, yang dimuat besar-besaran di halaman bisnis. Namun negara-negara OECD tidak dapat menyelesaikan perjanjian sesuai jadwal dan target tertunda selama satu tahun.

Rencana awal dan yang diharapkan adalah untuk merumuskan perjanjian di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun upaya tersebut dihalangi oleh negara-negara dunia ketiga, terutama India dan Malaysia, yang menyadari bahwa keputusan yang dibuat akan menjauhkan mereka dari berbagai keistimewaan yang selama ini dinikmati oleh negara-negara pihak kaya untuk mendapatkan posisi mereka yang sekarang. Negosiasi kemudian dipindahkan ke sudut yang lebih aman, ke OECD, di mana diharapkan sebuah persetujuan akan dicapai dan "akan menarik minat negara berkembang untuk bergabung." Demikian dinyatakan secara lugas oleh *Economist* dari London.[6] Persetujuan tersebut terkait dengan penderitaan yang disebabkan oleh ketersingkiran dari pasar dan sumber daya yang dimiliki mereka yang kaya—sebuah konsep yang umum dikenal mengenai "pilihan bebas" di dalam sistem di mana kesenjangan kekuatan dan kemakmuran terbentang sangat luasnya.

Selama hampir tiga tahun, massa yang bodoh dan kasar dijauhkan dari pengetahuan mengenai apa yang sebenarnya sedang berlangsung. Tapi tidak seluruhnya. Di dunia ketiga isu ini telah muncul pada awal 1997.[7] Di Australia, isu ini bocor pada bulan Januari 1998 dan dimuat di halaman bisnis, dan tiba-tiba memicu munculnya berbagai laporan dan kontroversi dalam pers nasional; dan inilah yang menjadi sumber kecaman Sir Anthony, yang diungkapkannya dalam sebuah pertemuan di Melbourne. Partai oposisi "mendesak pemerintah untuk membawa perjanjian itu ke Komite Parlemen yang mengurusi masalah kesepakatan sebelum menandatanganinya," demikian laporan pers. Namun pemerintah menolak untuk memberi parlemen informasi terinci ataupun kesempatan untuk menelaah masalah itu lebih dulu. "Posisi kami di MAI sangat jelas," demikian tanggapan pemerintah: "Kami tidak akan menandatangani apa pun kecuali benar-benar selaras dengan kepentingan nasional Australia." Dengan kata lain, "Kami akan melakukan seperti kemauan kami"—atau lebih akurat lagi, seperti yang diperintahkan tuan kami. Dan mengikuti kelaziman yang ada, "kepentingan nasional" akan ditentukan oleh pusat kekuatan yang beroperasi dalam ruang tertutup.

Namun karena terus-menerus di bawah tekanan, beberapa hari kemudian pemerintah setuju untuk mengizinkan suatu komite parlemen meninjau MAI. Para editor dengan enggan mendukung keputusan tersebut: hal itu diperlukan sebagai reaksi atas "histeria xenophobia" yang menghinggapi para "pembuat keonaran" dan "aliansi sesat yang terdiri dari kelompok-kelompok pemberi bantuan, persatuan perdagangan, aktivis lingkungan hidup dan konspirasi ganjil para teoris." Mereka mengingatkan bahwa bagaimanapun juga, setelah konsesi yang diberikan, "sangat penting bagi pemerintah untuk tidak mengambil langkah mundur dari komitmen mereka yang kuat" mengenai MAI. Pemerintah menolak tuduhan menutupi rahasia dengan berkilah bahwa bahwa rancangan kesepakatan tersebut bisa diakses di Internet—berkat bantuan kelompok-kelompok

aktivis yang memuatnya di sana setelah informasi tersebut dibocorkan kepada mereka.[8]

Kita pun bergembira, karena pada akhirnya demokrasi berkembang di Australia!

Kanada pun kini sedang "terserap" ke Amerika Serikat dan prosesnya dipercepat dengan "perdagangan bebas" dan "aliansi sesat" untuk mencapai kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Selama setahun kesepakatan tersebut banyak dibicarakan dalam harian dan mingguan berita terkemuka, muncul di *prime time* televisi nasional, dan dalam pertemuan-pertemuan publik. Provinsi British Columbia mengumumkan di Majelis Rendah (House of Commons) bahwa mereka "dengan tegas menolak" kesepakatan yang diusulkan, dengan menekankan tentang "pembatasan yang tidak dapat diterima" terhadap pemerintah terpilih di tingkat federal, provinsi, dan lokal, serta dampaknya yang mengerikan terhadap program-program sosial (layanan kesehatan dan lainnya), perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, "investasi" yang maknanya sangat luas, dan bentuk-bentuk pelanggaran lain terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah provinsi menentang rancangan undang-undang yang memungkinkan perusahaan menuntut pemerintahan, sementara mereka sendiri kebal dari segala tuntutan, dan tuntutan terhadap mereka diselesaikan oleh "panel yang anggotanya ditunjuk dan tidak dikenal" yang konon terdiri dari para "pakar perdagangan", yang berhak mengambil keputusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan transparansi, serta tanpa kemungkinan untuk mendengarkan pendapat pihak lain.

Saat rahasia tersebut akhirnya terbongkar karena tekanan dari bawah, pemerintah Kanada perlu kembali meyakinkan publik bahwa ketidaktahuan adalah yang terbaik bagi mereka. Tugas tersebut dilaksanakan dalam sebuah forum di stasiun televisi nasional, CBC, oleh Menteri Federal untuk Perdagangan Internasional Kanada, Sergio Marchi. Dia mengatakan "ingin melihat warga kembali merasa aman" dengan "pendekatan jujur

yang saya pikir telah diperlihatkan oleh Perdana Menteri" dan dengan "kecintaannya pada Kanada."

Hal ini seharusnya menyelesaikan persoalan. Dengan demikian demokrasi di perbatasan utara juga berkembang baik.

Menurut CBC, pemerintah Kanada—seperti halnya Australia—"saat ini tidak memiliki rencana undang-undang apa pun mengenai MAI" dan "menteri perdagangan menyatakan bahwa ini mungkin tidak penting" karena MAI hanyalah perpanjangan NAFTA."

Ada juga diskusi di pelbagai media nasional di Inggris dan Prancis. Tapi saya tidak tahu apakah di sana, atau di tempat lain di dunia yang bebas ini, ada keperluan untuk meyakinkan publik bahwa kepentingan mereka dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin yang "mencintai mereka", yang "memancarkan kejujuran" dan tegar dalam melindungi "kepentingan nasional."

Tidak terlalu mengejutkan jika kisah itu mengikuti pola unik di negara adidaya di dunia, di mana sekelompok "orang dengan kualitas terbaik" mengklaim dirinya sebagai pahlawan kebebasan, keadilan, hak asasi manusia, dan—di atas segalanya—demokrasi. Pemimpin media tentunya telah lama mengetahui tentang MAI dan implikasinya yang luas, sebagaimana juga kaum intelektual umum dan pakar yang kualitasnya biasa-biasa saja. Seperti telah disebutkan, dunia bisnis sangat sadar dan terlibat secara aktif. Sembari mempertontonkan kedisiplinan diri secara sangat impresif, dengan pengecualian pada kesalahan statistikal, pers yang bebas telah berhasil mengelabui mereka yang percaya penuh kepadanya—tidak ada tugas yang sederhana dalam dunia yang sangat rumit ini.

Dunia perusahaan, tak perlu dipertanyakan lagi, sangat mendukung MAI. Sekalipun ditutup-tutupi, ada dugaan yang cukup beralasan bahwa dunia usaha sebenarnya juga sangat bersemangat dalam memberikan pencerahan kepada publik. Namun mereka juga mengerti bahwa "senjata pamungkas" mungkin akan terhunus juga jika gerombolan bandit mendapat

angin untuk bergerak. Dilema tersebut secara alamiah telah terselesaikan. Dan kita telah mengamatinya selama hampir tiga tahun.

Yang Berharga dan yang Sepele

Pendukung MAI memiliki satu argumen kuat: para kritikus tidak memiliki informasi memadai untuk membuat kasus yang benar-benar kuat. Tujuan "selubung kerahasiaan" adalah untuk menjamin hasil, atau dengan kata lain upaya yang dilakukan cukup sukses. Hal ini terutama sangat benar untuk konteks Amerika Serikat, yang institusi-institusinya paling stabil dan demokratis di dunia, serta berhak mengklaim diri sebagai model demokrasi negara kapitalis. Dengan pengalaman dan statusnya, tidaklah mengejutkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dipahami dengan jelas di Amerika Serikat, dan dengan gamblang diartikulasikan di mana-mana. Sebagai contoh, ilmuwan politik terkemuka dari Harvard, Samuel Huntington, dalam tulisannya *American Politics* menyimpulkan bahwa kekuasaan tidak boleh tampak jika ingin berfungsi efektif: "Para arsitek kekuasaan di Amerika Serikat harus menyusun suatu kekuatan yang dapat dirasakan namun tak dapat dilihat. Kekuasaan akan tetap kuat jika tetap berada dalam gelap. Berada di bawah terang matahari akan membuatnya menguap." Dia menjelaskan tesisnya itu pada tahun yang sama (1981) ketika menerangkan fungsi "tekanan Soviet": "Anda mungkin harus menjual [intervensi atau tindakan militer lainnya] dengan cara sedemikian sehingga menciptakan kesan menyesatkan bahwa seolah-olah Uni Sovietlah yang kalian perangi. Itulah yang selalu dilakukan Amerika Serikat sejak Doktrin Truman."[11]

Dalam lingkup inilah—"membangun kesan yang keliru" untuk menipu publik dan menyingkirkan mereka—para pemimpin yang bertanggung jawab harus menciptakan karya mereka dalam masyarakat demokratis.

Meski demikian tidak adil menuduh kekuatan-kekuatan dalam OECD telah melakukan negosiasi secara diam-diam.

Bagaimanapun para aktivis berhasil mempublikasikan versi mereka melalui Internet setelah mendapatkan data-datanya secara tidak sah. Para pembaca "pers alternatif" dan jurnal Dunia Ketiga serta mereka yang terpengaruh oleh "aliansi sesat" telah mengikuti proses tersebut setidaknya sejak awal 1997. Dan berkaitan dengan *mainstream*, tidak mungkin meragukan partisipasi langsung organisasi yang selama ini telah "mengembangkan kepentingan global bisnis Amerika" dan rekanan mereka di negara kaya lainnya.

Namun ada beberapa sektor yang entah bagaimana terabaikan. Misalnya Kongres AS pada bulan November lalu. Dua puluh lima anggota Kongres mengirimkan surat pada Presiden Clinton yang menyatakan bahwa negosiasi MAI telah "menarik perhatian kami"—diduga melalui upaya para aktivis dan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat.[1] Mereka meminta presiden untuk menjawab tiga pertanyaan sederhana.

Pertama, "Karena klaim pemerintah baru-baru ini yang menyebutkan bahwa mereka tidak mampu menegosiasikan perjanjian yang rumit, multisektor, dan multilateral tanpa kewenangan Jalur Cepat, bagaimana mungkin MAI hampir diselesaikan" dengan pasal-pasal yang "serumit NAFTA atau GATT," dan dengan syarat-syarat yang "akan membatasi secara signifikan kebijakan dan perundang-undangan AS mengenai peraturan investasi di tingkat federal, negara bagian, dan lokal?"

Kedua, "Bagaimana perjanjian ini dapat dinegosiasikan sejak Mei 1995 tanpa konsultasi atau pengawasan apa pun dari Kongres, terutama mengingat otoritas konstitusional eksklusif Kongres untuk mengatur perdagangan internasional?"

Ketiga, "MAI menyediakan pasal-pasal dengan penafsiran luas yang akan memungkinkan perusahaan atau investor asing secara langsung menuntut ganti rugi terhadap pemerintah AS jika kita mengambil tindakan yang mengekang 'keleluasaan' investasi. Pasal ini lebar, tidak jelas, serta jauh melampaui konsep terbatas dalam undang-undang domestik AS. Mengapa AS dengan suka rela menyerahkan kedaulatannya dan mengambil

tanggung jawab jika terjadi masalah hanya karena peraturan yang tidak jelas, seperti mengambil tindakan 'dengan dampak yang sama' dengan pengambilalihan 'tak langsung'? "

Pada pertanyaan ketiga, para penandatangan mungkin ingat tuntutan yang diajukan oleh Ethyl Corporation—yang dikenal sebagai produsen bensin terkemuka—terhadap pemerintah Kanada, yang menuntut ganti rugi sebesar 250 juta dolar akibat kerugian "pengambilalihan" dan pukulan bagi "reputasi baik" Ethyl akibat undang-undang Kanada yang menolak MMT, bahan aditif dalam bensin. Kanada menganggap MMT sebagai racun berbahaya dan berisiko membahayakan kesehatan. Anggapan ini sejalan dengan perjanjian dengan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup AS yang sangat membatasi penggunaan bahan tersebut. Negara bagian California bahkan telah melarangnya secara total. Tuntutan itu juga menyebutkan kerusakan yang diakibatkan oleh "dampak buruk" undang-undang Kanada yang telah mengakibatkan Selandia Baru dan negara lainnya meninjau kembali penggunaan MMT mereka, demikian menurut Ethyl. Atau barangkali para penandatangan surat itu sedang berpikir untuk mengajukan tuntutan terhadap Meksiko oleh perusahaan pengelola limbah berbahaya AS, Metalclad, yang menuntut ganti rugi sebesar 90 juta dolar akibat "pengambilalihan", karena daerah yang mereka gunakan untuk pembuangan limbah berbahaya dinyatakan sebagai bagian zona ekologi.[12]

Kasus-kasus tersebut diproses berdasarkan peraturan NAFTA yang mengizinkan perusahaan untuk menuntut pemerintah, yang pada dasarnya memiliki hak-hak sebagai negara bagian (bukan hanya perorangan, seperti sebelumnya). Tujuannya mungkin untuk mengeksplorasi, dan jika mungkin memperluas, batas (samar) peraturan ini. Untuk sebagian barangkali hal itu hanya dimaksudkan sebagai intimidasi—yaitu metode standar dan efektif yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang berkantong tebal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biasanya melalui ancaman legal, meski mungkin semata-mata hanya untuk iseng.[13]

"Dengan mempertimbangkan besarnya dampak potensial MAI, kami tidak sabar menanti jawaban Anda atas pertanyaan ini." Demikian bunyi akhir dari surat Kongres tersebut. Jawaban akhirnya diberikan kepada para penanya tersebut, namun tidak menjelaskan apa pun. Media diberi penjelasan mengenai semua ini, namun saya tidak membaca laporan apa pun. [14]

Selain Kongres, kelompok lain yang terabaikan adalah masyarakat. Selain jurnal-jurnal perdagangan, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada liputan dari media terkemuka hingga pertengahan 1997. Tapi itu pun sebentar saja. Seperti telah disebutkan, *Miami Herald* melaporkan tentang MAI pada bulan Juli 1997 dengan menyebutkan antusiasme dan keterlibatan langsung dunia bisnis. *Chicago Tribune* memuat laporan pada bulan Desember, sembari menyatakan bahwa persoalan tersebut "tidak mendapat perhatian publik maupun debat politik," selain di Kanada. Di Amerika Serikat, "ketidakjelasan ini tampaknya disengaja," demikian menurut laporan *Tribune*. "Sumber-sumber dari dalam menyatakan bahwa pemerintah tidak berniat memunculkan lebih banyak perdebatan mengenai perekonomian global." Terlepas dari segala perhatian publik, kerahasiaan adalah kebijakan terbaik, dengan mengandalkan pada pada kolusi sistem informasi.

Newspaper of Record memecahkan kebungkamannya beberapa bulan kemudian dengan menerbitkan iklan yang didanai oleh Forum Internasional tentang Globalisasi (International Forum on Globalization), yang menentang kesepakatan itu. Iklan tersebut mengutip kepala berita di *Business Week* yang menggambarkan MAI sebagai "perjanjian eksplosif yang belum pernah anda dengar." "Perjanjian itu ... akan merombak peraturan kepemilikan asing—berdampak pada semua hal, mulai dari pabrik hingga real estat, dan bahkan perusahaan sekuritas. Namun kebanyakan pembuat undang-undang belum pernah mendengar tentang MAI karena pembicaraan oleh pemerintahan Clinton dilakukan secara rahasia, jauh dari jangkauan radar Kongres," dan media sengaja menyembunyikan agenda Gedung

Putih. Mengapa?, tanya Forum Internasional sambil secara implisit menjawabnya dengan ulasan mengenai hal-hal mendasar dari perjanjian tersebut.

Beberapa hari kemudian (16 Februari 1998), *Morning Edition* dari NPR menulis satu segmen mengenai MAI. Minggu berikutnya, *Christian Science Monitor* memuat berita yang sama (hanya lebih kecil). *New Republic* juga telah mengamati munculnya perhatian publik mengenai MAI. Isu ini tidak ditangani dengan baik dalam sektor-sektor yang semestinya, demikian kesimpulan *New Republic*, karena "tekanan terbesar" yang "secara umum condong ke kiri bahkan condong lebih jauh lagi menuju internasionalisme." Karena itulah pers beraliran kiri gagal menengarai penolakan publik terhadap Jalur Cepat, serta tidak memperhatikan bahwa para pembuat onar yang sama "telah mempersenjatai diri untuk bertempur" menentang MAI. Pers seharusnya melaksanakan tanggung jawabnya secara lebih serius dan melancarkan serangan preventif melawan "paranoia terhadap MAI" yang "muncul kembali melalui Internet" dan bahkan terbawa ke perbincangan di ruang publik. Sekedar mengejek gagasan tentang "bumi yang datar dan kebisingan helikopter hitam" mungkin tidak cukup. Tutup mulut juga mungkin bukan sikap yang paling bijak jika negara-negara kaya mampu "mengunci liberalisasi undang-undang investasi internasional seperti GATT dan melakukan kodifikasi atas liberalisasi perdagangan."

Pada 1 April 1998, *Washington Post* mengabarkan kepada pembaca nasional opininya yang ditulis oleh staf editorial Fred Hiatt. Dia mengemukakan kecaman umum dari para kritikus dan terhadap klaim "kerahasiaan". Teks ini kemudian dimuat (secara tidak sah) di Internet oleh para aktivis. Seperti orang lain yang terjerumus dalam sikap apologetik, Hiatt tidak mau menanggung konsekuensi yang sudah jelas: bahwa media seharusnya keluar panggung dengan anggun. Setiap bukti yang dianggap penting yang mereka gunakan dapat saja ditemukan

oleh orang awam yang mencari dengan tekun, dan analisis/komentar/perdebatan yang didapat akan disebut tidak relevan.

Hatt menulis bahwa "MAI belum menarik banyak perhatian di Washington"—maksudnya, dalam jurnalnya—satu tahun setelah penandatanganan pertama dilewati, atau tiga pekan sebelum target tahun 1998. Dia membatasi pembahasannya pada beberapa komentar tidak-cerdas-tapi-resmi, yang ditampilkan sebagai fakta tak terbantah, dan menambahkan bahwa pemerintah "belajar dari jalur-cepat bahwa mereka, lebih dari sebelumnya, harus berkonsultasi dengan berbagai perserikatan, pejabat lokal, aktivis lingkungan hidup dan lainnya, justru ketika perjanjian sedang disusun." Kita telah membahas soal ini sebelumnya.[15]

Mungkin sebagai reaksi atas surat kongres, atau sekadar seperti menghadapi situasi yang aneh, Washington mengeluarkan pernyataan resmi mengenai MAI pada 17 Februari 1998. Pernyataan tersebut, yang ditandatangani oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Stuart Eizenstadt, dan Deputi Perwakilan Perdagangan AS, Jeffrey Lang, sepanjang pengetahuan saya tidak memperoleh sedikit pun perhatian. Pernyataan itu standar-standar saja, namun layak ditempatkan di *headline* halaman depan seperti biasanya (sebenarnya tidak ada apa-apanya). Kualitas MAI dianggap terbukti dengan sendirinya, tetapi tidak ada deskripsi maupun argumen yang pernah dikemukakan. Untuk permasalahan seperti tenaga kerja, lingkungan hidup, "pengambilalihan," dan sebagainya, pesan yang muncul sama dengan yang dikeluarkan pemerintah Kanada dan Australia: "Percayai kami, dan tutup mulut."

Yang lebih menarik adalah berita bagus bahwa Amerika Serikat memegang kepemimpinan di OECD dalam memastikan bahwa perjanjian tersebut "mendukung upaya kami yang lebih luas," yang hingga kini tidak diketahui, "dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatnya standar tenaga kerja." Eizenstadt dan Lang "bersyukur bahwa para partisipan sependapat dengan kami" dalam hal ini. Lebih jauh lagi, anggota-

anggota OECD yang lain sekarang "sependapat dengan kami mengenai pentingnya bekerjasama secara erat dengan para konstituen domestik mereka untuk membangun sebuah konsensus" mengenai MAI. Seperti kami, mereka memahami "pentingnya konstituen domestik terlibat dalam proses ini."

"Demi transparansi yang lebih besar," demikian pernyataan resmi tersebut menambahkan, "OECD sepakat untuk menyebarluaskan rancangan perjanjian" yang diharapkan sebelum tenggat waktu dicapai.[16]

Akhirnya, pada titik ini, kita mendengarkan kesaksian yang nyaring terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintahan Clinton, menurut klaim mereka, menjadi pemimpin dunia dalam mendorong agar "konstituen domestiknya" memainkan peran aktif dalam "membangun konsensus" pada MAI.

Siapakah sebenarnya para "konstituen domestik" yang dimaksud? Pertanyaan ini telah terjawab dengan melihat fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Dunia bisnis selama ini telah memiliki peran aktif. Kongres tidak diberi informasi, dan publik yang selama ini hanya menjadi pengganggu—sang "senjata pamungkas"—dibiarkan dalam ketidaktahuan. Hanya dengan memakai logika yang sederhana saja dengan tepat kita akan mengerti siapa yang dianggap sebagai "konstituen domestik" oleh pemerintahan Clinton.

Ini adalah pelajaran yang penting. Nilai yang diterapkan pihak berkuasa jarang sekali dinyatakan secara jujur dan tepat. Untuk adilnya, sikap ini bukan hanya monopoli AS. Nilai-nilai ini dipegang juga di pusat-pusat kekuasaan, baik negara maupun swasta, dalam masyarakat demokrasi parlementer lainnya. Juga oleh sejawat mereka lainnya di dalam masyarakat di mana tidak ada kebutuhan akan retorika berbunga-bunga mengenai "demokrasi."

Hikmah yang muncul sejelas kristal. Perlu bakat besar untuk mengabaikannya dan menutup mata agar tidak melihat betapa semua ini menggambarkan peringatan Madison lebih dari dua ratus tahun lalu, ketika dengan bersungguh-sungguh ia

mengecam "kebejatan sangat nyata di zaman ini" ketika "para penyedia lapangan kerja menjadi kelompok penasihat hukum bagi pemerintah—yang menjadi alat dan tiran sekaligus, yang membiarkan diri disuap oleh kelompok yang paling kaya, yang terbuai oleh pujian, dan kombinasi dari itu semua."

Observasi ini mencapai inti MAI. Seperti kebanyakan kebijakan publik dalam tahun-tahun belakangan, terutama di masyarakat Anglo-Amerika, perjanjian ini dirancang untuk menghalangi demokrasi dan menyunat hak-hak warga negara dengan memindahkan lebih banyak kewenangan pembuatan keputusan pada lembaga-lembaga swasta yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, pemerintahan di mana mereka menjadi "konstituen domestiknya," dan organisasi-organisasi internasional dengan siapa mereka berbagi "kepentingan bersama."

Istilah-istilah MAI

Apa makna sebenarnya yang ingin dinyatakan dan ditunjukkan oleh istilah MAI? Jika fakta dan isu dapat mencapai arena publik, apa yang akan kita temukan?

Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan semacam ini. Bahkan jika kita memiliki naskah lengkap MAI, dan daftar rinci mengenai berbagai inisiatif yang diperkenalkan para penandatangan, serta keseluruhan catatan kata per kata mengenai prosesnya, kita tidak pernah akan mengetahui jawabannya. Alasannya adalah jawaban tersebut tidak ditentukan oleh kata-kata, melainkan oleh hubungan kekuasaan yang menentukan penafsiran atas MAI. Dua abad yang lalu, dalam masa kejayaan demokrasinya, Oliver Goldsmith mengamati bahwa "hukum menindas orang miskin dan orang kaya membuat hukum"—dan persis itulah hukum yang berlaku, kendati pun kata-kata lain yang lebih halus digunakan. Prinsip tersebut tetap valid.[17]

Sekali lagi, ini adalah aksioma yang penerapannya luas. Dalam Konstitusi AS dan amandemennya, kita tidak dapat menemukan pasal-pasal yang memerintahkan kepada—yang

disebut sejarahwan hukum sebagai—"entitas hukum kolektif" untuk menjamin hak asasi manusia (berbicara, kemerdekaan dari pencarian dan penangkapan, hak membeli suara, dan sebagainya). Entitas ini adalah suatu entitas organik yang memiliki hak sebagai "manusia abadi"—hak-hak yang jauh melampaui yang dimiliki manusia biasa, kalau kita memperhitungkan kekuasaan mereka, dan kini hak-hak tersebut diperluas menjadi hak-hak negara, seperti yang telah kita lihat. Akan sia-sia jika kita mencoba melacak hingga ke Piagam PBB untuk mencari dasar otoritas yang diklaim Washington dalam menggunakan kekuatan dan kekerasan untuk meraih "kepentingan nasional" seperti yang didefinisikan oleh manusia abadi yang memberi masyarakat sebuah bayangan bernama "politik" dalam frase terkenal John Dewey. Undang-undang AS mendefinisikan "terorisme" dengan sangat jelas dan hukum AS menentukan hukuman berat atas pelaku kejahatan tersebut. Sebenarnya juga, kita tidak akan dapat menemukan rumusan yang mengecualikan para "arsitek kekuasaan" yang bertanggungjawab atas teror oleh negara, kecuali bagi klien AS yang mengerikan (selama mereka masih menikmati pengampunan Washington): Soeharto, Saddam Hussein, Mobutu, Noriega, dan lainnya, besar maupun kecil. Seperti ditunjukkan oleh berbagai organisasi pembela hak asasi manusia saban tahun, sebenarnya semua bantuan luar negeri AS adalah ilegal, mulai dari yang diterimakan kepada penerima utama bantuan yang ada dalam daftar dan seterusnya, karena hukum melarang bantuan ke negara-negara yang diindikasikan terlibat dalam "penindasan sistematis." Itu yang dikatakan hukum, namun apakah itu makna hukum sebenarnya?

Demikian juga halnya dengan MAI. Ada analisis mengenai "kasus terburuk" yang berubah menjadi analisis yang baik jika "kekuatan tetap berada dalam gelap" dan pengacara perusahaan yang disewa mampu menafsirkan kata-kata yang sengaja dibuat ambigu dan rumit yang digunakan dalam rancangan perjanjian. Ada juga interpretasi yang kurang berbahaya, tapi bisa jadi benar, jika "senjata pamungkas" tidak dapat dikontrol dan prosedur

demokrasi diperkirakan akan mempengaruhi hasil. Di antara hasil yang mungkin ini adalah perombakan keseluruhan struktur dan institusi tidak sah yang selama ini menjadi tumpuannya. Ini adalah masalah organisasi masyarakat dan aksi. Bukan masalah kata-kata.

Di sini orang dapat mengkritisi para kritikus MAI (termasuk saya). Pasal-pasalnya sangat jelas mengatur mengenai hak-hak "investor," bukan mengenai warga negara yang hak-haknya dihapuskan pada saat yang sama. Para kritikus dengan tepat menyebut perjanjian ini sebagai "perjanjian hak-hak investor." Namun tentu saja sebutan ini menyesatkan. Siapakah yang disebut para "investor" itu?

Setengah dari saham-saham tahun 1997 dimiliki oleh kaum paling kaya yang jumlahnya hanya 1% dari total rumah tangga, dan hampir 90% ada di tangan sepuluh besar orang terkaya (konsentrasi masih lebih besar pada obligasi dan surat berharga dibandingkan dengan aset lain). Hal ini membuat dana pensiun hampir terbagi rata di keluarga yang masuk dalam daftar lima besar saja. Antusiasme mengenai inflasi radikal aset dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dipahami. Dan setelah satu abad aktivitas peradilan, [18] kontrol efektif terhadap perusahaan toh hanya berada di segelintir lembaga dan perorangan, yang didukung oleh hukum.

Pembicaraan tentang "investor" tidak perlu mengingatkan kita pada Joe Doakes, tetapi pada Caterpillar Corporation. Mereka berhasil mengatasi masalah pemogokan dengan bantuan investor asing yang sangat diagungkan: menggunakan pertumbuhan keuntungan yang luar biasa yang mereka bagi dengan "konstituen domestik" lainnya untuk menciptakan kelebihan kapasitas produksi mereka di luar negeri guna melemahkan upaya kalangan pekerja di Illinois yang menolak pengurangan gaji dan memprotes kondisi kerja. Perkembangan ini membawa pengaruh yang tidak kecil terhadap liberalisasi keuangan dalam 25 tahun terakhir, yang kini coba diperkuat oleh MAI. Patut diingat bahwa era liberalisasi keuangan ini mencatat

pertumbuhan rendah yang tidak lazim (termasuk "*boom*" baru-baru ini yang merupakan pemulihan terburuk dalam sejarah pasca perang), upah rendah, keuntungan tinggi—dan, secara kebetulan, pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh kalangan kaya.

Istilah yang lebih tepat bagi MAI dan perjanjian serupa lainnya bukanlah "perjanjian hak-hak investor," melainkan "perjanjian hak-hak perusahaan."

"Investor" yang relevan sebenarnya adalah entitas legal kolektif, dan bukan orang-orang sebagaimana dipahami oleh awam dan tradisi pada masa sebelum aktivitas peradilan modern menciptakan kekuatan perusahaan kontemporer. Hal ini mengarahkan kita pada kritik lain. Penentang MAI seringkali menyatakan bahwa perjanjian itu memberi terlalu banyak hak pada perusahaan. Namun memberi terlalu banyak hak bagi raja, diktator, atau pemilik budak berarti memberikan terlalu banyak landasan. Alih-alih "perjanjian hak-hak perusahaan," istilah ini lebih tepat disebut sebagai "perjanjian mengenai kekuasaan perusahaan", karena sebenarnya sangat tidak jelas mengapa lembaga seperti itu dapat memiliki hak.

Ketika korporatisasi negara pada masyarakat kapitalis terjadi sekitar satu abad lalu, sebagai bagian dari reaksi atas kegagalan besar pada pasar, kaum konservatif—golongan yang kini nyaris hilang—berkeberatan terhadap terjadinya hal ini berdasarkan prinsip-prinsip liberalisme klasik. Dan sudah sewajarnya demikian. Kita mungkin ingat kritik Adam Smith mengenai "perusahaan saham gabungan" pada zamannya, terutama jika manajemen diberi kebebasan. Dan mengenai korupsi inheren di dalam tubuh swasta, dengan mengadopsi pandangan masam ala Adam Smith, mungkin bisa disebut suatu "konspirasi melawan publik" ketika pebisnis bertemu untuk makan siang. Apalagi ketika mereka membentuk entitas legal kolektif dan aliansi di antara mereka, dengan berbagai hak yang dijaminkan kepada mereka, dan bahkan didukung serta diperkuat oleh kekuasaan negara.

Dengan kondisi ini, mari kita mengingat kembali beberapa karakteristik MAI yang sengaja dibuat, yang mengandalkan informasi yang sampai kepada publik yang peduli, berkat kerja "aliansi sesat".

Para "investor" diberi hak untuk secara bebas memindahkan aset, termasuk fasilitas produksi dan aset keuangan, tanpa "campur tangan pemerintah" (yang berarti suara publik). Dengan berbagai kelicikan yang dikenal baik oleh kalangan dunia bisnis dan pengacara perusahaan, hak-hak yang semula hanya diberikan kepada investor asing dengan mudah ditransfer ke investor domestik. Di antara pilihan-pilihan demokratis yang mungkin dihalangi adalah menyerukan kepemilikan lokal, alih teknologi, pengelola lokal, tanggungjawab perusahaan, penyediaan upah standar, preferensi (misalnya untuk wilayah tertinggal, kalangan minoritas, perempuan, dan sebagainya), perlindungan pekerja-konsumen-lingkungan hidup, pembatasan produk berbahaya, perlindungan bisnis kecil, dukungan bagi industri strategis dan berkembang, distribusi lahan, kontrol atas komunitas dan pekerja (yakni yang menjadi dasar demokrasi sesungguhnya), aksi buruh (yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman ilegal atas kemapanan), dan seterusnya.

"Investor" diperbolehkan untuk menuntut pemerintah di semua tingkatan untuk setiap bentuk pelanggaran hak yang sudah dijaminkan kepada mereka. Tapi tidak sebaliknya: warga negara dan pemerintah tidak dapat menuntut "investor." Kasus Ethyl dan Metalclad adalah sebuah inisiatif penyelidikan.

Tidak boleh ada pembatasan bagi investasi di negara-negara yang memiliki rekor pelanggaran hak asasi manusia: seperti Afrika Selatan selama masa "penyatuan-konstruktif", atau di Myanmar sekarang. Harus dipahami bahwa sang Don tidak akan dapat dihalangi pembatasan semacam itu. Pihak yang berkuasa berada di atas perjanjian dan undang-undang.

Pembatasan pada aliran modal juga ditentang. Misalnya kondisi yang dipaksakan oleh Chile untuk menghalangi aliran

modal jangka pendek, dipercaya telah melindungi Chile dari dampak destruktif pasar keuangan yang sangat tidak menentu, yang sangat dipengaruhi oleh irasionalitas yang tidak terduga. Atau upaya-upaya lain yang dapat membalik konsekuensi buruk dari liberalisasi aliran modal. Berbagai usulan serius untuk mencapai hasil seperti ini telah bertahun-tahun disodorkan dan menumpuk di atas meja, namun tidak pernah masuk ke dalam agenda para "arsitek kekuasaan." Mungkin benar bahwa perekonomian terganggu oleh liberalisasi keuangan, seperti ditunjukkan oleh banyak contoh. Namun ini hanyalah persoalan waktu yang sepele dibanding dengan keuntungan yang dibawa oleh liberalisasi aliran keuangan selama seperempat abad terakhir, yang dimulai terutama oleh pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Keuntungan ini cukup penting. Liberalisasi keuangan berperan pada konsentrasi kemakmuran dan memberi senjata ampuh untuk melemahkan program-program sosial. Ia juga menjadi sebab bagi "pembatasan upah secara signifikan" dan "pembatasan yang tidak biasa bagi peningkatan upah, yang menjadi konsekuensi utama dari meningkatnya situasi rawan yang dihadapi para buruh." Liberalisasi ini juga mendorong kepala Bank Federal Alan Greenspan dan pemerintahan Clinton untuk melanjutkan "keajaiban ekonomi" yang selama ini membuat takjub pihak-pihak yang memperoleh keuntungan darinya serta para pengamat yang tertipu, terutama di luar negeri.

Ada beberapa kejutan di sini. Perancang sistem ekonomi internasional pasca-Perang Dunia II mendukung kebebasan perdagangan di satu sisi namun menerapkan regulasi modal di sisi lain. Inilah yang menjadi kerangka dasar sistem Bretton Woods pada tahun 1944, termasuk piagam IMF. Satu penyebabnya adalah perkiraan (yang tampaknya masuk akal) bahwa liberalisasi keuangan akan membendung kebebasan perdagangan. Alasan lainnya adalah pemahaman bahwa hal ini akan menjadi senjata ampuh melawan demokrasi dan konsep negara kesejahteraan yang mendapat dukungan besar dari publik. Regulasi modal akan memungkinkan pemerintah menerapkan

kebijakan pajak dan moneter serta mempertahankan tenaga kerja dan program-program sosial tanpa takut terjadi pelarian modal, demikian ditunjukkan oleh jururunding AS Harry Dexter White, yang disetujui oleh rekan Inggrisnya, John Maynard Keynes. Sebaliknya aliran modal bebas akan menciptakan apa yang disebut oleh para ekonom internasional sebagai "senat virtual" di mana modal yang sangat terpusat menentukan sendiri kebijakan sosialnya kepada masyarakat yang enggan menerimanya dan menghukum pemerintah yang terkena imbas pelarian modal.[19] Asumsi Bretton Woods terbukti selama "Zaman Keemasan" pertumbuhan tinggi perekonomian dan produktivitas serta meningkatnya kontrak sosial selama tahun '50-an dan '60-an. Sistem tersebut kemudian dihancurkan oleh Richard Nixon dengan dukungan Inggris dan kemudian oleh kekuatan besar lainnya. Ortodoksi baru dilembagakan sebagai bagian "Konsensus Washington." Hasilnya lebih sesuai dengan harapan para perancang sistem Bretton Woods.

Namun antusiasme terhadap "kejaiban ekonomi" yang dibentuk oleh ortodoksi baru menurun di antara para manajer perekonomian global ketika bencana yang seakan dipercepat sejak liberalisasi arus modal pada tahun '70-an mulai mengancam "konstituen domestik" dan masyarakat umum. Ekonom kepala Bank Dunia Joseph Stiglitz, editor *Financial Times* London, dan pihak-pihak lain yang dekat dengan pusat kekuasaan mulai menyerukan langkah-langkah untuk mengatur arus modal, mengikuti anjuran pengamanan para dewan kehormatan Bank for International Settlements. Bank Dunia juga telah membalik kebijakannya. Masalahnya sekarang bukan saja kurangnya pemahaman atas perekonomian global, namun juga karena berbagai kelemahan serius menjadi sulit kian diabaikan dan kian menyebar. Mungkin akan ada perubahan, namun arahnya tidak bisa ditebak.[20]

Kembali ke MAI, para penandatangan harus "terkunci" selama dua puluh tahun. Itu adalah "usulan pemerintah AS," menurut jurubicara Kamar Dagang Kanada yang juga penasehat

senior investasi dan perdagangan bagi IBM Kanada dan terpilih untuk mewakili Kanada dalam perdebatan publik.[21]

Kesepakatan ini memiliki dampak yang sudah dari sananya "satu arah", yang merupakan konsekuensi dari persyaratan untuk "berhenti" atau "mundur." "Penghentian" berarti tidak ada peraturan baru yang dikeluarkan atau ditafsirkan sebagai "tidak sesuai" dengan MAI. "Mundur" berarti pemerintah diharapkan untuk menghapus peraturan yang telah ditetapkan yang ditafsirkan sebagai "tidak sesuai." Penafsiran, dalam semua kasus, dilakukan oleh kau-tahu-siapa. Tujuannya adalah untuk "mengunci negara-negara" dalam suatu perjanjian yang seiring perjalanan waktu akan makin mempersempit arena publik serta mengalihkan kekuasaan pada "konstituen domestik" yang disetujui dan struktur internasional yang mereka miliki. Struktur yang dimaksud mencakup rangkaian sangat kompleks dari aliansi perusahaan yang bertanggungjawab mengatur produksi dan perdagangan, dan sangat bergantung pada negara yang kuat yang harus menjaga sistem sekaligus mensosialisasikan biaya dan risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan transnasional yang berbasis nasional—pada prinsipnya semua TNC, menurut sebuah sejumlah penelitian teknis terbaru.

Batas waktu penandatanganan MAI adalah 27 April 1998, namun semakin dekat batas waktunya makin jelas bahwa penundaan akan terjadi karena munculnya berbagai protes dari masyarakat di samping perselisihan yang terjadi di dalam kelompok. Menurut rumor yang tercium oleh organ-organ kekuasaan (terutama dalam hal ini pers bisnis asing), penundaan ini juga akibat upaya oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk mengizinkan hak-hak tertentu bagi negara konstituen, serta upaya UE untuk memperoleh hak istimewa sesuatu seperti pasar internal yang luas yang selama ini dinikmati perusahaan yang berbasis di AS. Penyebab lainnya adalah keinginan Prancis dan Kanada untuk mempertahankan kendali atas industri kultural mereka (suatu ancaman yang jelas-jelas lebih signifikan bagi negara yang lebih kecil), serta penolakan negara-negara Eropa

atas bentuk-bentuk campur tangan pasar AS yang dinilai sangat ekstrim dan arogan, seperti undang-undang Helms-Burton.

Economist melaporkan permasalahan yang lebih jauh. Isu tenaga kerja dan lingkungan hidup yang "nyaris tidak ditampilkan di awal" menjadi makin sulit ditekan. Makin sulit untuk mengabaikan mereka yang paranoid dan tidak realistis yang "menghendaki standar tinggi tertulis tentang bagaimana investor asing seharusnya memperlakukan pekerja dan melindungi lingkungan hidup" serta "serangan bertubi-tubi yang mereka sebarkan melalui jaringan *website* Internet, yang mengakibatkan negosiasi menjadi mengambang." Satu kemungkinan adalah memberi perhatian pada apa yang diinginkan masyarakat. Namun pilihan itu tidak disebutkan. Pilihan ini memang dikesampingkan karena akan mementahkan keseluruhan urusan.

Bahkan jika tenggat waktu tidak tercapai dan segenap upaya diabaikan, bukan berarti bahwa "selama ini semuanya sia-sia," kata *Economist* kepada para pembacanya. Kemajuan telah diciptakan dan "dengan sedikit keberuntungan, MAI dapat menjadi cetak-biru bagi perjanjian global WTO mengenai investasi," yang mungkin lebih dapat diterima oleh "negara berkembang" yang selama ini membandel—setelah selama beberapa tahun lamanya dihantam irasionalitas pasar, dan harus mengikuti displin yang ditetapkan kepada para korban oleh penguasa dunia. Ada kesadaran yang berkembang pada elemen elit bahwa mereka dapat terciprat hak-hak istimewa yang selama ini sangat terpusat pada kelompok tertentu kalau mereka membantu menyebarkan doktrin yang disebarkan pihak berkuasa, bagaimanapun bohongnya itu, dan bagaimanapun orang lain harus menanggung akibatnya. Kita mengharapkan "sebagian dari MAI" akan terwujud di tempat lain, mungkin di IMF, yang bisa melaksanakannya secara rahasia.

Dari sudut pandang lain, penundaan yang lebih lama memberi kesempatan lebih bagi perlawanan rakyat untuk membuka selubung kerahasiaan.

Adalah penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui apa yang direncanakan untuk mereka. Upaya pemerintah dan media untuk menyembunyikannya, kecuali dari "konstituen domestik" yang diakui secara resmi, tentunya tidak dapat dipahami. Namun hambatan semacam itu telah terbukti bisa diatasi oleh aksi masyarakat yang kuat, dan bisa saja bukti itu terulang kembali.

*Versi asli artikel ini pernah dipublikasikan di Z, Mei 1998 dengan judul "Konstituen Domestik (*Domestic Constituencies*)"*

Catatan

1. Sebagai tinjauan, lihat artikel di *Z* saat itu, Noam Chomsky, *World Orders, Old and New*, Columbia University Press, 1994, juga Bab IV dan V di atas. Glenn Burins "Labor Fights Against Fast-Track Trade Measure," *Wall Street Journal*, 16 September 1997.
2. Bob Davis,*Wall Street Journal*, 3 Oktober 1997.
3. Bruce Clark, "Pentagon Strategists Cultivate Defense Ties with Indonesia," *Financial Times*,23 Maret 1998. 1965, lihat Noam Chomsky, *Year 501*, South End, 1993, Bab 4. JFK/Kolombia, lihat Michael McClintock, dalam Alexander George (ed.), *Western State Terrorism*, Polity, 1991; dan *Instruments of Statecraft*, Pantheon, 1992. Kuba: Nancy Dynne, *Financial Times*, 24 Maret 1998.
4. Jane Bussey, "New Rules Could Guide International Investment," *Miami Hearld*, 20 Juli 1997.
5. Anthony Mason, "Are Our Sovereign Rights at Risk?" *The Age*, 4 Maret 1998.
6. *Economist*, 21 Maret 1998.
7. Lihat catatan 9 di bawah.

8. Terdapat klaim yang tidak konsisten mengenai ketersediaan baru-baru ini. David Forman, *Australian*, 14 Januari; Tim Colebatch, "Inquiry Call over 'Veil of Secrecy,'" *Age*, 14 Maret 1998; editorial, *Australian*, 9 dan 12 Maret; editorial tahun 1998, *Age*, 14 Maret 1998.

9. Laura Eggertson, "Treaty to Trim Ottawa's Power," *Toronto Globe and Mail*, 3 April 1997; *Maclean's*, 28 April dan 1 September 1997; CBC, 30 Oktober dan 10 Desember 1997. Lihat *Monetary Reform* (Shanty Bay, Ontario), no. 7 (Musim Dingin 1997-1998). Mengenai WTO, lihat Martin Khor, "Trade and Investment: Fighting over Investor's Rights at WTO," *Third World Economics* (Penang), 15 Februari 1997. Teks rancangan: OECD, *Multilateral Aggreement on Investment: Consolidated Texts and Commentary* (OLIS 9 Januari 1997; DAFFE/MAI/97; Rahasia); tersedia dari Preamble Center for Public Policy (1737 2nd St. NW, Washington, D.C. 20009). Rancangan selanjutnya juga telah disebutkan; *e.g.*, Martin Khor, *Third World Economics*, 1-15 Februari 1998, tentang OECD 1 Oktober 1997. Lihat Scott Nova dan Michelle Sforza-Roderick dari Preamble, "M.I.A. Culpa," *Nation*, 13 Januari 1997, juga laporan lain oleh pers independen ("alternatif"). Untuk keterangan tambahan, lihat Maude Barlow dan Tony Clarke, *MAI and the Threat to American Freedom*, New York: Stoddart, 1998; Forum Internaional untuk Globalisasi—*International Forum on Globalization* (1555 Pacific Avenue, San Fransisco, CA 94109); Public Citizen's Global Trade Watch (215 Pennsylvania Avenue SE, Washington, D.C. 20003); Preamble Center, People's Global Action (playfair@asta.rwth-aachen.de).

10. Samuel Huntington, *American Politics: The Promise of Disharmony*, Harvard University Press, 1981; disebutkan oleh Sidney Plotkin dan William Scheurmann, *Private Interests, Public Spending*, South End, 1994, 223.

Huntington, "Vietnam Reappraised," *International Security*, Musim Panas 1981.

11. Surat Kongres tentang MAI pada Presiden Clinton; 5 November 1997.
12. Laura Eggertson, "Ethyl Sues Ottawa over MMT Law," *G&M*, 15 April 1997; *Third World Economics*, 30 Juni 1997; *Briefing Paper: Ethyl Corporation v. Government of Canada*, Preamble Center for Public Policy, n.d.; Joel Millman, *Wall Street Journal*, 14 Oktober 1997. Secara teknis, undang-undang yang baru hanya melarang perdagangan MMT secara impor dan antarprovinsi, namun ini adalah larangan yang efektif karena hanya Ethyl yang memproduksi atau menjual MMT. Kanada kemudian menyerah dan menghapuskan larangan ini karena mereka tidak ingin menghadapi tuntutan yang menghabiskan dana. John Urquhart, *Wall Street Journal*, 21 Juli 1998. Kanada kini menghadapi beban baru "pengambilalihan" dari perusahaan pembuangan limbah berbahaya dari AS, S.D. Myers, kembali di bawah aturan NAFTA mengacu pada larangan ekspor PCB yang mengandung racun berbahaya oleh Kanada. Scott Morrison dan Edward Alden, *Financial Times*, 2 September 1998.
13. Contoh terbaru adalah kasus yang dibawa oleh rumah perawatan Beverly Enterprises melawan sejarahwan tenaga kerja dari Universitas Cornell, Kate Bronfenbenner yang bersaksi mengenai praktek-praktek yang dilakukan perusahaan tersebut, dalam sebuah pertemuan kota pada undangan anggota delegasi kongres dari Pennsylvania (komunikasi personal; juga Steven Greenhouse, *NYT*, 1 April 1998; Deidre McFayden, *In These Times*, 5 April 1998). Bagi Beverly, hasilnya benar-benar tidak relevan, karena tuntutan penelusurannya saja sudah mengakibatkan kerugian bagi Profesor

Bronfenbenner dan universitas tempat ia bekerja, dan mungkin ini memiliki efek yang sangat menakutkan bagi institusi riset dan pendidikan lainnya.

14. Surat Gedung Putih, 20 Januari 1998. Saya berterimakasih pada staf Kongres terutama kantor perwakilan Bernie Sanders.
15. Jane Bussey, "New Rules Could Guide International Investment," *Miami Herald*, 20 Juli 1997; R.C. Longworth, "New Rules for Global Economy," *Chicago Tribune*, 4 Desember 1997. Lihat juga Jim Simon, *Seattle Times*, "Environmentalists Suspicious of Foreign-Investor-Rights Plan," *Seattle Times*, 22 November 1997; Lorraine Woellert, "Trade Storm Brews over Corporate Rights," *Washington Times*, 15 Desember 1997. *Business Week*, 9 Februari 1998, *NYT*, 13 Februari 1998, pernyataan berbayar; NPR, *Morning Edition*, 16 Februari 1998; Peter Ford, *Christian Science Monitor*, 28 Februari 1998; Peter Beinart, *New Republic*, 15 Desember 1997; Fred Hiatt, *Washington Post*, 1 April 1998.
16. "The Multilateral Agreement on Investment," pernyataan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Stuart Eizenstadt dan Deputi Perwakilan Perdagangan AS Jeffrey Lang, 17 Februari 1998.
17. Oliver Goldsmith, "The Traveller" (1765).
18. Lawrence Mishel, Jared Bernstein, dan John Schmitt, *The State of Working America*, 1996-97 (Economic Policy Institute: M.E. Sharpe, 1997). Untuk latar belakang resmi, lihat terutama Morton Horwitz, *The Transformation of American Law, 1870-1960*, Oxford University Press, 1992, Bab 3.
19. Eric Helleiner, *States and Reemergence of Global Finance*, Cornell, 1994; James Mahon, *Mobile Capital and Latin American Development*, Pennsylvania State University, 1996.

20. Helleiner, *op.cit.*, 190; editorial, "Regulating Capital Flows," *Financial Times*, 25 Maret 1998; Joseph Stiglitz, hari yang sama; *The State in a Changing World: World Development Report 1997* (Bank Dunia, 1997). Berbagai perkembangan ini telah diulas secara teratur dalam analisis yang sangat cermat oleh ekonom internasional David Felix, terakhir dalam "Asia and the Crisis of Financial Liberalization," dalam Dean Baker, Gerald Epstein, dan Robert Pollin, ed., *Globalization and Progressive Economic Policy* (Cambridge University Press, 1998)
21. Doug Gregory, St. Lawrence Center Forum, 18 November 1997; dicetak ulang dalam *Monetary Reform, no.* 7 (Musim Dingin 1997-1998).
22. Lihat Gut de Jonquiéres, "Axe over Hopes for MAI Accrod," *Financial Times*, 25 Maret 1998; *Economist*, 21 Maret 1998.

BAB VII
"Gerombolan *Vigilante*"

Bab VI terbit beberapa minggu sebelum batas waktu penandatanganan Perjanjian Multilateral mengenai Investasi (MAI) pada bulan April 1998 oleh negara-negara OECD. Pada saat itu cukup jelas bahwa perjanjian tersebut tidak akan tercapai, dan memang demikian yang terjadi. Ini adalah suatu peristiwa berharga yang pantas dijadikan pelajaran, yang dicapai oleh "senjata pamungkas"—aktivisme dan organisasi massa—di dalam suasana yang sangat tidak menguntungkan.

Sebagian kegagalan ini merupakan akibat dari perselisihan internal. Misalnya penolakan Eropa terhadap sistem federal AS dan undang-undang AS yang menjangkau sampai ke luar wilayahnya sendiri, kekhawatiran mengenai sampai berapa jauh otonomi kultural dapat dipertahankan, dan sebagainya. Namun permasalahan yang jauh lebih signifikan adalah ini: penentangan besar-besaran dari masyarakat di seluruh dunia. Makin sulit untuk memastikan bahwa hukum-hukum tatanan dunia akan terus "ditulis oleh para pengacara dan pebisnis yang ingin memperoleh keuntungan" serta "oleh pemerintah yang menerima masukan dari para pengacara dan pebisnis ini", sementara ada "faktor yang selalu hilang, yaitu suara publik." Demikian *Chicago Tribune* menggambarkan secara akurat

mengenai proses negosiasi yang berlangsung untuk MAI, serta upaya yang sedang berjalan untuk "membentuk peraturan" bagi "aktivitas global" di tempat lain yang juga bebas dari campur tangan publik. Singkatnya, makin sulit untuk membatasi kesadaran dan keterlibatan hanya pada sektor-sektor yang diidentifikasi secara sangat jelas sebagai "konstituen domestik" oleh pemerintahan Clinton. "Konstituen domestik" dalam hal ini adalah Dewan Bisnis Internasional Amerika Serikat yang "mengembangkan kepentingan global bisnis Amerika baik dalam maupun luar negeri" serta kelompok-kelompok perusahaan swasta. Yang pasti tidak termasuk dalam kelompok konstituen tersebut adalah Kongres (yang tidak diberi informasi mengenai pelanggaran persyaratan konstitusional), serta masyarakat umum yang suaranya diredam oleh "selubung rahasia" yang dijaga sangat ketatnya selama tiga tahun masa negosiasi intensif.[1]

Permasalahan ini dicetuskan oleh *Economist* di London seiring dengan makin dekatnya batas waktu. Informasi dibocorkan melalui kelompok-kelompok kepentingan publik dan organisasi-organisasi akar rumput, dan kian sulit untuk mengabaikan mereka yang "menghendaki standar tinggi yang tertulis, hitam di atas putih, tentang bagaimana investor asing seharusnya memperlakukan pekerja dan melindungi lingkungan hidup"—isu-isu yang "hampir-hampir tidak terdengar" selama semua pertimbangan dibatasi hanya di tangan "konstituen domestik" di negara-negara demokrasi.[2]

Seperti diduga sebelumnya, negara-negara OECD gagal mencapai kesepakatan pada tanggal 27 April 1998, dan kita beranjak ke fase berikutnya. Satu konsekuensinya yang menguntungkan adalah bahwa pers nasional meninggalkan kebisuan (virtualnya). Di halaman bisnis *New York Times*, koresponden masalah ekonomi Louis Uchitelle, melaporkan bahwa batas waktu MAI ditunda selama enam bulan karena tekanan masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan mengenai perdagangan dan investasi biasanya "hanya mendapat sedikit perhatian dari publik" (mengapa?). Sementara, walaupun "tenaga

kerja dan lingkungan hidup tidak pernah dikesampingkan," kata Direktur Perdagangan Internasional di National Association of Manufactures menjelaskan, "isu-isu tersebut tidak pernah menjadi pokok" perhatian para diplomat perdagangan dan WTO. Namun "para pihak luar ini sangat ribut menuntut agar pandangan mereka disertakan dalam perundingan perjanjian yang disebut Perjanjian Multilateral Mengenai Investasi," komentar Uchitelle (saya rasa dengan nada ironis yang disengaja), dan keributan itu cukup untuk menunda kesepakatan.

Sementara itu pemerintahan Clinton, yang "mengakui adanya tekanan tersebut", berusaha menunjukkan persoalan dalam cara yang imbang. Perwakilannya dalam perundingan MAI mengatakan "Ada dukungan kuat terhadap segi-segi perjanjian yang akan memperbaiki target lingkungan hidup negara ini serta agenda kita mengenai standar tenaga kerja internasional." Karena itu para penuntut yang ribut di luar bak mendorong sebuah pintu yang sudah terbuka. Washington menjadi pendukung yang paling bersemangat atas upaya tersebut, dan seharusnya mereka senang mengetahui hal tersebut.

Washington Post juga melaporkan mengenai penundaan tersebut di halaman finansial mereka. Mereka terutama menyalahkan "kaum cendikia Prancis" yang telah "memanfaatkan gagasan" bahwa aturan-aturan MAI "mengandung ancaman bagi budaya Prancis", yang kemudian diiyakan juga oleh Kanada. "Pemerintahan Clinton hanya menunjukkan sedikit ketertarikan untuk memperjuangkan perjanjian tersebut, terutama karena adanya penolakan keras dari banyak kelompok lingkungan hidup dan tenaga kerja Amerika yang berjuang menentang [NAFTA." Tapi entah bagaimana kelompok-kelompok ini gagal memahami bahwa penolakan mereka itu salah arah, sebab pemerintahan Clintonlah yang selama ini bersikeras mempertahankan "tujuan lingkungan hidup" dan "standar tenaga kerja." Tapi bagaimanapun kegagalan ini bukannya tanpa sebab, karena toh sejak awal tujuan dan standar yang dimaksud memang tidak pernah jelas.[3]

Bahwa tenaga kerja "berjuang menentang NAFTA", itu adalah cara khas untuk menampilkan fakta bahwa gerakan buruh menuntut versi NAFTA yang akan melayani kepentingan warga di tiga negara yang terlibat, bukan hanya investor. Dan bahwa kritikan serta usulan mereka yang mendetail dijaga agar tidak bocor ke media (seperti halnya analisis dan proposal serupa dari Kantor Penilaian Teknologi di Kongres).

Time melaporkan bahwa batas waktu dilewati "sebagian besar karena aktivitas yang terjadi di San Jose" California. *Time* mengacu pada demonstrasi yang dilakukan oleh pecinta lingkungan dan lainnya. "Tuduhan bahwa MAI akan mengubah perlindungan lingkungan nasional telah mengubah perjanjian ekonomi yang teknis menjadi *cause célèbre*." Pengamatan ini digaungkan juga oleh pers Kanada yang merupakan satu-satunya pers Barat yang memuat topik tersebut secara serius (di bawah tekanan intensif dari organisasi masyarakat dan para aktivis) setelah dua tahun membisu. *Toronto Globe and Mail* menyatakan bahwa pemerintah negara-negara OECD "tidak memahami ... kaitan global di antara organisasi-organisasi akar rumput yang dengan keterbatasan komputer dan akses Internet ternyata dapat menggagalkan suatu kesepakatan."[4]

Tema yang sama dikemukakan juga dengan nada putus asa, untuk tidak menyebut teror, oleh harian bisnis terkemuka di dunia, *Financial Times* di London. Dalam artikel berjudul "Jaringan Para Gerilyawan," mereka melaporkan bahwa "kekhawatiran dan kepanikan telah menghinggapi pemerintah negara-negara industri", ketika—"didorong oleh ketakutannya"—upaya mereka untuk memaksakan MAI secara diam-diam "dihancurkan oleh gerombolan *vigilante* yang motif dan metodenya hanya samar-samar dipahami." Karenanya wajar mereka tidak termasuk dalam bagian "konstituen domestik". Jadi, karena itu, bagaimana pemerintah dapat diharapkan untuk memahami mereka? "Minggu ini gerombolan itu mengklaim keberhasilan pertama mereka" dengan menghalangi persetujuan MAI, lanjut laporan tersebut, "dan beberapa orang berpikir hal

ini dapat mengubah cara negosiasi perjanjian ekonomi internasional secara fundamental."

Gerombolan tersebut adalah gerombolan yang mengerikan: "mereka termasuk kelompok-kelompok dagang, para pelobi lingkungan dan hak asasi manusia, dan kelompok penekan yang menentang globalisasi"—dalam hal ini globalisasi seperti yang dituntut oleh "konstituen domestik." Kelompok yang keras ini membayangi struktur kekuasaan yang lemah dan tak berdaya dalam masyarakat-masyarakat industri kaya. Mereka dipimpin oleh "gerakan luar yang menggandeng posisi ekstrim" dan memiliki "organisasi yang baik dan dukungan keuangan yang kuat" sehingga memungkinkan mereka "mengerahkan banyak pengaruh terhadap media dan anggota parlemen nasional." Di Amerika Serikat, "banyak pengaruh" terhadap media hampir tidak berarti apa-apa, sementara di Inggris, yang nyaris tidak berbeda situasinya, hal itu sampai menyebabkan Menteri Dalam Negeri Jack Straw yang berasal dari Partai Buruh harus mengaku pada BBC bahwa ia belum pernah mendengar tentang MAI. Namun harus dipahami bahwa kompromi sekecil apapun bisa berarti bencana besar.

Lebih lanjut jurnal tersebut juga menyarankan perlunya "mengerahkan dukungan bisnis" sebagai serangan balik terhadap gerombolan tersebut. Hingga saat ini kalangan bisnis belum menyadari kerasnya ancaman tersebut. Dan sesungguhnya memang keras. "Diplomat perdagangan veteran" mengingatkan bahwa dengan "semakin tingginya tuntutan akan keterbukaan dan pertanggungjawaban," maka akan "semakin sulit bagi juru runding untuk mencapai kesepakatan di balik pintu tertutup untuk kemudian disahkan oleh parlemen, sang juru stempel." "Alih-alih, mereka menghadapi tekanan untuk mendapatkan legitimasi dari untuk tindakan mereka dengan menjelaskan dan mempertahankan diri di hadapan publik." Ini bukan tugas yang mudah ketika gerombolan yang dimaksud menaruh minat pada persoalan-persoalan "keamanan sosial dan ekonomi," dan ketika dampak perjanjian perdagangan pada "kehidupan rakyat biasa

berisiko memunculkan kemarahan sosial" serta "sensitivitas terhadap isu-isu seperti standar keamanan lingkungan dan makanan." Bahkan semakin tidak mungkin "untuk membendung tuntutan kelompok-kelompok lobi untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan di WTO, yang jelas akan melanggar salah satu prinsip sentral organisasi tersebut": "Ini adalah tempat di mana pemerintah-pemerintah diam-diam bersekongkol melawan kelompok penekan domestik mereka masing-masing,' kata seorang mantan pejabat WTO." Jika dinding itu diruntuhkan, WTO dan organisasi rahasia lainnya yang beranggotakan negara-negara kaya dan berkuasa akan menjadi "ladang perburuan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," yakni para pekerja, petani, orang-orang yang peduli pada jaminan ekonomi dan sosial, keamanan pangan, dan masa depan generasi mendatang, dan elemen-elemen ekstrim lain yang tidak memahami bahwa sumberdaya digunakan paling efektif ketika dimanfaatkan untuk meraih keuntungan jangka pendek dari perusahaan-perusahaan swasta yang dilayani oleh pemerintah yang "diam-diam bersekongkol" untuk melindungi dan memperkuat kekuasaan mereka.[5]

Tidak perlu ditambahkan bahwa kelompok penekan dan perunding yang mengakibatkan ketakutan dan kekhawatiran semacam itu bukanlah Dewan Bisnis Internasional AS, "pengacara dan pebisnis" yang "merumuskan aturan tatanan global" atau kalangan sejenisnya, melainkan "suara publik" yang "hampir selalu hilang."

"Persekongkolan diam-diam" itu berlanjut hingga di luar perjanjian perdagangan. Tanggung jawab publik untuk memperkirakan biaya dan risiko diketahui, atau seharusnya diketahui, oleh para pengamat dari "perekonomian kapitalis perusahaan bebas." Dalam artikel yang sama, Uchitelle melaporkan bahwa Caterpillar, yang baru-baru ini mengandalkan kelebihan kapasitas produksinya di luar negeri untuk menghalangi pemogokan besar, telah memindahkan 25% dari produksinya ke luar negeri dan berencana meningkatkan

penjualannya di luar negeri hingga 50% pada tahun 2010, dengan bantuan dari para pembayar pajak AS. "Bank Ekspor Impor memainkan peranan penting dalam strategi [Caterpillar]", yakni dengan "kredit berbunga rendah" untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Kredit Ex-Im hampir mencapai 2% dari penghasilan kotor tahunan Caterpillar yang sebesar 19 juta dolar, yang diperkirakan akan meningkat berkat proyek baru yang direncanakan akan dimulai di Cina. Itu adalah prosedur pelaksanaan standarnya: perusahaan-perusahaan multinasional umumnya bergantung pada negara untuk layanan-layanan yang sifatnya krusial." Seorang pejabat eksekutif Caterpillar menjelaskan, "Dalam pasar yang keras, berisiko tinggi namun sekaligus menjanjikan keuntungan tinggi, Anda harus memiliki seseorang di sudut ring Anda." Dan pemerintah—terutama yang kuat—"akan selalu merupakan keuntungan lebih" dibanding bank. Mereka juga memiliki kemauan lebih besar untuk menawarkan pinjaman berbunga rendah yang diambil dari pajak masyarakat awam.

Manajemen juga harus tetap ada di tangan AS, sehingga orang-orang yang membutuhkan tetap akan memiliki pendukung di sudut ring mereka dan terus dapat menikmati gaya hidup yang layak, dengan lingkungan yang bertambah baik. Gubuk-gubuk pekerja asing tidak boleh merusak pemandangan. Selain keuntungan, mekanisme seperti ini juga akan menjadi senjata untuk mempecundangi pekerja yang berani mengangkat kepala (seperti yang digambarkan oleh peristiwa pemogokan baru-baru ini), mereka yang berani kehilangan pekerjaan, dan mereka yang menghendaki tercetusnya perang kelas. Lebih jauh lagi, semua ini memperbaiki kondisi "perekonomian negeri dongeng," yang bergantung pada "perasaan tidak aman yang diidap para pekerja," sebagaimana yang dijelaskan para ahli.

Dalam konflik atas MAI, kita tidak dapat menarik garis yang jelas. Di satu sisi adalah demokrasi industri dan "konstituen domestik" mereka. Di sisi lain, "gerombolan *vigilante*," "kepentingan khusus," dan "ekstremis luar" yang menyerukan

keterbukaan dan pertanggungjawaban serta tidak puas ketika parlemen hanya menjadi tukang stempel bagi kesepakatan-kesepakatan rahasia antara negara dan perusahaan swasta. Gerombolan *vigilante* ini menentang pusat kekuatan di dunia, bahkan di dalam sejarah dunia: pemerintahan orang-orang kaya dan negara yang kuat, lembaga keuangan internasional, serta sektor keuangan dan manufaktur yang terkonsentrasi, termasuk korporat media. Dan elemen populer menang—sekalipun dengan sumber daya sangat kecil dan organisasi sangat terbatas sehingga hanya paranoia mereka yang menuntut kekuasaan absolutlah yang dapat menerima hasil yang baru diulas. Tapi ini adalah prestasi yang nyata.

Ini bukan satu-satunya kemenangan dalam beberapa bulan terakhir. Kemenangan lainnya dicapai pada musim gugur 1997 ketika pemerintah dipaksa merancang ulang usulannya tentang undang-undang "Jalur Cepat." Ingat bahwa isunya bukanlah "perdagangan bebas" seperti yang biasa dinyatakan, melainkan demokrasi: tuntutan gerombolan *vigilante* untuk "keterbukaan dan pertanggungjawaban yang lebih besar." Pemerintahan Clinton dengan tepat mengajukan argumen bahwa mereka tidak meminta sesuatu yang baru: hanya kewenangan yang sama seperti yang dinikmati pendahulunya untuk mengarahkan "kesepakatan di balik pintu tertutup" yang kemudian diserahkan untuk kemudian "disahkan oleh parlemen." Tetapi zaman telah berubah. Seperti yang diketahui pers bisnis ketika "Jalur Cepat" menghadapi penolakan publik yang tidak diduga, lawan dari rezim lama pun memiliki "senjata pamungkas", yaitu masyarakat banyak yang tidak lagi puas berperan sebagai pengamat karena mereka merasa mampu melakukan pekerjaan penting. Keluhan pers bisnis menggemakan kembali gerutuan kaum liberal internasional di Komisi Trilateral 25 tahun lalu, yang tidak senang melihat upaya-upaya "kepentingan khusus" mengorganisir diri untuk memasuki arena politik. Humor kasar mereka menyusupi tatanan beradab yang telah mapan jauh sebelum "krisis demokrasi" muncul, yakni ketika "Truman mampu mengatur

negara hanya dengan kerjasama dengan beberapa gelintir pengacara dan bankir Wall Street," seperti yang dijelaskan oleh Samuel Huntington dari Harvard yang kemudian menjadi profesor Ilmu Pemerintahan. Tapi kini mereka menyusup ke lebih banyak lagi ruang yang sebelumnya dianggap sakral.

Ini semua adalah perkembangan yang penting. Kekuatan OECD dan konstituen domestik mereka tidak akan begitu saja menerima kekalahan. Mereka akan memanfaatkan jasa hubungan masyarakat yang lebih efisien untuk menjelaskan pada para anggota gerombolan bahwa mereka lebih baik mengejar tujuan mereka sendiri dan membiarkan urusan dunia dijalankan secara diam-diam. Mereka juga akan mencari cara untuk menerapkan MAI di OECD atau dalam kerangka lainnya.[7] Segenap upaya kini tengah dijalankan untuk mengubah piagam IMF agar menerapkan perencanaan ala MAI sebagai persyaratan pinjaman, dan dengan demikian memaksakan peraturan bagi mereka yang lemah, terutama pihak luar. Pihak yang benar-benar kuat akan menganut peraturan mereka sendiri, seperti ketika pemerintahan Clinton dengan bersemangat mengajukan permohonan, meski dengan alasan perdagangan bebas, untuk mengenakan tarif tambahan atas superkomputer dari Jepang yang menyaingi perusahaan AS (yang disebut "swasta", sekalipun luar biasa bergantung pada subsidi publik dan proteksi).[8]

Sekalipun kekuasaan dan hak istimewa terhadap swasta tidak akan berhenti, kemenangan rakyat seharusnya disambut gembira. Mereka mengajarkan kepada kita tentang apa yang bisa diraih ketika kekuatan lawan sangat tidak seimbang, seperti dalam konfrontasi MAI. Benar bahwa kemenangan semacam itu bersifat defensif. Mereka mencegah, atau setidaknya menunda, langkah yang akan melemahkan demokrasi lebih jauh dan mengalihkan lebih banyak kekuasaan ke tangan-tangan tiran swasta yang terkonsentrasi dengan cepat dalam mengatur pasar dan mendirikan "senat virtual." "Senat virtual" ini memiliki banyak cara untuk menghambat upaya rakyat menggunakan demokrasi demi kepentingan publik: ancaman pelarian modal, pengalihan

produksi, pengontrolan media, dan hal-hal lain. Kita harus mendengarkan dengan hati-hati ketakutan dan keputusasaan yang melanda pihak yang berkuasa. Mereka sangat memahami jangkauan potensial "senjata pamungkas" dan hanya berharap bahwa mereka yang mendambakan dunia yang lebih bebas dan lebih adil tidak akan mendapat pemahaman yang sama, dan karenanya menerapkannya secara efektif.

Catatan

1. R.C. Longworth, "Global Markets Become a Private Business: Experts Begin Setting the Rules Away from Public View," *Chicago Tribune-Denver Post*, 7 Mei 1998
2. *Economist*, 21 Maret 1998
3. Louis Uchitelle, *NYT*, 30 April 1998; Anna Swardson, *Washington Post*, tertanggal 29 April 1998
4. *Time*, 27 April 1998, *G&M*, 29 April 1998; keduanya disebutkan dalam *Weekly News Update*, Nicaragua Solidarity Network, 339 Lafayette St., New York, NY 10012
5. Guy de Jonquières, "Network Guerrillas", *Financial Times* (London), 30 April 1998. Jack Straw disebutkan dalam David Smith, "The Whole World in Their Hands," *Sunday Times* (London), 17 Mei 1998. Pencarian basis data pada media Inggris oleh Simon Finch sebenarnya tidak menemukan artikel tentang MAI sebelum 1998
6. Untuk bukti yang lebih luas, lihat Winfred Ruigrock dan Rob van Tulder, *The Logic of International Restructuring*, Routledge, 1995
7. Perbaruan reguler tersedia dari Public Citizen's Global Trade Watch, 215 Pennsylvania Ave SE, Washington, D.C 20003; http://www.citizen.org/pctrade/tradehome.html

8. Bob Davis, "In Effect, ITC's Steep Tariffs on Japan Protect Makers of Supercomputers," *Wall Street Journal*, 29 September 1997

Indeks

A

Afrika, 5, 108, 115
Abrahamsson, Hans, 118
Adams, John Quincy, 75
Afrika Selatan, 72
Agribisnis, 21, 63, 121
Airbus, 23
Alabama, 127
Albania, 11
Albright, Madeleine, 68
Allende, Salvador, x
Amerika Latin, 6, 18, 21, 36, 87
Andean, 22
Aristide, Jean-Claude, 102
Asia Tenggara, 5
Asia Timur, xviii, 6, 18
Asosiasi Amerika untuk Kesehatan Dunia (AAWH), 76
Asosiasi Sarjana Amerika Latin (LASA), 92

B

Badan Kongres untuk Pengkajian Teknologi, 126
Bairoch, Paul, 19
Bank Dunia, 43
Banning, Lance, 34
Barden, David, 61
Bell, Daniel, 49
Bernays, Edward, 41, 86
Boeing-MacDonald, 23
Boron, Atilio, 51
Boston Globe, 95
Brasil, 10, 35, 62
Brewer, John, 20
Brittain, Victoria, 76
Business Week, 12, 46, 51

C

Cape Town, 72
Carothers, Thomas, 89, 94
Castro, Fidel, 74
Caterpillar Corporation, 149, 166, 167
Chile, x, 4, 18
CIA, 38
Cina, 7
Clinton, Bill, 23, 51, 78

Crocker, Chester, 108
Cuban Democracy Act (CDA), 75

D

Daimler-Benz, 127
Dana Moneter Internasional (IMF), 71
Darling, Juanita, 123
de Tocqueville, Alexis, 26
Deklarasi Roma, 76
Depresi Besar, 3
Dewan Hubungan Luar Negeri, 57
Dewan Keamanan, 39, 66, 68
Dewey, John, 27, 40, 148
Doktrin Monroe, 5
Doktrin Truman, 140
Doktrin Wilson, 42
Dulles, John Foster, 36

E

Eisenhower, Dwight, 36
Eizenstadt, Stuart, 70, 145
El Salvador, 4
Encyclopaedia of the Social Sciences, 43
Eropa Barat, 13
Eropa Timur, 13
Ethyl Corporation, 142, 151

F

Far Eastern Economic Review, 61
Fasisme, ix
Fein, Seth, 123
Figueres, Jose, 93
Financial Times, 122, 127
Ford Motor Company, 124
Foreign Affairs, 4, 24, 57
Fortune, 50
Forum Internasional tentang Globalisasi, 143
Friedman, Milton, ix

G

Gallardo, Eduardo, 128
Gallup Foundation, 74
Gay Nineties, 49, 52
GE, 124, 130
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 57, 69
Giddings, Franklin Henry, 31
Gingrich, Newt, 44, 45, 47
Global Report, 109
Goldsmith, Oliver, 147
Gordon, Lincoln, 36
Gramm, Phil, 45
Greenspan, Alan, 98, 152
Greenway, H.D.S, 95
Grove, Andrew, 62
Guatemala, 4, 38

H

Haines, Gerald, 3, 10
Hamilton, Alexander, 32
Herman, Edward, S. xii
Hitler, Adolf, 86
Honduras, 4
Honeywell, 124
Hume, David, 29
Hurd, Douglas, 58
Hussein, Saddam, 148
Hutcheson, Francis, 31
Hutton, Will, 21
Ibrahim, Youssef, 56

I

Indonesia, 133
Internet, 24, 56, 61
Italia, 4, 5

J

J.P. Morgan Securities, 61
Jay, John, 33
Jefferson, Thomas, 78
Jepang, 13
Johannesburg, 72

K

Kantor Penilaian Teknologi, 97
Kapas, 14
Kennan, George, 3, 110
Kennedy, John F., 37, 70
Keynes, John Maynard, 153
Kissinger, Henry, 5
Kolombia, 38
Komisi Perdagangan Internasional AS, 97
Komisi Trilateral, 50, 168
Komite Pengadilan Amerika (IAJC), 66
Komunisme, xiii, 13
Konsensus Washington, 1, 7, 17, 63, 71
Krugman, Paul, 8
Kuba, 66, 70, 74

L

Laissez faire, xiv, 21, 57
Lakoff, Sanford, 88, 97
Lang, Jeffrey, 132, 145
Laswell, Harold, 43
Leninisme, xiii, 43
Libya, 73
Lippman, Walter, 42
Lockheed, 24
Low, Patrick, 57

M

Madison, James, 33, 39, 85, 90
MahkamahPeradilan Internasional(ICJ), 65, 93
Majelis Dunia, 39
Majelis Rendah, 138
Majelis Umum, 68
Malthus, Thomas, 48
Marshall Plan, 21
Marxis, 4
McNamara, Robert, 36, 133
Mediterania, 73
Meksiko, 11, 100
Meliorisme, 84
Merril Lynch, 62
Misi Amerika Latin, 77
Montgomery, David, 49
Morris, William, 49
Multilateral Agreement on Investment (MAI), xv, 135, 144, 161

N

National Public Radio (NPR), 144
New Deal, 42
New Republic, 94
New York Times, 55, 64, 77
Newsweek, 100
Nixon, Richard, 119

O

Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), 16, 136, 145, 162, 164
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 73
Organisasi Negara-Negara Bagian Amerika (OAS), 66, 102
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), 63
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), xv, 55, 60, 136
Orwell, George, xiii

MEMERAS RAKYAT

NEOLIBERALISME DAN TATANAN GLOBAL

Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global adalah karya terbaik Noam Chomsky. Kritiknya pada sistem politik dan ekonomi kita sangat brilian dan menyeluruh. Buku ini adalah gebrakan dahsyat fakta dan ide. Jangan berdiri terlalu dekat.
Howard Zinn

Dalam *Memeras Rakyat: Neoliberalisme dan Tatanan Global*, **Noam Chomsky** membahas neoliberalisme: sistem pro-korporasi dalam kebijakan ekonomi dan politik yang kini memicu perang kelas di seluruh dunia. Chomsky mengkritik segelintir tiran yang mencekik arena publik dan melancarkan kebijakan yang membumbungkan kekayaan pribadi, seringkali dengan mengabaikan konsekuensi sosial dan ekologi.
Memeras Rakyat menunjukkan pemikiran Chomsky mengenai filosofi pasar bebas, kontrol korporasi terhadap opini publik, dan dampak tersembunyi dari kekuatan dan kebijakan non-demokratis, seperti WTO, IMF, NAFTA, MAI, dan gerakan perlawanan mendunia yang acapkali muncul menentangnya.
Chomsky menawarkan gelora harapan bahwa aktivitas sosial dapat merebut kembali hak-hak manusia sebagai warga negara, bukan hanya sebagai konsumen, dan mendefinisikan kembali demokrasi sebagai gerakan global, alih-alih pasar global.

Noam Chomsky adalah aktivis politik terkemuka dunia, penulis, dan profesor linguistik di Massachusetts Institute of Technology, tempat ia mengajar sejak 1955. Chomsky telah banyak menulis dan mengajar di bidang linguistik, filsafat, dan politik. Bebrapa karya terbarunya adalah *Powers and Prospects; World Orders, Old and New; Deterring Democracy; Manufacturing Consent* (bersama E.S. Herman); dan *Year 501: The Conquest Continues*. Upaya Chomsky untuk memperluas demokrasi diiringi dengan gerakan perdamaian dan keadilan sosial di seluruh dunia.

Robert W. McChesney adalah Associate Professor bidang Komunikasi di University of Illinois di Urbana-Champaign. Ia adalah penulis sejumlah buku, di antaranya *Corporate Media and the Threat to Democracy dan Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times.*

PROFETIK

ISBN 979-3573-03-1

9 799793 573037

P

Paine, Thomas, 33
Pereira. Bresser, 18
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), 88, 101, 106, 126, 132, 139
Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Kanada, 97
Perot, Ross, 98
Piagam Ekonomi Amerika, 5
Polanyi, Karl, 48
Porges, Walter, 73

R

Reagan, Ronald, 24, 44, 56, 96
Republik Ceko, 127
Research Observer, 16
Ricardo, David, 48
Roaring Twenties, 49, 52
Rockefeller, David, 50
Roosevelt, Teddy, 42
Royal Institute of International Affairs, 8
Ruigrock, Winfried, 24
Rusia, 7
Russel, Bertrand, 27

S

Sanger, David, 55
Schlesinger, Arthur, 70
Schoultz, Lars, 37
Sistem Bretton Woods, 119, 152
Skandal Pergau Dam, 58
Smith, Adam, 1, 9, 25, 39, 108, 150
Soeharto, 148
Sofaer, Abraham, 67
Soviet, 7
Stiglitz, Joseph 16, 153
Straw, Jack 165

T

Thatcher, Margaret, 56, 58
Time, 93
Truman, Harry, 22, 50
UNCTAD, 18
Undang-Undang Helms-Burton, 64, 155
Undang-Undang Telekomunikasi, 78, 136
UNICEF, 7, 83

V

Vale Company, 62
van Tulder, Rob, 24
Volkswagen, 124

W

Wall Street, 50
Wall Street Journal 46, 51, 70, 98, 127
White, Harry Dexter 153
Wilson, Woodrow 42
World Wide Web 24, 62